

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA
DALAM MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN
REFUGEE SETTLEMENT ARRANGEMENT (RSA) DENGAN KAMBOJA
TAHUN 2014**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat *Global Political
Economy* (GPE)

Oleh:

Adinda Kasih

135120407111008



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA DALAM MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN *REFUGEE* *SETTLEMENT ARRANGEMENT (RSA)* DENGAN KAMBOJA TAHUN 2014

SKRIPSI

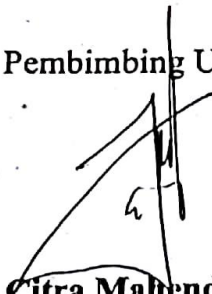
Disusun oleh:

Adinda Kasih

NIM 135120407111008

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama



Yustika Citra Mahendra, S.Sos, MA

NIP. 198408232015041001

Pembimbing Pendamping



Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int, MA

NIK. 2016079008252001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional,



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA DALAM
MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN *REFUGEE*
SETTLEMENT ARRANGEMENT (RSA) DENGAN KAMBOJA TAHUN
2014**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ADINDA KASIH

NIM 135120407111008

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Sarjana pada tanggal 21 Mei
2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji


Achmad Fathoni K, S.IP, MA

NIK. 2009068201231001


Wishnu Mahendra W, S.IP., M.Si

NIK. 2017108906281001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2


Yustika Citra Mahendra, S.Sos, MA

NIP. 198408232015041001


Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int, MA

NIK. 2016079008252001

Malang, 21 Mei 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya


Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya Adinda Kasih dengan NIM 135120407111008 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Australia Dalam Menandatangani Nota Kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) Dengan Kamboja Tahun 2014”** adalah betul-betul karya saya dalam skripsi tersebut, telah diberi catatan kaki, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 14 Mei 2018

Yang membuat pernyataan



Adinda Kasih
NIM. 135120407111008

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Australia Dalam Menandatangani**Nota Kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA)****Dengan Kamboja Tahun 2014****ABSTRAK**

Tahun 2014 menjadi tahun dimana Australia kedatangan jumlah pengungsi jalur laut begitu banyak. Hingga pada bulan September 2014, Australia mengeluarkan respon kebijakan pengungsi yang mengundang banyak komentar buruk dari rezim pengungsi internasional maupun pengungsi jalur laut itu sendiri yang berakhir dengan adanya kontroversi. Respon kebijakan tersebut adalah dalam bentuk Nota Kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) yang mengatur akan dikirimnya beberapa pengungsi jalur laut di Nauru *Offshore Processing Centre* ke Kamboja. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Australia pada akhirnya menandatangani nota kesepahaman RSA dengan Kamboja yang mengundang kontroversi. Penelitian ini menggunakan Model Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Pengungsi: Karen Jacobsen. Dengan hasil, 13 parameter mempengaruhi dan 3 parameter tidak mempengaruhi penandatanganan RSA oleh Australia.

Kata kunci: Australia, RSA, *boat people*, pengungsi, respon kebijakan pemerintah.

*Factors Influencing Australia In Signing Memorandum Of Understanding:
Refugee Settlement Arrangement (RSA) With Cambodia In 2014*

ABSTRACT

Year 2014 was the year when an influx of boat-people came to Australia is at its peak. In September 2014, Australia issued a policy response which invites many bad comments either from international refugee regime or boat people itself which ended in controversy. The policy response is on the concept of memorandum of understanding, named Refugee Settlement Arrangement (RSA). It arranged that several boat people in Nauru Offshore Processing Australia will be moved to Cambodia. From that point, this research aims to know what factors influencing Australia in signing RSA with Cambodia that the memorandum of understanding itself invites controversy. This research employ a model of host government policy response by Karen Jacobsen. The result is, there is 13 parameter influencing Australia action in signing RSA and 3 parameter found no effect.

Keywords: Australia, RSA, boat people, refugees, host government policy response

KATA PENGANTAR

Mencapai pada tahap dinyatakan ‘LULUS’ dalam ujian terakhir di masa perkuliahan penulis merupakan momen yang benar-benar luar biasa indah nya. Indah ketika didengar dan juga indah untuk dikenang, kelak. Oleh karena nya, penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin, karunia, serta kebaikan Nya, penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Australia Dalam Menandatangani *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) Dengan Kamboja Tahun 2014.’ Isu pengungsi di Australia sendiri menjadi isu yang selalu menarik perhatian penulis sejak lama.

Terutama isu pengungsi yang datang secara tiba-tiba menggunakan perahu diikuti dengan berbagai macam kontroversi dan kritik terhadap beberapa Kebijakan Pengungsi Australia yang diarahkan kepada pengungsi yang datang ke wilayah nya menggunakan perahu. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat berkontribusi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Brawijaya yang akan menulis tugas akhir maupun untuk kepentingan tugas perkuliahan lainnya. Walaupun memang tulisan ini masih jauh dari kata sempurna yang maka dari itu kritik dan saran akan sangat diterima.

Malang, Juni 2018

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Judul skripsi, daftar isi, bab satu hingga bab enam, daftar pustaka serta lampiran di tulisan ini memang peran nya sangat penting sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam menulis skripsi, juga agar penulisan ini dapat berkontribusi dengan baik bagi para pembaca. Namun halaman persembahan ini juga tidak kalah pentingnya atau dapat dikatakan menjadi halaman yang tidak biasa. Tidak biasa dalam arti sangat spesial karena nantinya akan tertulis ucapan terima kasih dan rasa syukur dari penulis untuk beberapa pihak yang penulis hormati dan sayangi.

Tak lupa, Allah SWT selalu menjadi yang pertama dan yang peran Nya paling besar dalam progress penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besar nya pada Allah SWT atas petunjuk, kemurahan hati, rahmat dan karunia Nya. Lalu berikut nya ditujukan kepada:

1. **Keluarga Pohon Kelengkeng. Mama, Papa, Kei Kalila dan Damar Sinara.** Terima kasih untuk selalu mendoakan penulis terutama soal skripsi. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan cinta nya untuk penulis. Terima kasih telah menjadikan rumah benar-benar memiliki arti '*home*' yang sebenarnya. Penulis beruntung lahir dan tumbuh di pelukan orang-orang yang ada di Keluarga Pohon Kelengkeng ini.
2. **Kucing-kucing penulis yang nakal tetapi masih tetap menggemaskan. Fluffy, Beebo, Candy, Ginger dan Martabak.** *No*

wonder, Rasulullah sangat sayang terhadap kucing. Tingkah lucu mereka selalu bisa membuat penulis terhibur dan tertawa.

3. **Bapak Yustika Citra Mahendra atau Pak Mahe** selaku dosen pembimbing utama penulis yang sangat memudahkan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Diskusi dengan Pak Mahe terkait skripsi terasa sangat mengalir tanpa ada rasa takut yang berlebihan karena pembawaan beliau yang terbuka terhadap mahasiswa. Dan terima kasih juga untuk tidak merasa lelah mendengar keluhan serta kekhawatiran penulis terkait penulisan skripsi.
4. **Ibu Gris Sintya Berlian atau Bu Gris** selaku dosen pembimbing pendamping yang membuat penulis sering merasa nyaman dibimbing oleh beliau. Terima kasih untuk saran-saran penulisan skripsi yang sangat rinci yang bahkan di beberapa hal, penulis sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Terima kasih juga untuk keramahan Bu Gris yang membuat penulis nyaman dan merasa senang sepanjang waktu konsultasi dengan Bu Gris.
5. **Bapak Achmad Fathoni dan Bapak Wishnu Mahendra** selaku dosen penguji penulis saat ujian komprehensif. Terima kasih saran dan masukan yang membangun untuk tulisan penulis.
6. **Mbak Dita dan Mas Saiful** yang membantu penulis dalam hal administratif penulisan skripsi maupun hal perkuliahan lainnya.
7. **Ilham Nuzul Fajri**. Terima kasih untuk selalu, selalu ada untuk penulis. Selalu bersedia membantu jika penulis ada kesulitan terkait penulisan skripsi. Ilham menjadi orang yang selalu merespon ‘kamu

bisa. kamu sudah sejauh ini. kamu itu hebat, ayo kerjakan.’ ketika penulis sering merasa pesimis dalam mengerjakan skripsi. *Thankyou a lot*, anak Jambi.

8. **Keluarga Gandhi’s. (Jacinda, Zarra, Royyan, Andy, Salist, Idan, Bonny, Yuniior, Priska, Alijza dan Deta).** Sahabat terdekat penulis selama di Malang. Lucu dan unik karena sebagian besar dari mereka berasal dari kota berbeda. Terima kasih sudah mendukung satu sama lain untuk mengerjakan skripsi hingga sampai saat ini sebagian besar dari Keluarga Gandhi’s sudah lulus. Dan tak lupa, ayo nongkrong lagi sampe subuh!
9. **Belinda Kirana dan Eda Nadia** yang sampai saat ini masih setia menunggu penulis pulang ke Jakarta dan masih setia menjadi sahabat penulis walaupun dihalangi jarak kota. Kalian selalu di hati.
10. **Keluarga SOSMA BEM 2014 (Kak Semy, Kak Nanda, Ilham, Kak Yopa, Widya, Achan, Ucil, Yukiko, Aji, Ovi, Ghassan, Rahma, Septi, Gea, Ista, Iqbal)** Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga terkait organisasi, nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan pada awal masa perkuliahan penulis.
11. **Keluarga Negeri Kurcaci (Riza, Vidya, Marisya, Mamang, Nurul, Riza, Galang, Liberto)** yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mulia (mengajar di SD). Ayo, kalian semangat mengejar sarjana nya, para bph-ph!

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Permasalahan	10
1. 3. Tujuan Penelitian	10
1. 4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat akademis	10
1.4.2. Manfaat praktis.....	11
KERANGKA KONSEPTUAL	12
2.1. Studi Terdahulu	12
2.2. Kajian Konseptual	18
2.2.1. Respon Kebijakan Terhadap Pengungsi	18
2.3. Model Faktor-Faktor Respon Kebijakan Pemerintah	21
2.4. Operasionalisasi Model	36
2.5. Alur Pemikiran	43
2.6. Argumen utama	44
METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Jenis Data	46
3.3. Ruang Lingkup Penelitian	46

3.4.	Teknik Pengumpulan Data	47
3.5.	Teknik Analisis Data	47
3.6.	Sistematika Penulisan	48
GAMBARAN UMUM PENGUNSI DI AUSTRALIA DAN RSA		50
4.1.	Kondisi Pengungsi di Australia	50
4.2	Australia Dan Refugee Settlement Arrangement (RSA) Dengan Kamboja 63	
4.2.1.	Deskripsi Refugee Settlement Arrangement (RSA).....	63
4.2.2.	Refugee Settlement Arrangement (RSA) dan Perjanjian Pengungsi.....	75
4.2.3.	Gambaran Kamboja dan Tindakan nya Terhadap Pengungsi	79
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA MENANDATANGANI RSA.....		95
5.1.	Variabel Bureaucratic Choices	96
5.2.	Variabel International Influence	102
5.2.1.	Rezim Pengungsi Internasional	103
5.2.1.1.	Bantuan Internasional oleh Rezim Pengungsi Internasional.....	103
5.2.1.2.	Ancaman Publisitas oleh Rezim Pengungsi Internasional	110
5.2.1.3.	Kelemahan Kelembagaan	116
5.2.2.	Negara Pengirim	121
5.2.2.1.	Hubungan Negara Pengirim dengan Penerima	121
5.3	Variabel Local Absorption Capacity	126
5.3.1.	Kapasitas Ekonomi	126
5.3.1.1.	Ketersediaan Tanah.....	126
5.3.1.2.	Daya Dukung Lahan	131
5.3.1.3.	Pola Pekerjaan.....	137
5.3.1.4.	Infrastruktur	142
5.3.2.	Keterbukaan Sosial.....	151
5.3.2.1.	Makna Budaya Terkait Pengungsi	151
5.3.2.2.	Etnisitas dan Kekerabatan	160
5.3.2.3.	Pengalaman Historis	171
5.3.2.4.	Keyakinan Terhadap Pengungsi.....	179
5.4	Variabel National Security Considerations	183
5.4.1.	Pengungsi sebagai Ancaman Keamanan.....	183
5.4.1.1.	Dimensi Strategis	183
5.4.1.2.	Dimensi Rezim.....	186

5.4.1.3.	Dimensi Struktural	189
PENUTUP	200
6.1.	Kesimpulan	200
6.2.	Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	204



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Operasionalisasi Model Karen Jacobsen	40
Tabel 2	Pemberitaan Ancaman Publisitas oleh Rezim Pengungsi Internasional.....	113



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Alur Pemikiran.....	43
---------	---------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fasilitas Penahanan Pengungsi dan Pencari Suaka milik Australia.....	5
Gambar 2	Lokasi Offshore Processing Australia dan Jaraknya dari Australia.....	60
Gambar 3	Jumlah Individu di Nauru dan Papua New Guinea <i>Offshore Processing Centre</i> Tahun 2012-2014	62
Gambar 4	Proses Penandatanganan RSA Antara Australia dan Kamboja	66
Gambar 5	Penjabatan Tangan Setelah RSA Ditandatangani	66
Gambar 6	Rincian Pengeluaran Pemerintah Australia di OPC Nauru 2014-2015	106
Gambar 7	Perbandingan jumlah populasi beberapa negara tahun 2014	128
Gambar 8	Perbandingan Jumlah Populasi Beberapa Negara Tahun 2013.....	128
Gambar 9	Kepadatan penduduk di Australia tahun 2011	129
Gambar 10	<i>Ranking</i> 11 Negara Terkait Layanan Kesehatan Tahun 2014.....	144
Gambar 11	<i>Ranking</i> Perawatan Kesehatan Paling Efisien Tahun 2014	146
Gambar 12	<i>Ranking</i> Perawatan Kesehatan Paling Efisien dan Perbandingan Posisi Tahun 2013 dan 2014	147
Gambar 13	Data Agama Mayoritas di Australia Tahun 2011 dan 2016.....	154
Gambar 14	Data Agama Mayoritas di Australia Tahun 1991 dan 1996.....	154
Gambar 15	Mayoritas Asal Negara Pengungsi dan Pencari Suaka di Pusat Penahanan Pengungsi Jalur Laut Milik Australia di Nauru dan Pulau Manus	162
Gambar 16	Urutan Kelompok Etnis Terbesar di Australia Tahun 2011.....	165
Gambar 17	Kelompok Etnis di Kamboja Tahun 2004-2014	169
Gambar 18	Urutan Kelompok Etnis Terbesar di Australia Tahun 2011.....	172
Gambar 19	Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di OPC AUS Tahun 2012-2014.....	193

DAFTAR SINGKATAN

ANAO	Australian National Audit Office
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BFC	International Labour Organisation's Better Factories Cambodia
CAT	Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment
CRC	Convention on The Rights of the Child
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade Australia
DIBP	Department of the Immigration and Border Protection
ECAFE	The Economic Commission for Asia and The Pacific
FDI	Future Directions International
HAM	Hak Asasi Manusia
HRW	Human Rights Watch
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IDI	ICT Development Index
IMF	International Monetary Fund
IOM	International Organisation for Migration
ITU	International Telecommunication Union
JRS	The Jesuit Refugee Services
LDC's	Less Developed Countries
LPI	Logistics Performance Index
MoU	Memorandum of Understanding
OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
OPC	Offshore Processing Centre
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNG	Papua New Guinea
PRI	Public Radio International
RSA	Refugee Settlement Arrangement
SHP	Special Humanitarian Programme
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi

UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
WHO	World Health Organization



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Memorandum of Understanding Between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia, Relating to The Transfer to and Assessment of Persons in Nauru, And Related Issues*
- Lampiran 2 *Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia, Relating to the Settlement of Refugees in Cambodia*
- Lampiran 3 *Press Release Pemerintah Kamboja terkait Penandatanganan RSA*



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengungsi, yang mempunyai definisi, individu yang meninggalkan negara asalnya dan tidak bisa atau tidak ingin kembali lagi karena adanya ketakutan penganiayaan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau karena opini politik mereka¹ masih menjadi masalah yang terus berjalan dan diperhatikan oleh masyarakat internasional termasuk oleh negara Terra Australis atau Australia, dimana isu tersebut menjadi isu yang masih sering dijadikan topik perbincangan oleh pejabat negara maupun warga Australia itu sendiri.

Dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh World Data yang informasi nya diperoleh dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Data tersebut menyebutkan bahwa lima belas besar negara yang dijadikan negara tujuan oleh pengungsi adalah Jerman, Amerika Serikat, Italia, Turki, Perancis, Yunani, Austria, Inggris, Afrika Selatan, Uganda, Mesir, Hungaria, Australia, Rusia dan Kanada.² Dapat dilihat dari informasi tersebut, negara maju mendominasi destinasi pengungsi salah satunya Australia. Dan jika dipandang dari segi historis terkait jumlah pengungsi yang telah diterima, sejak tahun 1901

¹ "What's the Difference Between a Refugee and an Asylum Seeker," Amnesty, diakses 13 Oktober, 2017, <https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/>

² "Refugee Countries and Asylum Data," World Data, diakses 11 Desember, 2017, <https://www.worlddata.info/refugees-by-country.php>

hingga 1948 diperkirakan sebanyak 20.000 pengungsi telah diterima oleh Australia menurut *the Australian Parliamentary Library*.³

Penggolongan pengungsi maupun pencari suaka di Australia tergolong variatif. Menurut *Australian Human Rights Commission*, Australia mempunyai program kemanusiaan yang terdiri dari dua komponen terkait pengungsi maupun individu yang memiliki kebutuhan kemanusiaan khusus.⁴ Komponen pertama atau *offshore resettlement* ditunjukkan untuk individu yang telah mempunyai status pengungsi atau status lain yang mana kebutuhan untuk dilindungi sudah diakui di negara lain sebelum datang ke Australia.⁵ Sedangkan *onshore protection* di komponen kedua dimaksudkan untuk individu yang datang ke Australia dengan visa yang sah dan membuat klaim sukses terkait suaka setelah mereka tiba.⁶

Sedangkan untuk pengungsi dan pencari suaka jalur laut, Australia menetapkan bahwa kelompok tersebut akan dikirim ke Nauru dan Papua New Guinea (PNG) untuk diproses status nya sebagai pengungsi.⁷ Respon variatif Australia dalam menanggapi pengungsi dan pencari suaka tidak terlepas dari status nya sebagai salah satu negara yang paling banyak dituju oleh pencari suaka dan pengungsi. Menurut penulis hal tersebut membuat dan memaksa Australia untuk selalu siap dalam melangsungkan serangkaian tindakan untuk menghadapi

³ "History of Australia's Refugee Program," Refugee Council, diakses Januari 14, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/>

⁴ "Asylum Seekers and Refugees Guide," Australian Human Rights Commission, diakses 15 Desember, 2017, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekers-and-refugees/asylum-seekers-and-refugees-guide>

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ "Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," Parliament of Australia, diakses 15 Desember, 2017, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore

gelombang pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur dan cara yang berbeda.

Diantara berbagai cara kedatangan yang berbeda, proses penerimaan pasang surut oleh Australia lebih condong kepada pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Dibuktikan dengan adanya dinamika yang cukup rumit dimulai dari Tahun 2001 dimana jumlah pengungsi jalur laut menuju Australia mencapai angka terbanyak hingga 5.516⁸ dan serangkaian tindakan keras lahir termasuk memerintahkan perahu untuk putar balik.⁹ Lalu di tahun 2008 peraturan keras tersebut dihapus dan terdapat kenaikan gelombang pengungsi dan pencari suaka jalur laut kembali hingga 17.202 orang di tahun 2012.¹⁰

Untuk menghadapi adanya lonjakan pengungsi dan pencari suaka yang menggunakan perahu, tahun 2012 Australia memutuskan untuk mengirim pengungsi dan pencari suaka jalur laut ke *offshore processing centre* (OPC) di Nauru dan PNG sementara proses tuntutan sebagai pengungsi nya diproses.¹¹ OPC Nauru dalam hal ini juga dapat disebut sebagai pusat pengolahan pengungsi lepas pantai atau pusat penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di Nauru. Lalu, bisa dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa perjalanan pengungsi dan pencari suaka jalur laut ke Australia mengalami banyak hambatan setiap tahunnya yang pada saat itu kebijakan masing-masing perdana Menteri Australia juga berbeda.

⁸“The Australia-Cambodia Refugee Relocation Agreement is Unique, but Does Little to Improve Protection,” Migration Policy Institute, diakses 13 Oktober, 2017, <https://www.migrationpolicy.org/article/australia-cambodia-refugee-relocation-agreement-unique-does-little-improve-protection>

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Di tahun 2014 tanggal 26 September, Australia menandatangani nota kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja¹² sebagai salah satu bentuk respon keras terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia, Scott Morrison dan Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sar Kheng di Phnom Penh.¹³ Sebelumnya, proses negosiasi RSA sudah dimulai sejak Februari 2014.¹⁴

Pada bulan tersebut Menteri Luar Negeri Australia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk membahas permintaan Australia kepada Kamboja untuk menerima pengungsi jalur laut yang ingin menetap di Australia dan sedang berada di OPC Nauru.¹⁵ Di Pulau Nauru yang ada di Wilayah Pasifik tersebut, pengungsi dan pencari suaka nya sebagian besar berasal dari Iran, Srilanka, *stateless* atau tidak mempunyai kewarganegaraan, Pakistan serta Negara Bangladesh.¹⁶

Nota kesepahaman Australia dan Kamboja berisi mengenai pencari suaka yang ingin menuju Australia, sedang berada di pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru, telah menjalani proses penentuan sebagai pengungsi serta telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kamboja akan

¹² Lauren Crothers dan Ben Doherty, "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia," *The Guardian*, 26 September, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

¹³ *Ibid.*

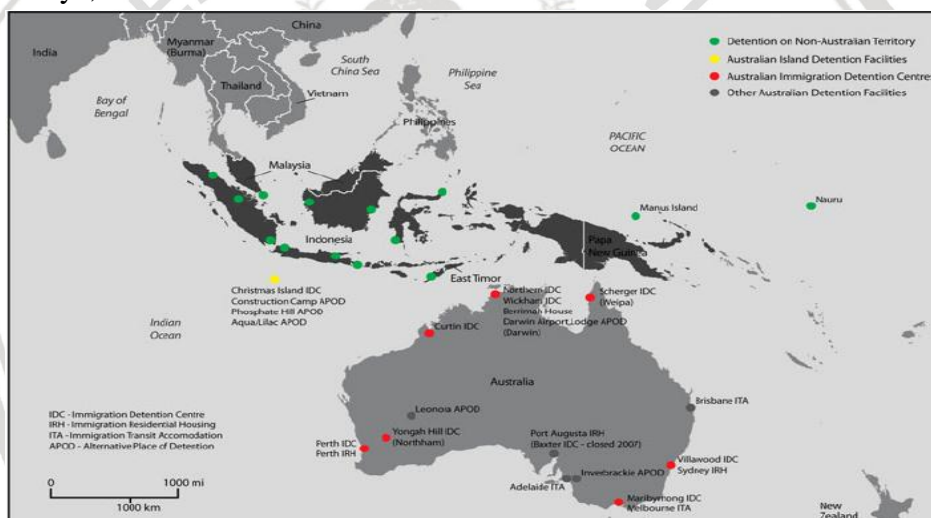
¹⁴ Samean Yun, "Cambodia Looking Into Australian Refugee Request," *Radio Free Asia*, Februari 24, 2014, <http://www.rfa.org/english/news/cambodia/refugees-02242014175437.html>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," Parliament of Australia, diakses 15 Desember, 2017, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore

ditawarkan pemukiman permanen oleh Kamboja.¹⁷ Kesepakatan dengan Kamboja ini menjadi satu-satunya *third country resettlement arrangement* yang secara formal telah disetujui sesuai dengan informasi pada laporan yang dikeluarkan oleh the Parliament of Australia tanggal 21 April 2017.

Kamboja disini sendiri bukan merupakan sebuah detensi seperti Nauru dan PNG OPC. Melainkan sebuah *third country resettlement* yang diwujudkan melalui kesepakatan RSA.¹⁸ Dapat dilihat melalui gambar dibawah ini yang dapat menjelaskan mengenai peta-peta Detensi Pengungsi milik Australia yang tersebar di beberapa wilayah dan Kamboja memang tidak termasuk menjadi salah satu diantaranya,



Gambar 1: Fasilitas Penahanan Pengungsi dan Pencari Suaka Milik

Australia¹⁹

¹⁷ “Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia, Relating to the Settlement of Refugees in Cambodia,” REF World, diakses 15 Desember, 2017, <http://www.refworld.org/docid/5436588e4.html>

¹⁸ “Chapter 4,” Parliament of Australia, diakses 2 Juni, 2018, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/NauruandManusRPCs/Report/c04

¹⁹ Coddington, Kate dan Alison Mountz. “Countering Isolation With the Use of Technology: How Asylum-Seeking Detainees on Islands in the Indian Ocean Use Social Media to Transcend Their Confinement,” *Journal of the Indian Ocean Region* 10 (1) (2014): 97-112, doi: 10.1080/19480881.2014.896104

Sifat RSA adalah *voluntary* dengan jumlah dan waktu pengungsi yang dikirim ditentukan oleh Kamboja.²⁰ Australia akan menanggung biaya operasional pengiriman pengungsi sebesar AUD40 juta.²¹ Sementara alokasi sebanyak \$15 juta ditunjukkan kepada *International Organisation for Migration* (IOM) agar dapat membantu menangani pengungsi yang ada di Kamboja.²² Kesepakatan yang didukung oleh biaya dukungan tersebut menuai protes dan kritik bahkan sebelum RSA ditandatangani. Protes pertama datang dari pengungsi di OPC Australia di Nauru tepatnya pada satu hari sebelum kesepakatan ditandatangani.

Pengungsi dan para pencari suaka dilaporkan melangsungkan beberapa percobaan bunuh diri setelah mendengar bahwa Australia dan Kamboja akan menandatangani kesepakatan RSA di hari berikutnya yaitu, 26 September 2014.²³ Masyarakat Kamboja sendiri turut mengatakan bahwa negara nya masih belum siap untuk menerima pengungsi karena catatan hak asasi manusia (HAM) Kamboja masih sangat diamati, layanan kesehatan nya kurang baik dan sistem pengadilan nya masih diwarnai dengan korupsi.²⁴

Setelah itu, UNHCR juga memberikan suara bahwa RSA telah melanggar norma internasional dan seharusnya sebuah negara tidak memindahkan tanggung

²⁰ "Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia, Relating to the Settlement of Refugees in Cambodia," REF World, diakses 15 Desember, 2017, <http://www.refworld.org/docid/5436588e4.html>

²¹ *Ibid.*

²² Lindsay Murdoch, "Remaining Two Refugees in Cambodia Rue Leaving Nauru," *The Sydney Morning Herald*, 13 Maret, 2016, <http://www.smh.com.au/world/remaining-two-refugees-in-cambodia-rue-leaving-nauru-20160311-gnh7mo.html>

²³ Daniel Pye, "Cambodia and Australia Sign Refugee Deal," *Aljazeera*, 26 September, 2014, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/cambodia-australia-sign-refugee-deal-nauru-suicide-teen-2014926124117550180.html>

²⁴ Lauren Crothers dan Ben Doherty, "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia," *The Guardian*, 26 September, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

jawabnya ke negara lain.²⁵ Kemudian, *Amnesty International* turut memberikan komentar bahwa tindakan Australia tersebut terlihat kejam dan membingungkan.²⁶ Ditandai dengan adanya kutukan Australia untuk catatan hak asasi manusia (HAM) Kamboja pada kesempatan *UN Human Rights Hearing* bulan Januari 2014. Namun di Bulan Februari 2014, Menteri Luar Negeri Australia melakukan kunjungan mengejutkan dengan pergi ke Kamboja untuk membuka obrolan terkait kesepakatan RSA yang penandatanganan nya dilakukan tujuh bulan kemudian di Kamboja.²⁷ Keadaan tersebut membuat masalah RSA semakin terlihat kontroversial.

Catatan HAM di Kamboja sendiri memburuk sejak pemilihan majelis nasional pada 28 Juli 2013 menurut *Human Rights Watch* (HRW)²⁸ yang padahal terdapat hubungan erat mengenai HAM di sebuah negara dan penerimaan nya terhadap pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi setidaknya mendapatkan hak dan bantuan dasar yang sama seperti orang asing lainnya yang merupakan penduduk resmi, termasuk kebebasan berpikir, bergerak, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.²⁹

²⁵ UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation,” UNHCR, diakses 15 Februari, 2018, <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>

²⁶ “Cambodia: New deal with Australia Signs Away Refugee Rights,” Amnesty International, diakses 20 November, 2017, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/cambodia-new-deal-australia-signs-away-refugee-rights/>

²⁷ *Ibid.*

²⁸ “World Report 2014: Cambodia,” Human Rights Watch, diakses 15 Desember, 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/cambodia>

²⁹ “Protecting Refugees: Questions and Answers,” UNHCR, diakses 17 Oktober, 2017, <http://www.unhcr.org/afr/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html>

Hal unik lain dibalik nota kesepahaman tersebut dapat dilihat dari *joint statement* RSA.³⁰ Salah satu paragraf menyatakan bahwa Kamboja ialah negara peserta penandatanganan 1951 *Refugee Convention* dan 1967 *Protocol* serta mempunyai sub keputusan nomor 224 tentang prosedur pengakuan pengungsi.³¹ Terkait hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia mengatakan bahwa ketika Kamboja dan Australia adalah peserta penandatanganan 1951 *Refugee Convention*, kerjasama akan berlangsung baik-baik saja.³²

Konvensi Pengungsi Tahun 1951 tersebut diratifikasi oleh 145 negara dan mengatur mengenai definisi pengungsi, hak-hak orang terlantar serta kewajiban hukum negara untuk melindungi mereka termasuk prinsip utama nya tentang *non-refoulement* yang menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan pengusiran dan pengembalian pengungsi ke negara yang dimana mereka akan menghadapi ancaman yang serius terkait ras, agama, kewarganegaraan dan keanggotaan dari kelompok sosial tertentu.³³

Lalu kesimpulan yang didapat terkait komentar Menteri Imigrasi Australia dan pernyataan di *joint statement* adalah Australia memindahkan pengungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya ke Negara peserta penandatanganan 1951 *Refugee Convention* tetapi Australia sendiri tidak menaati kewajiban internasional

³⁰ Lauren Crothers dan Ben Doherty, "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia," *The Guardian*, 26 September, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

³¹ *Ibid.*

³² Samantha Hawley, "Scott Morrison to Sign MoU on Refugee Resettlement, Cambodia Government Says," *ABC News*, 25 September, 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-09-24/scott-morrison-to-head-to-cambodia-to-sign-refugee-resettlement/5766282>

³³ "The 1951 Refugee Convention," UNHCR, diakses 14 Januari, 2018, <http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

sebagai negara yang menandatangani 1951 *Refugee Convention*.³⁴ Sikap ketidaktaatan Australia dapat dilihat di satu poin pada artikel 33 di 1951 *Refugee Convention* terkait larangan pengiriman pengungsi ke negara mana pun yang mana pengungsi terkait memiliki ketakutan akut untuk dianiaya, negara tersebut pun bukan hanya negara asalnya.³⁵

Sesuai dengan poin tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Australia jelas meninggalkan tanggung jawab internasional nya dengan memindahkan pengungsi di OPC Australia di ke Kamboja yang pada fakta nya, pengungsi tersebut juga merasa takut untuk dipindahkan.³⁶ Masyarakat Kamboja sendiri juga menganggap bahwa negara nya belum siap untuk menerima pengungsi.³⁷ Selain itu seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Organisasi Internasional UNHCR juga mengatakan bahwa keputusan Australia tersebut termasuk keberangkatan dari norma internasional yang mengkhawatirkan dimana sebuah negara seharusnya tidak memindahkan tanggung jawab ke negara lain seperti apa yang Australia lakukan.³⁸

Kemudian, Antonio Guterres yang juga dari UNHCR, pada kalimat penutup pernyataan terkait keputusan Australia-Kamboja, mengatakan dan berharap, bahwa Australia sebaiknya mempertimbangkan kembali pendekatan

³⁴ Savitri Taylor, "Australia's 'Safe Third Country' Provisions Their Impact on Australia's Fulfillment of Its Non-Refoulement Obligations Imposed by The Refugee Convention, The Torture Convention and the ICCPR" Law School University of Tasmania, (1996): 199.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Daniel Pye, "Cambodia and Australia Sign Refugee Deal," *Aljazeera*, 26 September, 2014, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/cambodia-australia-sign-refugee-deal-nauru-suicide-teen-2014926124117550180.html>

³⁷ Samantha Hawley, "Cambodia Close to Signing Off on Refugee Deal with Australia, says Government," *ABC News*, May 19, 2014, <http://www.abc.net.au/news/2014-05-19/cambodia-edges-closer-to-refugee-settlement-deal-with-australia/5460918>

³⁸ "UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation," UNHCR, diakses Januari 14, 2018, <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>

yang telah dilakukan.³⁹ Dengan adanya beberapa keanehan dari kesepakatan Australia dan Kamboja yang disertai oleh banyaknya protes dan kritik, penulis tertarik untuk meneliti alasan dibalik penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

1. 2. Rumusan Permasalahan

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani Nota Kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) dengan Kamboja tahun 2014?

1. 3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani nota kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) dengan Kamboja tahun 2014.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai dua jenis manfaat dimana yang pertama adalah jenis manfaat akademis dan yang kedua adalah manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat akademis

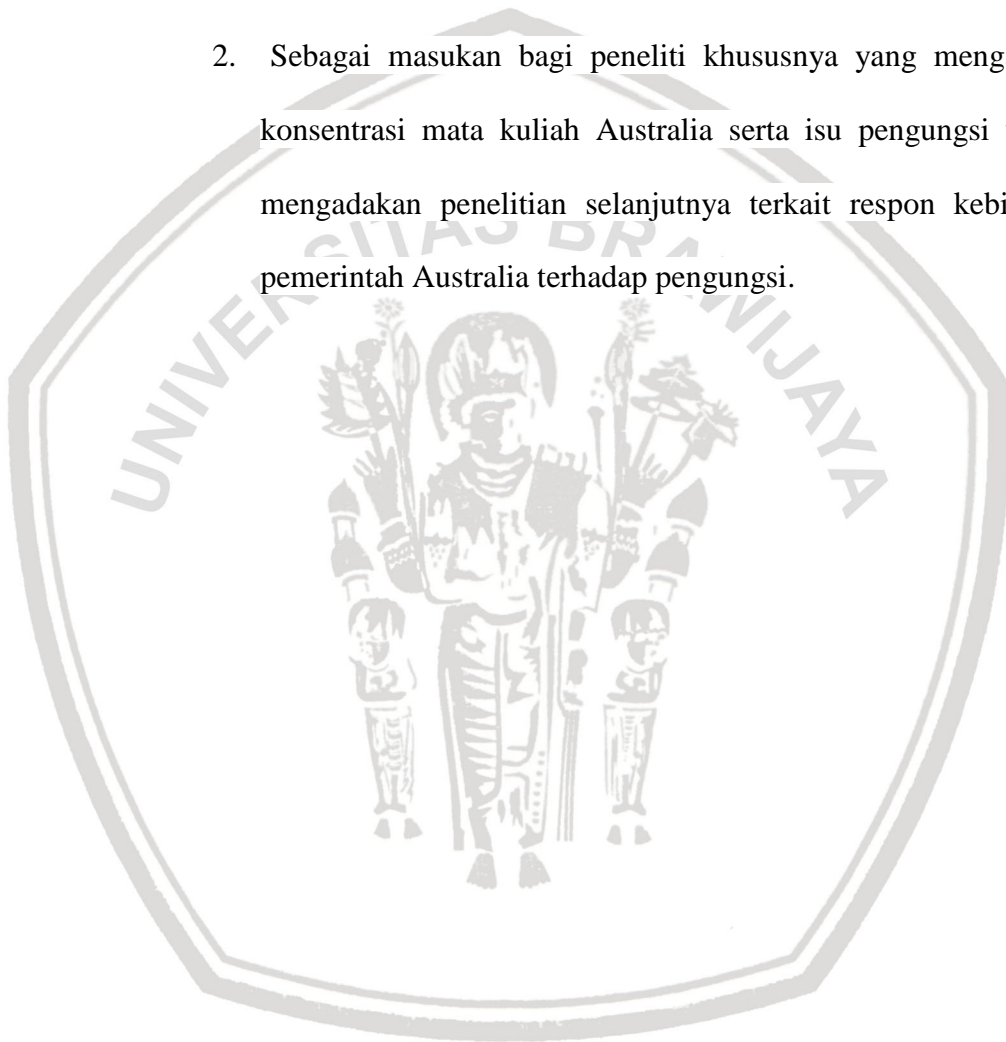
1. Meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional mengenai Respon Kebijakan Australia terkait pengungsi yang mempunyai karakteristik nya sendiri setiap tahun terutama di tahun 2014.

³⁹ *Ibid.*,

2. Menambah pengetahuan mengenai isu pengungsi yang menuju ke Australia.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Menambah studi mengenai respon kebijakan suatu negara terkait isu pengungsi di periode waktu tertentu.
2. Sebagai masukan bagi peneliti khususnya yang mengambil konsentrasi mata kuliah Australia serta isu pengungsi untuk mengadakan penelitian selanjutnya terkait respon kebijakan pemerintah Australia terhadap pengungsi.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua studi terdahulu dalam bentuk Master Thesis dan Disertasi Doktoral. Studi terdahulu pertama adalah Master Thesis di bidang *Development and International Relations, Global Refugee School* milik Maria Pederson yang berjudul *Australia And The 1951 Refugee Convention: An Analysis Of Incentives For Non Compliance*.⁴⁰ Penelitian milik Pederson berangkat dari situasi dunia saat ini dimana negara-negara terlihat ambigu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap hukum pengungsi internasional, dilihat dari adanya peningkatan aktivitas dalam penutupan batas negara, yang mana aktivitas tersebut erat hubungannya dengan solusi yang bersifat individualis yang diambil oleh pemerintah negara dalam menanggapi krisis pengungsi global.⁴¹

Penjelasan terkait situasi dunia yang terlihat ambigu tersebut diambil Pederson sebagai abstrak dan latar belakang masalah awal sebelum masuk ke fokus penelitian dengan menetapkan Australia sebagai subjek negara nya. Dalam tesis nya, Pederson menjelaskan bahwa Australia termasuk salah satu negara yang terdapat adanya peningkatan individualisasi dalam menanggapi krisis pengungsi

⁴⁰ Maria Pederson, "Australia and The 1951 Refugee Convention: An Analysis of Incentives for Non Compliance" (Master Thesis., Aalborg University Copenhagen, 2016), 1.

⁴¹ *Ibid.*

global.⁴² Selanjutnya, masalah yang menjadi fokus adalah kasus Australia dan kerjasamanya dalam Konvensi 1951 sebagai contoh relevannya.⁴³

Kasus Australia dan kerjasamanya dalam Konvensi 1951 tersebut tidak terlepas dari adanya kritik dari aktor internasional termasuk dari *United Nations* (UN) yang pada saat itu yaitu pada tahun 2016, Australia menetapkan kebijakan pencari suaka yang terlihat ambigu.⁴⁴ Adanya sikap yang kurang jelas yang dikeluarkan oleh Australia dalam menetapkan kebijakan pencari suaka tersebut mengarah pada pertanyaan besar yang ditetapkan oleh Pederson. Pertanyaan tersebut adalah, apakah Australia benar-benar patuh terhadap kewajiban hukum negara dalam Konvensi 1951 walaupun Australia juga sebenarnya masih menjadi peserta penandatanganan Konvensi 1951.⁴⁵

Alur penulisan Pederson dalam menjelaskan kasus Australia dan kepatuhannya terhadap Konvensi 1951 dibagi menjadi 2 bab sebagai usaha untuk membuat pembaca lebih memahami fokus penelitian nya. Bab pertama diisi terkait bagaimana pengaruh domestik Australia dalam mempengaruhi kepatuhannya terhadap Konvensi 1951 dimana di bab tersebut disertakan teori konstruktivisme untuk mendukung analisis nya.⁴⁶ Kemudian, dikatakan bahwa pengaruh domestik Australia mempunyai dampak signifikan terhadap kebijakan yang muncul.⁴⁷

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, 2,

⁴⁷ *Ibid.*

Konteks domestik Australia disebutkan oleh Pederson, dipengaruhi dari logika konstruktivisme dimana menurut teori tersebut seorang aktor akan mengikuti logika kesesuaian, dimana sebuah keputusan akan berdasar pada persepsi terhadap suatu situasi dan peran mereka dalam hal tersebut.⁴⁸ Lalu Pederson mengutip dari Kamis dan Hasenclever bahwa cara sebuah isu dibingkai dan sebuah input dari proses politik domestik dan internasional adalah penting dalam menentukan hasil akhir.⁴⁹

Untuk mengaplikasikan teori konstruktivisme dalam konteks domestik Australia, Pederson menyajikan studi yang dilakukan oleh McKay di tahun 2011.⁵⁰ Salah satu hasilnya, ditemukan bahwa pencari suaka jalur laut dipandang telah merusak sistem demokratis Australia dan prosesnya dengan metode kedatangan pencari suaka tersebut yang membuat pandangan warga Australia menjadi negatif.⁵¹ Selain itu, disorot juga bahwa preferensi nasional Australia juga kuat yang ditandai dengan adanya sejarah panjang bagi Australia dalam merasakan terisolasi secara geografis dan budaya yang mengarah kepada munculnya ketakutan terhadap individu lain yang melintasi batas negara nya tanpa melalui aturan yang benar.⁵²

Sedangkan di bab dua, Pederson menganalisis terkait adanya sikap ketidakpatuhan Australia terhadap Konvensi 1951 yang berhubungan dengan munculnya persepsi bahwa negara-negara lain juga melakukan strategi yang sama dan tidak ada negara, termasuk Australia, yang ingin menjadi penyedia utama

⁴⁸ *Ibid.*, 20.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, 21.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 2.

suaka.⁵³ Dalam karya Maria Pederson ini, yang lebih mempunyai fokus kepada konteks domestik Australia dalam mempengaruhi ketidakpatuhan nya terhadap Konvensi 1951, penulis mendapatkan sebuah persamaan yang dapat membantu penelitian. Persamaan tersebut adalah pada pemahaman lebih dalam terkait konteks domestik Australia khususnya masyarakatnya ketika memandang pengungsi maupun pencari suaka secara umum yang menyebabkan beberapa kebijakan luar negeri terhadap pengungsi muncul.

Pengetahuan baru yang ditawarkan oleh penulis dalam konteks domestik ini adalah lebih spesifik tidak hanya terkait persepsi masyarakat kepada pencari suaka dan pengungsi yang menuju Australia tetapi lebih mendalam kepada hubungan faktor ketersediaan lahan, infrastruktur, pola pekerjaan, etnisitas dan kekerabatan serta pengalaman historis Australia sebagai negara pendatang. Studi terdahulu kedua berjudul *Swedish Refugee Policy Making in Transition? Czechoslovaks and Polish-Jews in Sweden, 1968-1972*. Dibuat oleh Lukasz Gorniok dalam bentuk Disertasi Doktorat pada *Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umea University* tahun 2016.⁵⁴

Disertasi milik Gorniok bertujuan untuk membahas respon pemerintah Swedia terhadap peristiwa *Prague Spring*, Invasi Pakta Perang Ceko, Kampanye *Anti-Semitic* di Polandia, lalu yang utama akan membahas terkait Pengungsi Ceko dan Pengungsi Yahudi Polandia yang pergi meninggalkan negara asalnya sebagai akibat dari beberapa peristiwa tersebut selama periode formatif akhir 1960 dan

⁵³ *Ibid.*, 42.

⁵⁴ Lukasz Gorniok, "*Swedish Refugee Policy Making in Transition? Czechoslovaks and Polish Jews in Sweden, 1968-1972*" (Doctoral Dissertation., Umea University, 2016) 1

awal tahun 1970.⁵⁵ Salah satu studi kasus yang dipilih Gorniok adalah perkembangan pembuatan kebijakan Swedia terhadap pengungsi termasuk kebijakan imigrasi dan imigran dalam waktu kurang lebih lima dekade dimulai dari kontak awal Swedia dengan pengungsi selama Perang Dunia Satu hingga kedatangan Pengungsi Ceko dan Pengungsi Yahudi Polandia pada akhir tahun 1960.⁵⁶

Studi kasus tersebut dilatarbelakangi dengan pertanyaan “*What were the factors that affected the Swedish Government’s Response during this period?*” atau dalam bahasa Indonesia nya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon Pemerintah Swedia selama periode tersebut?⁵⁷ Penelitian Gorniok dipandu oleh model yang dikeluarkan Karen Jacobsen terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi formasi kebijakan pengungsi seperti *bureaucratic choices, international relations, local absorption capacity, national security considerations* dan *cold war considerations*.⁵⁸

Kemudian selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai pengaplikasian model Jacobsen ke dalam studi kasus yang dipilih oleh Gorniok seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon Pemerintah Swedia selama periode yang telah disebutkan. Perkembangan Kebijakan Swedia terkait pengungsi dijelaskan dalam urutan kronologis agar tidak hanya menganalisa pilihan kebijakan tetapi juga untuk lebih merefleksikan faktor-faktor nya dengan menggunakan kerangka kerja Jacobsen yang mempengaruhi pilihan yang ada.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, 19.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, 12.

Dimulai dari ulasan terkait pendekatan yang bersifat membatasi pada tahun 1920 dan tingkat nasionalisme ekonomi serta anti semitisme yang mencolok pada tahun 1930 hingga ditemukannya peran krusial dari pengaruh internasional dan kepentingan keamanan dalam pilihan kebijakan Swedia terhadap pengungsi pasca perang.⁵⁹ Interaksi Swedia dengan pengungsi pertama kali terjadi pada awal Perang Dunia Pertama yang ditandai dengan adanya gelombang pengungsi dan revolusi Rusia. Menanggapi hal tersebut, respon Swedia masih tergolong keras dengan melangsungkan beberapa cara untuk menghentikan gelombang tersebut.⁶⁰ Di tahun 1927, sikap keras Swedia dituangkan menjadi sebuah peraturan bernama ‘*The Aliens Act*’ yang bertujuan untuk melindungi pasar tenaga kerja dan ras Swedia dari kompetisi dan elemen asing.⁶¹

Di peraturan tersebut masyarakat asing tidak diizinkan berkompetisi dengan masyarakat asli Swedia di pasar tenaga kerja. Melihat kondisi seperti itu, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sikap dan respon Swedia dilatarbelakangi oleh motif rasial.⁶² Tahun 1942 Kebijakan Swedia terhadap pengungsi berubah menjadi sedikit lebih longgar akibat munculnya komentar negatif yang ditunjukkan pada Swedia terkait respon nya terhadap pengungsi. Kelonggaran kebijakan ditandai dengan diterimanya sebanyak sembilan ratus Pengungsi Yahudi Norwegia serta beberapa pengungsi lain asal Denmark⁶³. Kebijakan tersebut dianggap mempunyai faktor identitas dan sejarah yang sama

⁵⁹ *Ibid.*, 19.

⁶⁰ *Ibid.*, 20.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*.

⁶³ *Ibid.*, 21.

antar negara Skandinavia dimana dalam kerangka kerja Jacobsen faktor identitas terdapat pada indikator *ethnicity and kinship ties*.

Sedangkan di era Perang Dingin, faktor yang paling berpengaruh pada Kebijakan luar negeri Swedia terhadap pengungsi sebagian besar terletak di faktor *international relations* atau *international influence*.⁶⁴ Berhubungan dengan kondisi bahwa Sweden baru saja menjadi peserta penandatanganan Konvensi 1951 dan dalam beberapa bulan setelah penandatanganan tersebut Swedia menjadi negara barat pertama yang memutuskan untuk membantu Austria dengan mentransfer individu buangan dari Austria saat negara tersebut sedang menghadapi banyaknya pencari suaka yang datang⁶⁵. Keputusan Swedia tersebut erat hubungannya dengan respon awal Swedia atas permintaan UNHCR untuk membantu Austria.⁶⁶

Tesis Gorniok bermanfaat bagi penulis karena mempunyai persamaan model yang dipakai dan dapat membuka wawasan penulis terkait pengaplikasian model yang dikeluarkan oleh Jacobsen dalam studi kasus yang lebih lengkap dan juga melihat bagaimana model tersebut diaplikasikan di negara maju karena subjek negara yang penulis pilih juga tergolong negara maju yaitu Australia.

2.2. Kajian Konseptual

2.2.1. Respon Kebijakan Terhadap Pengungsi

Dalam tulisannya yang berjudul, “*Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influxes*,” atau faktor faktor yang mempengaruhi respon kebijakan pemerintah tuan rumah

⁶⁴ *Ibid.*, 29.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

terhadap gelombang pengungsi masal⁶⁷, Karen Jacobsen tidak hanya memberikan kerangka kerja yang juga berisi variabel-variabel untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon kebijakan pemerintah tetapi juga memberikan pengantar seperti apa respon kebijakan itu sendiri dengan memberikan pengetahuan terkait beberapa contoh negara yang melangsungkan tindakan tersebut.

Dalam 30 tahun terakhir, jutaan orang telah melintasi batas internasional untuk melarikan diri dari konflik dan kekacauan di negara asalnya. Respon dari pemerintah tuan rumah yang dituju oleh adanya gelombang besar tersebut bermacam-macam jenisnya baik antara negara, pemerintah tunggal dan kelompok pengungsi. Beberapa pemerintah menerima pengungsi dengan kemurahan hati dengan cara memberikan bantuan dan menjamin keselamatan mereka sementara pemerintah lain mencoba untuk mencegah pengungsi tersebut untuk masuk ke daerah nya atau memperlakukan mereka dengan kasar serta membatasi pergerakan pengungsi-pengungsi tersebut, bahkan dapat mengeluarkan kebijakan yang membahayakan keselamatan mereka.⁶⁸

Dalam model Jacobsen ini, '*government response*' mengacu pada aksi maupun *inactions* yang diambil oleh Pemerintah maupun sebuah institusi negara termasuk sebuah kebijakan pengungsi spesifik, respon

⁶⁷ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 655, DOI: 10.2307/2547631

⁶⁸ *Ibid.*

militer, aksi tidak resmi dan implementasi kebijakan.⁶⁹ Pemerintah tuan rumah menjadi agen utama yang bertanggung jawab mengenai kebijakan terhadap pengungsi karena disini pemerintah dipandang sebagai aktor tunggal dengan beberapa otonomi dari kekuatan transnasional. Diasumsikan juga, pemerintah dapat dan mampu untuk membuat keputusan yang sifatnya bertentangan dengan keinginan dan rekomendasi negara donor serta organisasi pengungsi internasional.⁷⁰

Selain itu perbedaan respon tersebut juga dapat dibagi ke dalam macam-macam aspek lebih luas lagi. Pertama, di beberapa kasus terdapat perbedaan respon kebijakan pemerintah dalam menangani pengungsi dengan asal yang berbeda, sebagai contoh di periode waktu yang sama pemerintah Kosta Rika merespon dengan cara yang berbeda ketika gelombang pengungsi dari Nikaragua dan Salvador sampai ke wilayah negara nya.⁷¹ Sementara perbedaan di aspek lainnya dapat dilihat pada respon *less developed countries* (LDC's) atau negara kurang berkembang dan maju.

Kebijakan yang diambil oleh LDC's dapat dikatakan berbeda dengan pemerintah industri barat dikarenakan adanya perbedaan faktor ekonomi, politik dan militer yang membentuk respon kebijakan masing-

⁶⁹ *Ibid.*, 657.

⁷⁰ *Ibid.*, 658.

⁷¹ (Basok, 1990) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 655, DOI: 10.2307/2547631

masing.⁷² Juga, meskipun semua negara tuan rumah mengalami jenis masalah yang serupa terkait masuknya pengungsi, skala dan intensitasnya akan berbeda untuk negara-negara kurang berkembang (LDC's) dan negara barat, sebagai contohnya masalah keamanan dan lingkungan lebih besar bagi LDC's dibandingkan di negara-negara barat.⁷³

2.3. Model Faktor-Faktor Respon Kebijakan Pemerintah

Model yang diciptakan Karen Jacobsen ini berusaha mengidentifikasi sekumpulan faktor yang mempengaruhi formasi kebijakan pengungsi dimana kebijakan masing-masing negara pasti berbeda. Dimulai dari respon dengan tidak melakukan apa apa atau merespon dengan negatif hingga yang bersifat mulia dengan cara bertindak secara positif. Dalam model ini, Jacobsen membagi empat kategori faktor yang luas yang dapat mempengaruhi kebijakan terhadap pengungsi, diantaranya adalah *bureaucratic choices made by the government*, *international relations*, *the absorption capacity of the local host community* dan *national security considerations*.⁷⁴

1. *Bureaucratic choices made by the government* (Pilihan birokratik yang dibuat oleh Pemerintah)

Di dalam pembuatan kebijakan terkait pengungsi, keputusan hukum birokrasi sebelumnya akan mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi selanjutnya. Satu keputusan hukum birokrasi yang penting adalah keputusan untuk mengalokasikan tanggung jawab mengenai pengungsi diserahkan kepada

⁷² (Kibreab, 1991; Salomon, 1991; Pitterman, 1987) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 656, DOI: 10.2307/2547631

⁷³ Karen Jacobsen, Op.Cit., 656.

⁷⁴ *Ibid.*, 660.

badan negara sipil yang biasanya berada didalam kementerian dalam negeri atau kesejahteraan sosial maupun sejenisnya.⁷⁵

- **Respon birokrasi pemerintah**

Variabel *bureaucratic choices* tersebut diturunkan menjadi respon birokrasi pemerintah untuk indikator nya dimana pengaplikasian dari keputusan birokratik yang diputuskan oleh suatu pemerintah mempunyai contoh seperti ketika pengungsi merupakan sarana untuk kelangsungan hidup dan kemajuan karir birokrasi, lembaga suatu negara memiliki kepentingan pribadi dalam masalah pengungsi yang pada akhirnya personil tersebut cenderung akan menetapkan kebijakan pengungsi yang positif.⁷⁶ Personil-personil tersebut akan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke kamp-kamp pengungsi.

Namun, sebaliknya jika pengungsi tersebut merupakan tanggung jawab dari badan militer atau departemen lain yang mempunyai tanggung jawab dan prioritas berbeda, beberapa pejabat akan mempunyai kepentingan lebih sedikit terkait kesejahteraan pengungsi yang nantinya pengungsi-pengungsi tersebut dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber daya yang tersedia dan dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan suatu negara. Lalu hasil akhirnya kebijakan pengungsi yang lebih negatif mungkin akan dijadikan nyata.⁷⁷

Sedangkan contoh implementasi respon kebijakan pemerintah di sebuah negara salah satunya adalah studi kasus di Thailand dan Zimbabwe. Di Thailand, tanggung jawab terkait pengungsi Kamboja diserahkan kepada Thai Defense

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, 661.

⁷⁷ *Ibid.*

Force. Badan tersebut mengasosiasikan pengungsi dengan berbagai ancaman keamanan dan tindakan mereka sangat ketat terhadap pergerakan pengungsi itu sendiri dan mewajibkan mereka untuk tinggal di kamp pengungsi di luar perbatasan Thailand. Pada akhirnya, kebijakan seperti dipindahkan ke negara ketiga maupun dipulangkan ke negara asalnya akan diambil.⁷⁸

Sebaliknya, respon birokrasi pemerintah Zimbabwe terhadap gelombang pengungsi Mozambiq cenderung positif. Pertama, pengungsi tersebut diserahkan dibawah perlindungan departemen kesejahteraan sosial. Kedua, akibat adanya respon birokratik yang baik, kebijakan yang muncul bersifat lebih longgar di lapangan yaitu adanya kebebasan untuk kapan saja meninggalkan kamp yang disediakan dan kasus *refoulement* atau pengusiran orang-orang yang sebenarnya memiliki hak untuk diakui sebagai pengungsi lebih jarang terjadi.⁷⁹

2. *International Relations* atau *International Influence* (Hubungan Internasional atau Pengaruh Internasional)

Penyebrangan ekstrallegal manusia dari satu negara ke negara lain biasanya mempengaruhi hubungan internasional antar pemerintah yang dengan demikian menarik perhatian pemerintah lain yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Disini, organisasi internasional juga terlibat baik dengan pengungsi itu sendiri atau hubungan nya dengan pemerintah terkait. Di variabel kedua ini pengaruh internasional pada pembuatan kebijakan pemerintah tuan rumah terlihat

⁷⁸ (Jacobsen, 1992; Robinson, 1985) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 661, DOI: 10.2307/2547631

⁷⁹ "Refoulement," Social and Human Sciences, UNESCO, diakses 20 November, 2017, <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/refoulement/>

paling kuat berasal dari dua sumber yaitu dari rezim pengungsi internasional dan negara pengirim.

- ***International Refugee Regime (Rezim pengungsi internasional)***

Rezim pengungsi internasional merupakan indikator pertama dari variabel *International Influence*. Rezim pengungsi internasional mempengaruhi pemerintah tuan rumah dalam alasan praktis dan normatif. Praktisnya, bantuan internasional dapat meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk menerima pengungsi dengan menyediakan bantuan finansial, menstimulasi pasar domestik dan meningkatkan infrastruktur.⁸⁰ Dalam kasus ini UNHCR menjadi salah satu contoh yang tergolong dalam rezim internasional. Disini, penyediaan bantuan ke negara dan ancaman mengurangnya mempunyai arti bahwa UNHCR membawa beberapa pengaruh kepada pemerintah tuan rumah.⁸¹

Salah satu contoh kasus dalam parameter pertama yaitu bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional adalah ketika Pakistan menerima pengungsi tahun 1980 dengan dibantu oleh dana UNHCR sebanyak satu juta Dollar per-hari nya.⁸² Bantuan UNHCR tersebut dikatakan dalam model ini dapat mempengaruhi respon kebijakan suatu negara untuk lebih menerima gelombang pengungsi karena nantinya beban finansial negara akan dibantu oleh rezim internasional.

Sedangkan dalam level normatif, yang bersamaan juga sebagai parameter kedua yaitu ancaman akan publisitas internasional yang buruk dapat digunakan

⁸⁰ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 662, DOI: 10.2307/2547631

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

oleh organisasi pengungsi untuk menekan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengungsi yang lebih positif.⁸³ Beberapa pemerintah mempunyai keinginan untuk tidak dipandang buruk oleh dunia internasional jadi publisitas yang diberikan mengenai pelanggaran hukum terkait pengungsi bisa menjadi pertimbangan politis yang membentuk respon pemerintah.⁸⁴

Dalam kasus Negara Thailand, terdapat beberapa kejadian dimana alasan Pemerintah Thailand untuk menerima pengungsi atau menghentikan aktivitas *refoulement* salah satunya berasal dari efek pemberitaan media yang masif mengenai respon negatif Thailand terhadap pengungsi.⁸⁵ Jadi singkatnya, kebutuhan akan bantuan dan usaha untuk menghindari publisitas negatif dapat menggerakkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan lebih positif. Namun,

Lalu, parameter ketiga dalam indikator rezim pengungsi internasional adalah kelemahan kelembagaan yang berarti disini rezim seperti UNHCR melakukan tekanan kepada sebuah negara yang mempunyai kelembagaan lemah untuk memilih kebijakan pengungsi positif karena UNHCR adalah rezim yang bersifat *better-financed* atau mempunyai finansial yang baik dan lebih berpengalaman atau *more-experienced*.⁸⁶

Kelembagaan yang lemah di sebuah negara ditandai dengan implementasi kebijakan pengungsi yang buruk.⁸⁷ Implementasi yang tidak bagus tersebut muncul karena adanya komunikasi yang berjalan tidak baik, disebabkan oleh salah satunya adanya jalan raya yang buruk dan jaringan komunikasi yang tidak

⁸³ *Ibid.*, 663.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, 664.

⁸⁷ *Ibid.*

lancar.⁸⁸ Keadaan kelembagaan yang lemah tersebut memberikan manfaat bagi UNCHR untuk mengambil sebuah peran terkait kebijakan pengungsi yang menurut tulisan Jacobsen dengan adanya sifat *better-financed* dan *more-experienced* yang dimiliki oleh UNHCR, negara terkait akan lebih sulit menolak desakan atau tekanan yang dilakukan oleh UNHCR pada tahap awal masuknya pengungsi.⁸⁹

- ***Sending Country* (Negara Pengirim)**

Sending country disini bertindak sebagai indikator kedua setelah rezim pengungsi internasional. Hubungan dengan negara pengirim mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi pemerintah negara penerima.⁹⁰ Ditunjukkan oleh fakta bahwa pengungsi yang pergi meninggalkan negara nya yang secara tradisional menjadi musuh dari negara penerima, respon yang akan muncul dari negara tuan rumah adalah dalam bentuk penuh kebencian terhadap para pengungsi yang datang.

Perlakuan kepada pengungsi Vietnam oleh beberapa negara di Asia Tenggara adalah salah satu contohnya. Dimana istilah '*my enemy's enemy is not my friend*' berlaku.⁹¹ Negara penerima yang sedang tidak berhubungan baik dengan negara pengirim mungkin pada awalnya akan menerima pengungsi, dan tindakan tersebut dipandang sebagai langkah kebijakan yang positif tetapi pada akhirnya langkah tersebut hanya untuk menggunakan mereka sebagai sarana

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, 665.

konflik dengan negara pengirim yang secara jelas tindakan tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran terhadap rekomendasi UN.⁹²

3. *Local Absorption Capacity* (Kapasitas Penyerapan Lokal)

Kapasitas penyerapan lokal adalah variabel ketiga dalam model Jacobsen dan didefinisikan sebagai situasi dimana masyarakat bersedia dan mampu menyerap masuknya pengungsi. Arti dari kata kemampuan sendiri berbeda dari arti kata kemauan. Sebuah komunitas dapat secara struktural mampu menyerap masuknya pengungsi, namun sebenarnya tidak ingin benar-benar melakukannya. Disini, kapasitas penyerapan lokal mempunyai dua indikator yaitu *economic capacity* atau kapasitas ekonomi dan keterbukaan sosial atau *social receptiveness*⁹³.

Kapasitas ekonomi mempunyai empat parameter yaitu ketersediaan tanah, daya dukung lahan, pola pekerjaan serta infrastruktur. Sedangkan keterbukaan sosial mempunyai makna budaya terkait pengungsi, etnisitas dan kekerabatan, pengalaman historis dan keyakinan terhadap pengungsi sebagai parameter nya yang juga berjumlah 4.⁹⁴

- *Economic Capacity* (Prioritas Ekonomi)

Beberapa analisis kebijakan pengungsi berpendapat bahwa respon kebijakan yang negatif bertepatan dengan periode penurunan ekonomi dan di beberapa negara barat selama beberapa abad yang lalu, pertimbangan ekonomi

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, 666.

⁹⁴ *Ibid.*

mempengaruhi keputusan pemerintah terkait *resettlement* dan definisi dari pengungsi itu sendiri.⁹⁵

Kapasitas ekonomi dari pemerintah tuan rumah untuk menerima pengungsi ditentukan oleh faktor ketersediaan lahan, daya dukung lahan, pola pekerjaan serta infrastruktur.⁹⁶ Ketersediaan lahan, daya dukung lahan dan infrastruktur berkaitan dengan adanya faktor saling mempengaruhi antara kelompok pengungsi yang banyak dengan dampaknya pada lahan yang tersedia dan kualitas dan ketersediaan air dan tanah yang dimana pengungsi tersebut dianggap memaksakan ekosistem yang ada.

Dalam hal ini, dikatakan bahwa jika kapasitas ekonomi suatu negara tergolong tinggi seharusnya negara tersebut dapat menangani isu pengungsi lebih baik serta dapat mengendalikan permintaan sumber daya alam yang diminta oleh para pengungsi.⁹⁷ Sedangkan parameter pola pekerjaan berhubungan ketika masyarakat lokal negara penerima tidak merasa terlalu terancam ketika para pengungsi membawa sumber daya berupa kemampuan yang baik dibidang pertanian, pasar tenaga kerja dan pasar modal.⁹⁸

- ***Social Receptiveness (Keterbukaan Sosial)***

Di variabel keterbukaan sosial, terdapat empat parameter yaitu *the cultural meaning of refugees* atau makna budaya terkait pengungsi, *ethnicity and kinship* atau etnisitas dan kekerabatan, *historical experience* atau pengalaman historis

⁹⁵ (Scheinmen, 1983; Ivenod, 1989) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

serta *beliefs about refugees* atau kepercayaan mengenai pengungsi. Pada parameter *the cultural meaning of refugees* atau makna budaya terkait pengungsi adalah cara bagaimana masyarakat penerima memandang pengungsi dan bagaimana cara mereka meresponnya dipengaruhi oleh makna dibalik kata pengungsi itu sendiri bagi mereka⁹⁹.

Makna tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, historis dan keagamaan. Sebagai contohnya adalah Islam, yang mempunyai tradisi positif tentang penawaran untuk menerima pengungsi sementara atau pencari suaka dari penganiayaan politik. Arnaout mengatakan bahwa walaupun terdapat beban yang cukup besar yang dibawa oleh para pengungsi ke negara-negara Arab-Islam, pengungsi tersebut tampaknya masih tetap terus diterima karena itulah dasar peradaban Arab-Islam dan tradisi kesukuan yang dimiliki nya didasarkan pada prinsip keramahan dan untuk sering membantu orang lain.¹⁰⁰

Konotasi budaya dan agama tentang pencari suaka semacam itu lah yang secara positif mempengaruhi faktor penerimaan oleh komunitas negara tuan rumah. Salah satu contoh lain yang disediakan oleh Jacobsen dalam parameter makna budaya terhadap pengungsi itu sendiri adalah di contoh negara fundamentalis seperti Iran, Sudan dan Pakistan yang partai politik islam nya nampak. Di negara-negara seperti tiga negara tersebut elemen keagamaan dalam

⁹⁹ *Ibid.*, 668.

¹⁰⁰ (Arnaout, 1987) dalam Karen Jacobsen "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 668, DOI: 10.2307/2547631

memaknai pengungsi utama nya penting bagi komunitas untuk proses penerimaan.¹⁰¹

Sementara pada parameter *ethnicity and kinship*, dikatakan bahwa adanya penolakan maupun penerimaan dapat juga berasal dari *ethnic affinity* atau kemiripan maupun kesamaan etnik. Adanya kesamaan etnik tersebut dinyatakan juga menjadi prediktor kuat faktor penerimaan pengungsi oleh negara tuan rumah.¹⁰² Banyak dari komunitas perbatasan berbagi hubungan etnis dan kekerabatan yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi pada peningkatan jumlah pengungsi dari luar perbatasan yang akan diterima dan dibantu.¹⁰³ Selain itu, ada juga beberapa kasus terkait parameter ini yang membuktikan bahwa variasi etnis dalam sebuah kelompok terkadang juga menyebabkan adanya respon variatif dari pemerintah tuan rumah terhadap pengungsi.¹⁰⁴

Contoh dari kasus tersebut yaitu terjadi pada akhir tahun 1970. Pemerintah Somalia merespon dengan sangat murah hati terhadap gelombang pengungsi dari Ethiopia namun respon selanjutnya ditemukan berbeda terhadap lima ratus pengungsi Amharic yang padahal saat itu juga berada di tengah-tengah arus pengungsi Ethiopia dimana respon Pemerintah Somalia terhadap pengungsi Amharic terlihat kurang baik.. Untuk lebih ringkasnya, parameter ini

¹⁰¹ *Ibid.*, 669.

¹⁰² (Kunz, 1981) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 669, DOI: 10.2307/2547631

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

menjelaskan bahwa adanya pengaruh identitas etnik dalam respon terhadap pengungsi.¹⁰⁵

Selanjutnya adalah parameter ketiga yaitu mengenai *historical experience* atau pengalaman historis. Pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan gelombang pengungsi sebelumnya dan sebagai pengungsi itu sendiri akan mempengaruhi faktor penerimaan dimana ketika arus masuk sebelumnya telah membawa sebuah masalah di wilayah tersebut maka suasana kebencian masih bertahan di wilayah terkait.¹⁰⁶

Namun di sisi lain, jika masyarakat pernah merasakan situasi persis seperti apa yang para pengungsi tersebut rasakan (pergi meninggalkan negaranya dari adanya kekerasan) hasil respon kebijakan nya akan positif karena rasa simpati mereka akan otomatis lebih tinggi. Banyak dari masyarakat perbatasan terutama mereka yang berada di Afrika dan Asia mempunyai pengalaman menjadi pengungsi dan hal tersebut menyebabkan adanya bantuan timbal balik yang dilakukan oleh mereka. Contoh komunitasnya adalah masyarakat lokal Zimbabwe, Mozambiq, Ethiopia, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Iran dan Iraq.¹⁰⁷

Kemudian terdapat parameter *beliefs about refugees* atau kepercayaan terhadap pengungsi. Keyakinan mengenai alasan mengapa pengungsi datang,

¹⁰⁵ (Waldron dan Hasci, 1995) dalam Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 669, DOI: 10.2307/2547631

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

mempengaruhi keterbukaan masyarakat.¹⁰⁸ Ketika pengungsi dipandang datang hanya untuk alasan ekonomi dan telah berperilaku oportunis, hasilnya masyarakat akan kurang bersimpati. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat memandang bahwa pengungsi-pengungsi yang datang adalah murni karena memang sedang berada di bahaya yang nyata di negara asalnya atau sesuai dengan definisi ‘*refugee*’ itu sendiri, respon yang akan muncul adalah baik dan akan dibantu pada akhirnya.¹⁰⁹

Kepercayaan mengenai alasan pengungsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai penyebab dari adanya arus tersebut. Ketika terdapat informasi yang sudah tersebar luas tentang kondisi-kondisi di negara terkait yang menjadi alasan akan adanya arus tersebut, simpati masyarakat akan lebih tinggi dibandingkan dengan penyebab pengiriman yang dirasa kurang tersebar informasi nya dan kurang meyakinkan.¹¹⁰ Lalu adanya keyakinan negatif mungkin dimotivasi oleh ketakutan psikologis yang menurut Scheinman, kecenderungan mempunyai keyakinan negatif terhadap pengungsi berhubungan dengan adanya rasa kehilangan kendali dan ketakutan yang berlebihan akibat gelombang pengungsi massif.¹¹¹

Contohnya adalah ketika pengungsi diyakini bertanggung jawab atas suatu masalah sosial, sikap antagonis terhadap para pengungsi mungkin dapat menggantikan sambutan baik yang sebelumnya ada yang berasal dari faktor

¹⁰⁸ *Ibid.*, 670.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ (Scheinman, 1983) dalam Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx,” *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 670, DOI: 10.2307/2547631

etnik dan agama karena umumnya, banyak masyarakat penerima yang mengaitkan pengungsi dengan meningkatnya kekerasan dan kejahatan.¹¹² Adanya respon dari masyarakat lokal terhadap pengungsi dianggap penting karena dapat membantu pengungsi secara langsung nantinya dan karena respon masyarakat akan mempengaruhi kebijakan pemerintah

Konteks penting lainnya terkait hubungan masyarakat lokal dan pemerintah terkait pengungsi dapat dilihat ketika terdapat protes, serangan dan demonstrasi terhadap kebijakan pengungsi atau pengungsi itu sendiri yang mendesak dan memaksa respon dari pemerintah.¹¹³ Namun dibalik itu semua walaupun terdapat hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pengungsi pemerintah nantinya yang akan muncul belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat lokal. Pemerintah dapat mengambil kebijakan pengungsi positif ketika contohnya telah ada ketegangan dan kontroversi domestik seperti halnya dengan pemerintah Zia di Pakistan, karena pada saat itu pertimbangan politik dalam negeri sebanding dengan faktor lain terutama adanya ancaman keamanan.¹¹⁴

4. *Security Threats* atau Ancaman Keamanan

Variabel ini dalam model Jacobsen berangkat dari tiga dimensi keamanan yang juga menjadi parameter dari ancaman keamanan itu sendiri. Dimensi strategis yaitu kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari ancaman strategis seperti contohnya adalah ancaman akan adanya penyelundup manusia atau *people-smuggler* yang oleh karena itu biasanya sebuah negara akan

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, 671.

¹¹⁴ *Ibid.*, 671.

menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan negara nya. Ancaman strategis tersebut berasal dari eksternal.¹¹⁵

Sedangkan dimensi rezim adalah kemampuan pemerintah untuk melindungi negara nya dari ancaman internal atau dalam kata lain, disini pemerintah melihat pengungsi sebagai ancaman keamanan nasional lalu yang ketiga adalah dimensi struktural yang berarti untuk menjaga keseimbangan antara populasi negara dan sumber daya alam seperti makanan, air dan ruang untuk hidup.¹¹⁶

Dimensi rezim dapat dijelaskan lebih jauh ketika keamanan rezim pemerintah tuan rumah merasa terancam saat pengungsi memasuki wilayah mereka dengan ditandai oleh konflik etnis yang bersifat aktual maupun potensial dan berpotensi untuk merubah proporsi etnis di negara nya. Dalam kasus ini walaupun pengungsi tidak benar-benar terlibat dalam masalah domestik negara penerima, pemerintah sering menganggap mereka sebagai ancaman atau akhirnya mengeluarkan tindakan untuk mengurangi dampak politis dengan cara menerapkan kontrol lebih besar terhadap pengungsi.¹¹⁷

Satu strategi yang banyak dipraktekan adalah memisahkan pengungsi dari populasi lokal dan menempatkan mereka di sebuah kamp dibandingkan dengan membiarkan mereka hidup mandiri walaupun sebenarnya tidak ada masalah etnis yang benar-benar terlihat potensial.¹¹⁸ Alasan pemerintah untuk tetap lebih

¹¹⁵ *Ibid.*, 672.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, 673.

¹¹⁸ *Ibid.*

memilih menempatkan pengungsi di kamp adalah karena dengan hal itu dapat memperkecil adanya '*political saliency*' dalam komunitas lokal.

Tidak hanya itu, ancaman rezim ini juga timbul akibat efek dari ancaman keamanan struktural.¹¹⁹ Pengungsi sering dianggap akan menyebabkan ketegangan di sebuah negara karena jumlahnya yang tidak sedikit dan nantinya akan berpengaruh pada perebutan sumber daya alam dan akan meningkatkan kompetisi akan lahan tanah dan pekerjaan. Kemudian, adanya hal tersebut dapat menuju kearah demonstrasi dan kekacauan yang mengancam legitimasi pemerintah.¹²⁰

Sementara pada dimensi strategis, negara biasanya menunjukkan usaha untuk melindungi wilayahnya dengan cara mengerahkan pasukan militer untuk berurusan dengan pengungsi.¹²¹ Ancaman keamanan mempengaruhi kebijakan pengungsi secara negatif untuk beberapa alasan. Pertama, dengan adanya ancaman keamanan yang semakin menguat militer sebuah negara cenderung lebih berpengaruh di urusan nasional dan juga cenderung lebih memperhatikan ancaman keamanan dibandingkan dengan perihal kesejahteraan pengungsi.¹²²

Adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman keamanan tersebut berarti bertindak mengendalikan pengungsi dengan cara membatasi pergerakan mereka di kamp dan mempraktekkan tindakan *refoulement*. Lalu pada

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, 672.

¹²² *Ibid.*, 673.

akhirnya, respon kebijakan negatif terhadap ancaman keamanan sebenarnya tidak dapat dihindari.¹²³

2.4. Operasionalisasi Model

Penulis disini akan mencoba mengoperasionalisasikan parameter yang ada di model Jacobsen agar nantinya dapat lebih membantu penulis dalam pengerjaan bab V yaitu bab analisis karena di bagian operasionalisasi ini sifat konseptual yang ada di model Jacobsen diubah sifatnya menjadi operasional. Operasionalisasi model pertama adalah variabel *bureaucratic choices* atau pilihan birokratis yang mempunyai indikator respon birokrasi pemerintah dan parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi.

Untuk operasionalisasi parameter tersebut penulis mengoperasionalkan nya menjadi agensi pemerintah seperti apa di Australia yang ditugaskan untuk menerima pengungsi yang ditempatkan di Nauru OPC. Di variabel kedua atau *International Influence*, variabel ini mempunyai dua indikator. Indikator pertama adalah rezim pengungsi internasional yang didalamnya terdapat tiga parameter. Parameter pertama adalah bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional. Kedua, ancaman publisitas internasional oleh rezim pengungsi internasional dan parameter ketiga adalah kelemahan kelembagaan.

Parameter pertama dapat dioperasionalisasikan menjadi lebih spesifik dalam menyebutkan bantuan internasional nya yaitu bantuan finansial, usaha menstimulasi pasar dan bantuan peningkatan infrastruktur seperti apa yang ditawarkan dan didorong oleh rezim pengungsi internasional kepada pengungsi

¹²³ *Ibid.*

jalur laut di Nauru OPC milik Australia sesaat sebelum penandatanganan tersebut dilakukan. Untuk parameter kedua, dapat dioperasionalisasikan menjadi ancaman publisitas internasional yang dilakukan oleh rezim pengungsi internasional di beberapa media yang dalam hal ini, UNHCR bisa menjadi salah satu contohnya berhubung Jacobsen memasukkan rezim tersebut ke contoh parameter tersebut.

Selain UNHCR, Jacobsen juga menyebut entitas lain seperti organisasi-organisasi lain yang berhubungan dengan bantuan terhadap pengungsi. Jadi, kesimpulan operasionalisasi untuk parameter ancaman publisitas internasional oleh rezim pengungsi internasional adalah ancaman publisitas internasional yang dilakukan oleh UNHCR salah satunya dan rezim pengungsi lainnya yang bisa dalam bentuk publisitas luas yang disebarkan oleh media dan ditunjukkan kepada tindakan negara terkait yang saat ini negara tersebut adalah Australia yang menjadi subjek pengirim pengungsi jalur laut OPC Nauru ke Kamboja.

Sedangkan di parameter ketiga yaitu kelemahan kelembagaan, operasionalisasi nya adalah apakah kelembagaan Australia lemah ketika ketika RSA ingin ditandatangani. Lemah atau tidak nya akan berdampak pada UNHCR sebagai salah satu rezim pengungsi dapat masuk atau tidak untuk mengambil peran dalam pembuatan kebijakan respon terhadap pengungsi. Dan jika pada saat terkait kelembagaan Australia sedang lemah, keadaan nya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya adalah indikator negara pengirim yang mempunyai parameter hubungan negara pengirim dengan negara penerima atau *host government*. Operasionalisasi nya adalah bagaimana hubungan Australia sebagai

negara pengirim pengungsi jalur laut di Nauru OPC dan Kamboja sebagai negara penerima nya.

Kemudian, operasionalisasi parameter pertama di variabel kapasitas penyerapan lokal dan pada indikator kapasitas ekonomi yaitu ketersediaan tanah adalah luas lahan yang dimiliki Australia dan pengaruhnya terhadap penerimaan gelombang pengungsi. Parameter kedua yaitu daya dukung lahan dapat dioperasionalisasikan menjadi daya dukung lahan dalam bentuk daya dukung air dan kualitas tanah di Australia untuk menerima pengungsi. Operasionalisasi di parameter ketiga yaitu pola pekerjaan adalah pengalaman masyarakat Australia dalam melihat progress pengungsi jalur laut dalam mendapatkan pekerjaan di Australia. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat Australia terhadap pengungsi yang datang.

Sedangkan terkait parameter infrastruktur dapat dilihat dari kualitas infrastruktur fasilitas pendidikan, kesehatan dan kota di Australia atau fasilitas yang berkaitan dengan topangan untuk mendukung kehidupan pengungsi. Untuk indikator kedua yaitu keterbukaan sosial dalam *local absorption capacity*, operasionalisasi nya diperuntukkan kepada parameter makna budaya terhadap pengungsi, etnisitas dan kekerabatan, pengalaman historis dan keyakinan terhadap pengungsi. Parameter makna budaya terhadap pengungsi dapat dioperasionalisasikan dengan cara melihat konotasi budaya dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Australia terkait pengungsi.

Selanjutnya operasionalisasi parameter etnisitas dan kekerabatan yaitu kedekatan etnis dan kekerabatan yang dijalin dan dimiliki oleh Australia dengan negara-negara asal pengungsi jalur laut yang ada di pusat pengolahan pengungsi

lepas pantai di Nauru. Setelah parameter etnisitas dan kekerabatan terdapat parameter pengalaman historis yang berarti dapat melihat pengalaman historis masyarakat Australia terhadap gelombang pengungsi jalur laut di beberapa tahun yang lalu atau dari aspek historis dan apakah sebagian besar masyarakat Australia merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan.

Dan yang terakhir adalah parameter keyakinan terhadap pengungsi dimana parameter tersebut bisa dioperasionalkan menjadi keyakinan masyarakat Australia seperti apa terhadap alasan pengungsi jalur laut pergi dari negara asalnya. Selanjutnya, variabel keempat dalam model Jacobsen untuk dioperasionalkan adalah *National Security Considerations* yang memiliki indikator pengungsi sebagai ancaman keamanan. Indikator tersebut diikuti dengan tiga parameter yaitu dimensi strategis, dimensi rezim dan dimensi struktural.

Operasionalisasi dimensi strategis adalah apakah disini Australia mengeluarkan kemampuan nya dengan cara militer untuk mengatasi ancaman strategis (eksternal) nya karena jawaban tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap respon kebijakan pengungsi yang lahir. Lalu operasionalisasi dimensi rezim yaitu pandangan Australia kepada pengungsi jalur laut apakah dapat mengancam keamanan nasional nya atau tidak. Sedangkan yang terakhir merupakan dimensi struktural, operasionalisasi nya adalah apakah Australia melakukan kontrol terhadap jumlah populasi nya untuk menghindari perebutan sumber daya alam di negara nya karena adanya pengungsi atau tidak.

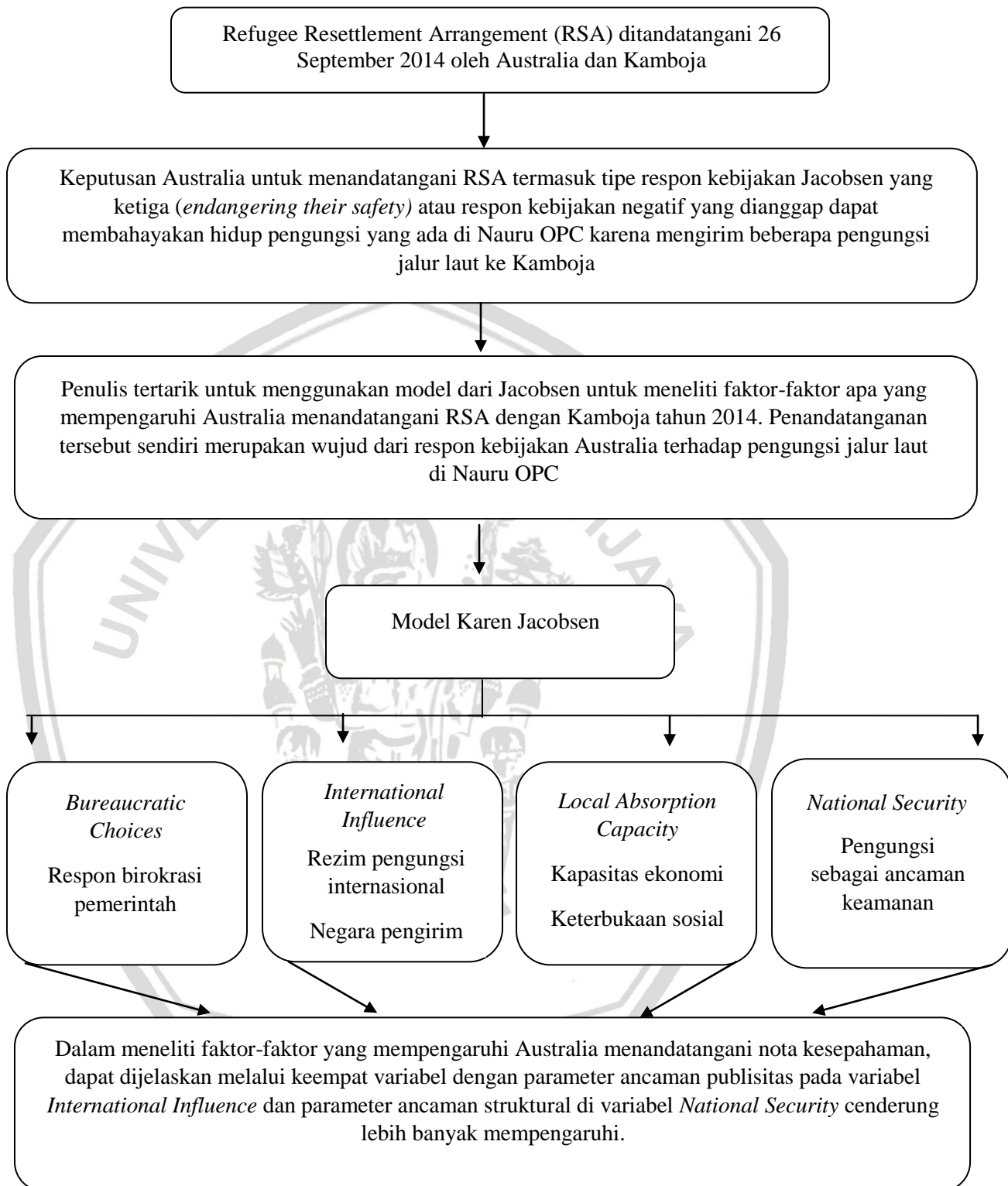
Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Bureaucratic choices</i>	- Respon birokrasi pemerintah	- Agensi pemerintah yang menerima pengungsi	- Agensi pemerintah Australia yang menerima pengungsi jalur laut
<i>International Influence</i>	- Rezim pengungsi internasional	- Bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional	- Bantuan finansial, usaha menstimulasi pasar dan bantuan peningkatan infrastruktur yang ditawarkan dan didorong oleh rezim pengungsi internasional
		- Ancaman publisitas internasional oleh rezim pengungsi internasional	- Ancaman publisitas internasional yang dilakukan oleh UNHCR dan rezim pengungsi internasional lainnya kepada Australia sebelum RSA ditandatangani
		- Kelemahan kelembagaan	- Keadaan kelembagaan Australia ketika keputusan RSA ingin ditandatangani
	- Negara pengirim	- Hubungan negara pengirim dengan penerima	- Hubungan Australia sebagai negara pengirim dan Kamboja sebagai negara penerima pengungsi jalur laut
<i>Local Absorption Capacity</i>	- Kapasitas ekonomi	- Ketersediaan tanah	- Luas lahan di Australia dan pengaruhnya dalam penerimaan gelombang pengungsi

		- Daya dukung lahan	- Daya dukung air dan kualitas tanah di Australia untuk menerima pengungsi
		- Pola pekerjaan	- Pengalaman masyarakat Australia dalam melihat progress pengungsi jalur laut dalam mendapatkan pekerjaan di Australia.
		- Infrastruktur	- Kualitas infrastruktur fasilitas pendidikan, kesehatan dan kota di Australia
	- Keterbukaan sosial	- Makna budaya terkait pengungsi	- Konotasi budaya dan agama di Australia terkait pengungsi
		- Etnisitas dan kekerabatan	- Kedekatan etnis dan kekerabatan yang dijalin dan dimiliki oleh pengungsi jalur laut dengan Australia dan Kamboja
		- Pengalaman historis	- Pengalaman historis Australia sebagai negara pendatang dan pengalaman historis Australia terhadap gelombang pengungsi jalur laut
		- Keyakinan terhadap pengungsi	- Keyakinan masyarakat Australia terhadap alasan pengungsi jalur di pergi dari negara asal

<i>National Security Considerations</i>	- Pengungsi sebagai ancaman keamanan	- Dimensi strategis	- Australia mengerahkan militer atau tidak jika berhadapan dengan ancaman strategis (eksternal)
		- Dimensi rezim	- Australia merasakan pengungsi jalur laut sebagai sebuah ancaman rezim atau tidak
		- Dimensi struktural	- Australia menganggap pengungsi jalur laut sebagai sebuah ancaman keamanan struktural atau tidak

Tabel 1: Tabel Operasionalisasi Model Karen Jacobsen. Diolah oleh penulis

2.5. Alur Pemikiran



2.6. Argumen utama

Argumen utama penulis dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani nota kesepahaman Refugee Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja pada tahun 2014 yaitu dapat diteliti dengan empat variabel yang dipaparkan dalam model Karen Jacobsen yaitu *bureaucratic choices*, *international influence*, *local absorption capacity* dan *national security considerations* dengan tingkat pengaruh yang bermacam-macam dari mulai dilihat berpengaruh dan kurang berpengaruh.

Namun nampaknya parameter ancaman publisitas di variabel *International Influence* dan parameter ancaman struktural di variabel *National Security* cenderung lebih banyak mempengaruhi dalam meneliti faktor faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani nota RSA tersebut yang menjadi salah satu bentuk respon kebijakan nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif karena disini penulis akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan faktor-faktor seperti apa yang mempengaruhi atau membuat Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja. Sedangkan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah yang variatif.¹²⁴

Definisi sederhana lain yang dapat membedakan antara jenis penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang pada setiap jenis penelitian nya didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, cikuadrat dan perhitungan statistik lainnya karena untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, peneliti kuantitatif harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu dengan cara mencatat dan menghitung dari satu, dua, tiga hingga seterusnya.¹²⁵

¹²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

¹²⁵ *Ibid.*

3.2. Jenis Data

Jenis data biasanya dapat dibagi menjadi data primer dan sekunder. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai penunjang isi dari penelitian. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan dimana data sekunder dapat disebut sebagai “*second-hand information*.”

Bahan bahan dari sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar dan majalah, artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain, laporan-laporan atau arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dan tersedia dari dalam atau dari luar organisasi, hasil survei terdahulu yang dipublikasi maupun yang tidak, analisis yang dibuat para ahli serta lain sebagainya.¹²⁶

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menetapkan ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah tahun 2014 dan beberapa tahun sebelum tahun 2014. Tahun 2014 tepatnya pada bulan September merupakan tahun perjanjian RSA diberlakukan dan ditandatangani sedangkan beberapa tahun sebelum tahun 2014 yaitu satu hingga lima tahun sebelum 2014 digunakan untuk meneliti beberapa kejadian, keadaan, maupun berita yang sekiranya mempunyai hubungan dengan dibentuknya RSA antara Australia dan Kamboja.

¹²⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 291

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara memanfaatkan buku dan jurnal fisik serta online, *e-news* atau berita online, dokumen serta laporan sah negara dan organisasi yang dapat diperoleh melalui internet. Kemudian jenis data yang sudah disebutkan tersebut nantinya diamati, dikaji dan ditelaah. Selain menggunakan data sekunder untuk melakukan studi kepustakaan yang akan mendukung penelitian, studi kepustakaan juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan ilmu terkait.¹²⁷

Dan dalam persoalan mengenai studi kepustakaan, terdapat juga alasan mengenai adanya pembatasan penelitian dalam studi kepustakaan yang salah satunya adalah karena persoalan suatu penelitian hanya bisa dijawab melalui penelitian kepustakaan dan harapan untuk mendapatkan data dari riset lapangan, sulit dicapai.¹²⁸

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Biasanya, data dalam wujud kata-kata telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (intisari dokumen, dan lain lain) lalu diproses sebelum siap digunakan melalui pengetika, penyuntingan, pencatatan dan alih tulis.¹²⁹

Begitu pun dengan teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis yang mana penulis tidak langsung memindahkan data sekunder yang telah ditemukan

¹²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) 93

¹²⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) 2

¹²⁹ Ulber Silalahi, Op.Cit. 339.

kedalam kata-kata tetapi melakukan pemaknaan terlebih dahulu dari fenomena serta data sekunder yang ada lalu hasilnya berupa deskripsi sederhana berupa teks dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

3.6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas susunan penelitian, materi yang dijelaskan dalam penelitian ini dibagi ke dalam berapa bab dan sub-bab dengan sistematika penulisan nya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab satu ini dapat dibagi menjadi latar belakang penelitian yang sekaligus menjelaskan terkait urgensi penelitian lalu dilanjutkan dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian serta manfaat penelitian

BAB II Kerangka Konseptual

Bab dua atau bab kerangka konseptual berisi dua studi terdahulu yang mempunyai kesamaan isu dan teori lalu dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang juga dilengkapi dengan pengertian yang mendukung sebuah konsep, selanjutnya dibentuk operasionalisasi konsep dengan tabel nya, lalu dua yang terakhir adalah alur pemikiran dan argumen utama.

BAB III Metode Penelitian

Bab tiga berisi cara-cara penelitian yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan yang dibagi menjadi jenis penelitian, jenis data,

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa dan sistematika penulisan.

BAB IV Isu Pengungsi di Australia dan Refugee Settlement Arrangement (RSA) dengan Kamboja

Bab empat akan menjelaskan terkait pengungsi di Australia diikuti dengan sejarah penerimaan nya, berbagai jenis gelombang pengungsi serta gambaran singkat mengenai Australia sendiri. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan lebih dalam mengenai perjanjian RSA antara Australia dan Kamboja diikuti dengan poin kontroversi nya serta juga dijelaskan mengenai penggambaran Kamboja sebagai negara tujuan perjanjian RSA dan hubungannya dengan Australia.

BAB V Faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani RSA

Bab lima memuat penjelasan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja yang pada akhirnya dapat dilihat jumlah variabel yang cenderung lebih mempengaruhi

BAB VI Penutup

Untuk bab penutup ini, terdiri atas kesimpulan terkait penelitian yang telah penulis lakukan dengan juga menyertakan beberapa poin atau variabel yang dibuktikan cenderung lebih mempengaruhi lalu diikuti dengan saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENGUNGSI DI AUSTRALIA DAN RSA

Pembahasan di bab empat ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memaparkan terkait kondisi pengungsi di Australia yang diisi dengan penjelasan sejarah Australia dalam menerima pengungsi, penggolongan jenis pengungsi di Australia bersamaan dengan statistik jumlah pengungsi jalur laut yang ada di beberapa OPC. Lalu sub bab kedua adalah tentang Australia dan *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) dengan Kamboja yang akan memaparkan tentang informasi umum RSA, respon dari berbagai pihak terkait RSA, kaitan nya antara RSA dan beberapa perjanjian pengungsi, serta gambaran umum Kamboja dan tindakannya dalam menanggapi pengungsi.

4.1. Kondisi Pengungsi di Australia

Australia, yang menetapkan warna hijau dan emas sebagai warna nasional nya, dikatakan sebagai negara yang konsisten dalam mempertahankan ekonomi nya yang kuat di *the Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).¹³⁰ Negara ini adalah negara anggota *The Commonwealth of Nations*.¹³¹ The Commonwealth dipandang menjadi salah satu cara untuk mempertahankan persatuan global melalui penggunaan bahasa, sejarah dan budaya yang sama meskipun negara anggota nya telah tumbuh mandiri dan mempunyai pemerintahan sendiri.¹³²

¹³⁰ "Australia in Brief," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 6 Februari, 2018, <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf>

¹³¹ *Ibid.*

¹³² "What is the Commonwealth?," World Atlas, diakses 9 Februari, 2018, <https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-commonwealth.html>

Human Development Report United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014 memberikan label kepada Australia sebagai negara nomor dua yang tergolong makmur dan sukses.¹³³ Negara yang makmur dan sukses juga biasanya memiliki kualitas infrastruktur dan jaringan komunikasi yang baik. Tahun 2014, Australia masuk ke dalam dua belas besar diantara 160 negara dalam kategori kualitas infrastruktur menurut *International LPI Ranking*.¹³⁴ Dan dalam hal jaringan komunikasi, Australia termasuk dalam tiga puluh peringkat teratas terkait kualitas jaringan komunikasi tahun 2014 menurut ITU'S (*International Telecommunication Union*) *ICT Development Index* (IDI).¹³⁵

Terkait lahan di negara bagian Australia dan teritori nya, Dalam kilometer persegi daerah daratan Australia adalah 7.659.861 dan daerah pulau nya seluas 32.163, dengan total nya 7.692.024 kilometer persegi.¹³⁶ Walaupun mempunyai lahan yang luas, kepadatan penduduk di Australia sangat rendah.¹³⁷ Dibuktikan dengan data CIA Factbook tahun 2014 yang juga diunduh di website Photius.com dimana kepadatan penduduk Australia dihitung menurut *person per sq km*, mempunyai nilai 2.90.¹³⁸

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ "Global Rankings 2014," The World Bank, diakses 9 Februari, 2018, <https://lpi.worldbank.org/international/global/2014>

¹³⁵ "ITU Releases Annual Global ICT Data and ICT Development Index Country Rankings," ITU, diakses 9 Februari, 2018, http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/68.aspx#.Wn1dfaiWbIU

¹³⁶ "Area of Australia-States and Territories," Australian Government: Geoscience Australia, Diakses 9 Februari, 2018, <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories>

¹³⁷ "Geografi Australia: Number of People," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, Diakses 9 Februari, 2018, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab08/untuk.html>

¹³⁸ "Population Density – Person Per Sq Km 2014 Country Ranks, Alphabetical," Photius, Diakses 9 Februari, 2018, https://photius.com/rankings/geography/population_density_persons_per_sq_km_2014_1.html

Sudah dikenal bahwa masyarakat Australia sebagian besar nya tinggal di sekitar garis pantai yang membuat sekitar 7,7 juta kilometer persegi tanah Australia tidak berpenghuni atau kosong.¹³⁹ Disini, terdapat hubungan antara lahan yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah dan mengapa masyarakat Australia sebagian besar tinggal di sekitar garis pantai. Australia mempunyai lahan luas namun jumlah lahan yang bisa dihuni, terbatas, karena sebagian besar wilayah Australia kering.¹⁴⁰ Lalu, jenis tanah di Australia cenderung tipis dan tidak subur.¹⁴¹

Disamping itu, Australia memiliki sebanyak 10 gurun yang membentuk hampir seperlima negara.¹⁴² Dan Jumlah air di sungai-sungai Australia juga tergolong tidak banyak, disertakan dengan *run-off* yang kecil dan area basah permanen yang kecil di seluruh wilayahnya.¹⁴³ Namun, terlepas dari kondisi sumber daya alam Australia serta infrastruktur dan jaringan komunikasi nya, negara ini tergolong menjadi salah satu destinasi yang paling sering dituju oleh pengungsi menurut data UNHCR yang tersedia di *World Data* ditengah negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat dan Kanada.¹⁴⁴ Hal tersebut menandakan bahwa kehadiran pengungsi sudah tidak asing lagi bagi Pemerintah maupun Masyarakat Australia sendiri.

¹³⁹ Leith Huffadine, "Maps Show Just How Empty Australia Really Is! How the Population Clings to the Coast and Jams Into Tiny Urban Clusters," *Daily Mail UK*, 16 November, 2015, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3320021/Maps-just-Australia-really-population-clings-coast-jams-tiny-urban-clusters.html>

¹⁴⁰ "Geografi Australia: Number of People," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, Diakses 9 Februari, 2018, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab08/untuk.html>

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Jared Richards, "Australia's 10 Deserts," Australian Geographic, Diakses 9 Februari, 2018, <http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2016/04/australias-10-deserts>

¹⁴³ "Our Natural Environment," Australian Government, Diakses 9 Februari, 2018, <https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-natural-environment>

¹⁴⁴ "Refugee Countries and Asylum Data," World Data, diakses 11 Desember, 2017, <https://www.worlddata.info/refugees-by-country.php>

Setelah dipaparkan singkat terkait gambaran negara Australia, saat ini penulis akan menjelaskan terkait sejarah Australia dalam menerima pengungsi. Menjadi negara yang tergolong awal dalam menandatangani 1951 *Refugee Convention*¹⁴⁵, tidak membuat sejarah Australia dalam menghadapi arus pengungsi berjalan lurus tanpa hambatan. Sejarah nya dalam menerima pengungsi banyak melewati fase berliku. Salah satunya, ditandai dari adanya kebijakan ras yang ekstrim yang dampaknya terlihat terhadap gelombang pengungsi yang masuk.

Australia telah menerima pengungsi kurang lebih 170 tahun dan penerimaan pengungsi paling awal yang tercatat adalah kelompok Nasrani. Kelompok tersebut mulai bermukim di Australia Selatan tahun 1839 untuk menghindari pembatasan hak mereka untuk beribadah di Negara Bagian Prussia.¹⁴⁶ Sejak penerimaan kelompok terskait, gelombang pengungsi di abad sembilan belas sebagian besar terdiri dari masyarakat Hungaria, Italia dan Polandia yang meninggalkan negara nya karena adanya penganiayaan agama dan politik.¹⁴⁷

Dapat dilihat dari awal penerimaan pengungsi di Australia, sebagian besar diantaranya berasal dari Benua Eropa. Lalu setelah Federasi, Australia terus menerima gelombang pengungsi untuk bermukim di negara nya selama diantara mereka datang sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *Immigration*

¹⁴⁵ “States Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and the 1967 Protocol,” UNHCR, diakses 6 Februari, 2018, <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>

¹⁴⁶ “History of Australia’s Refugee Program,” Refugee Council of Australia, diakses 6 Februari, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/>

¹⁴⁷ *Ibid.*

(*Restrictions*) Act 1901, landasan dari *White Australian Policy*.¹⁴⁸ *White Australian Policy* sendiri mengatur bahwa hanya masyarakat Eropa, terutama Eropa Utara yang diizinkan untuk pindah dan datang ke Australia.¹⁴⁹

Tiga puluh tahun selanjutnya, asal pengungsi yang datang benar-benar sesuai dengan apa yang disyaratkan yaitu mereka yang berasal dari Rusia, Yunani, Bulgaria, Armenia, Assyrian, dan pengungsi Yahudi.¹⁵⁰ Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada masa-masa Perang Dunia Satu, Australia menjadi negara yang sangat menginginkan adanya gelombang pengungsi karena ekonominya sedang naik dan membutuhkan sekelompok individu untuk dijadikan tenaga kerja.¹⁵¹ Keinginan tersebut diwujudkan dengan eksistensi baru Australia di sebuah Organisasi Pengungsi Internasional yang meminta organisasi terkait agar masyarakat yang tergolong ke dalam *displaced people* di Eropa untuk dimukimkan di Australia.¹⁵²

Disini, Australia terlihat lebih hidup dan responsif dalam menghadapi masalah pengungsi. Namun, terlihat belum adanya kelompok ras baru yang mengisi gelombang pengungsi yang datang. Hal tersebut ditandai dengan permintaan Australia yang hanya ditunjukkan kepada negara-negara di Eropa. Tujuh tahun selanjutnya, permintaan Australia tersebut diwujudkan dimana negara tersebut pada akhirnya menerima lebih dari 170,000 pengungsi yang

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ "White Australian Policy," Multicultural Australia, diakses 11 Februari, 2018, <http://www.multiculturalaustralia.edu.au/hotwords/unpack/White.Australia.Policy>

¹⁵⁰ History of Australia's Refugee Program, Loc.Cit

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

sebagian besar berasal dari Polandia, Yugoslavia, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraina, Czechoslovakia dan Hungaria.¹⁵³

Hingga sebelum awal tahun 1970, gelombang pengungsi yang datang ke Australia masih didominasi oleh masyarakat Eropa seperti mereka yang berasal dari Kawasan Eropa Timur yang pergi karena adanya penganiayaan di negara-negara blok Soviet.¹⁵⁴ Tahun 1970, pengungsi yang masuk ke Australia mulai bervariasi. Berangkat dari masuknya 198 masyarakat Asia tahun 1972, 2500 warga Timur-Timur pada tahun 1975 dan puncaknya adalah ketika turunnya Pemerintahan Vietnam Selatan di Saigon tahun 1975 yang mendorong dilakukannya pemikiran ulang dan re-organisasi program pengungsi Australia.¹⁵⁵

Sejak penerbangan masal pengungsi Vietnam tersebut dan Australia mendukung respon internasional mengenai isu Vietnam, di akhir tahun 1975, pengungsi pertama Vietnam sebanyak empat ratus orang telah dipilih oleh Australia untuk bermukim di negara nya.¹⁵⁶ Dan dalam waktu dua puluh tahun kemudian, Australia terus menampung lebih dari 100,000 pengungsi Vietnam.¹⁵⁷ Masuknya gelombang pengungsi yang banyak dari Vietnam tersebut bertepatan dengan benar-benar diimplementasikan nya penghapusan White Australian Policy tahun 1975.¹⁵⁸

Sebenarnya di tahun 1873, Pemerintahan Buruh Whitlam telah menetapkan tiga langkah lebih lanjut dalam proses bertahap untuk menghapus

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ "Fact Sheet- Abolition of the 'White Australia' Policy," Australian Government: Department of Home Affairs, diakses 11 Februari, 2018, <https://www.homeaffairs.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/08abolition>

faktor ras yang ekstrim tersebut dalam kebijakan imigrasi Australia.¹⁵⁹ Namun, pada Pemerintahan Whitlam dampak dari proses bertahap penghapusan masih sangat kecil hingga berganti nya kursi Pemerintahan yaitu Pemerintahan Fraser tahun 1975 yang dirasa perubahan nya sudah mulai ada seperti jumlah pengungsi maupun migran yang datang dari negara Non-Eropa meningkat.¹⁶⁰

Dari paragraf-paragraf sebelumnya, dapat dilihat bahwa dibutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan perubahan dari penerimaan pengungsi yang sebelumnya hanya sebagian besar masih masyarakat kulit putih dan dari Benua Eropa di sekitar tahun 1901 hingga penghapusan kebijakan tersebut pada tahun 1975. Terlebih lagi, menurut informasi dari halaman website Australian Government, proses penghapusan dari kebijakan *White Australian Policy* itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun.¹⁶¹

Dan sebenarnya, asal usul dari *White Australia Policy* tersebut dapat dilacak sejak tahun 1850-an.¹⁶² Pada saat itu, terdapat peristiwa kekerasan antara penambang kulit putih terhadap beberapa penggali China di Sungai Buckland, Victoria. Oleh karena nya sejak saat itu, mulai dikenalkan nya pembatasan imigrasi masyarakat China.¹⁶³ Tulisan James Jupp pada tahun 2007 juga dapat meringkas proses imigrasi ke Australia dimana singkatnya, Australia mempunyai sejarah hampir sama dengan Amerika dan Kanada.

Perbedaan nya ialah, mayoritas dari proses imigrasi ke Australia adalah produk dari rekayasa sosial yang bersifat disengaja untuk menciptakan jenis

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*,

¹⁶³ *Ibid.*

masyarakat tertentu didalamnya, berbeda dengan Amerika Serikat dan Kanada dimana peran negara nampak kurang dominan dan kurang jelas.¹⁶⁴ Sejarah Australia dalam menerima pengungsi dapat dikatakan berliku dan banyak melalui beberapa proses yang sulit. Saat ini, pengungsi di Australia dibedakan menjadi golongan *Onshore Protection*, *Offshore Resettlement* serta pengungsi maupun pencari suaka jalur laut seperti yang sudah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya.

Masyarakat dan pemerintah Australia dalam memandang serta merespon tiga gelombang yang salah satunya dibedakan dari cara mereka sampai ke Australia pun berbeda. Begitu juga dengan perbedaan yang ditemukan dalam memandang asal negara dari pengungsi maupun pencari suaka. Di tahun 2012 menurut Survey Nasional yang hasilnya dipublikasi oleh media *The Age* Australia, setengah dari masyarakat Australia mengatakan bahwa mereka merasa kurang simpatik terhadap pengungsi yang datang menggunakan jalur laut dibandingkan dengan mereka yang datang melalui jalur udara atau kamp pengungsi di luar Australia.¹⁶⁵

Hal tersebut sejalan dengan respon yang dijalankan Pemerintah Australia terhadap pengungsi yang datang dari jalur laut. Menurut Pemerintah Australia, isu pengungsi yang datang menggunakan perahu tergolong sangat berbahaya dan

¹⁶⁴ James Jupp, "From white Australian to Woonera: The story of Australian Immigration," *Cambridge University Press* (2007), https://books.google.co.id/books/about/From_White_Australia_to_Woomera.html?id=A9XR6eKT54AC&redir_esc=y

¹⁶⁵ Michael Gordon, "Refugees are 'boat people' to most, UN Survey Finds," *The Age*, 18 Juni, 2012, <http://www.theage.com.au/federal-politics/political-news/refugees-are-boat-people-to-most-un-survey-finds-20120617-20ide.html>

akhirnya menempatkan militer untuk respon pertama¹⁶⁶ walaupun terdapat kerjasama juga dengan Kementerian Imigrasi Australia. Selain itu, perbedaan yang ditemukan dalam memandang asal negara dari pengungsi maupun pencari suaka dapat ditemukan dalam survey oleh asosiasi dengan Monash University dan the Australian Multicultural Foundation tahun 2013¹⁶⁷

Survey tersebut dilakukan kepada kurang lebih 1200 orang dan salah satu dari hasilnya ditemukan bahwa tingkat perasaan negatif tertinggi, sekitar mendekati 25 persen adalah terhadap imigran yang berasal dari Timur Tengah.¹⁶⁸ Sedangkan selanjutnya, penulis akan memaparkan mengenai jenis pengungsi di Australia sendiri. Dalam program kemanusiaan nya yang berhubungan dengan pengungsi, Australia membagi program tersebut menjadi dua fungsi penting.

- *Onshore Protection*: *Onshore Protection* menjadi fungsi untuk memenuhi kewajiban internasional Australia. Caranya adalah dengan menawarkan perlindungan untuk individu yang telah berada di Australia dan memiliki visa yang sah serta sudah diketahui sebagai pengungsi menurut *United Nations Convention* terkait status dari pengungsi tersebut.¹⁶⁹
- *Offshore Resettlement*: Fungsi kedua ini mengekspresikan komitmen Australia terhadap perlindungan pengungsi dengan melampaui

¹⁶⁶ Helen Davidson, "Offshore Detention: Australia's Recent Immigration History a 'Human Rights Catastrophe's," *The Guardian*, 13 November, 2016,

¹⁶⁷ John Masanuskas, "Australians growing more negative about asylum seekers and high immigration, study finds," *Herald Sun*, 20 Oktober, 2013, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights>
<http://www.heraldsun.com.au/news/australians-growing-more-negative-about-asylum-seekers-and-high-immigration-survey-finds/news-story/e41c31026a2059327fe83833324a3123>

¹⁶⁸ *Ibid.*,

¹⁶⁹ "Fact Sheet – Australia's Refugee and Humanitarian Programme," Australian Government: Department of Home Affairs, diakses 10 Februari, 2018, <https://www.homeaffairs.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/60refugee>

kewajiban nya dan menawarkan pemukiman atau *resettlement* kepada individu di luar Australia teruntuk mereka yang berpikir bahwa pilihan ini merupakan pilihan yang tepat.¹⁷⁰

Setelah dijelaskan mengenai program kemanusiaan resmi Australia, jenis pengungsi terakhir merupakan pengungsi yang datang melalui perahu atau jalur laut. Pengungsi yang datang melalui perahu tersebut ditransfer ke Nauru pada 1 September 2012 dan ke Papua New Guinea (PNG) tanggal 21 November 2012 untuk diproses status nya sebagai pengungsi.¹⁷¹ Pengungsi maupun pencari suaka yang melalui jalur laut tersebut ditangani oleh militer di tahun 2013 yang dikenal dengan *Operation Sovereign Borders* (OSB).

Dibawah kebijakan tersebut, kapal militer Australia melakukan patroli di perairan Australia dan mencegah perahu para migran, menarik mereka kembali ke Indonesia atau mengirim mereka ke sekoci nya.¹⁷² Kapal militer tersebut dikerahkan untuk respon pertama bagi pengungsi dan pencari suaka yang datang melalui jalur laut.¹⁷³ Selanjutnya, disini penulis akan menyajikan informasi terkait keadaan dari salah satu Pusat Penahanan Pengungsi milik Australia itu sendiri yang diperuntukkan untuk pengungsi dan pencari suaka jalur laut, yaitu Pusat Penahanan yang berada di Nauru.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ "Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," Parliament of Australia, diakses 10 Februari, 2017, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore

¹⁷² "Australia Asylum : Why is it Conversial?," *BBC*, 31 Oktober, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608>

¹⁷³ The Liberal-Nation Coalition, "The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy," (2013), <http://lpaweb-static.s3.amazonaws.com/Policies/OperationSovereignBorders_Policy.pdf>

Pusat Penahanan Pengungsi milik Australia di Nauru menjadi salah satu lokasi *Offshore Processing* Australia untuk memproses status pencari suaka yang kedatangan nya melalui jalur laut ke Australia.¹⁷⁴ Pulau Nauru berada sejauh tiga ribu kilometer dari daratan Australia.¹⁷⁵ Selain Nauru, lokasi OPC Australia juga terdapat di Pulau Manus yang terletak tiga ratus kilometer sebelah utara Pulau Utara Papua Nugini.¹⁷⁶ Berikut, merupakan peta dari masing-masing lokasi OPC milik Australia dan jarak nya dari daratan Australia, dengan sumber dari Refugee Action.



Gambar 2 : Lokasi OPC Nauru dan PNG dan jaraknya dari Australia¹⁷⁷

Australia telah mengirim pencari suaka jalur laut ke Nauru atau Manus sejak 2001 hingga 2008 dan memulai kembali di tahun 2012.¹⁷⁸ Ketika status pencari suaka jalur laut sedang diproses, pencari suaka di kedua lokasi tersebut

¹⁷⁴ The Guardian, "The Nauru Files: A Short History of Nauru Australia's Dumping Ground for Refugees," *The Guardian*, 9 Agustus, 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/a-short-history-of-nauru-australias-dumping-ground-for-refugees>

¹⁷⁵ "Manus and Nauru," Refugee Action, diakses 13 Maret, 2018, http://www.refugeeaction.org.au/?page_id=4528

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ "Offshore Processing," Refugee Council of Australia, diakses 13 Maret, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing/>

tinggal atau ditahan di Nauru dan Manus untuk menunggu status sebagai pengungsi nya muncul.¹⁷⁹ Berhubungan dengan hal ini, sejak 19 Juli 2013, terdapat perubahan signifikan terhadap kebijakan Australia yang dimana jika pencari suaka dari kedua lokasi tersebut ditemukan sebagai pengungsi, mereka tetap tidak akan dapat tinggal di Australia.¹⁸⁰

Kondisi pengungsi, pencari suaka maupun fasilitas yang ada di pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru juga masih cukup jauh dari kata ‘pantas dan aman’ bagi individu yang ditahan dan tinggal di lokasi tersebut. Bersamaan dengan kondisi individu dan fasilitas di Pulau Manus, sejak tahun 2001, kedua *offshore processing* tersebut menjadi subjek kutukan internasional, dikatakan sebagai rezim tertutup serta dikenai ratusan kasus pengadilan di Australia dan luar negeri.¹⁸¹

Selanjutnya adalah penjelasan terkait statistik gelombang pengungsi yang menuju ke Australia dan dibatasi menjadi dua tahun sebelum tahun 2014 untuk membandingkan jumlah gelombang yang datang agar dapat membuat komparasi yang berguna di bab lima analisis penelitian penulis ini. Pertama, akan dipaparkan statistik campuran dari jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Nauru *Offshore Processing Center* dan di Papua New Guinea *Processing Centre*. Berikut, merupakan tabel yang penulis dapat dari web resmi *Parliament of Australia*. Tabel berikut ini akan menyajikan data mulai dari tahun 2012 hingga 2014.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Helen Davidson, “Offshore Detention: Australia’s Recent Immigration History a ‘Human Rights Catastrophe,’” *The Guardian*, 13 November, 2016, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights>

Month	Numbers at PNG Processing Centre	Numbers at Nauru Processing Centre	TOTAL at Processing Centres
27 Sept 2012	0	150	150
Oct 2012	0	377	377
29 Nov 2012	19	386	405
30 Dec 2012	155	366	521
Jan 2013	235	415	650
Feb 2013	274	412	686
Mar 2013	254	424	678
Apr 2013	294	420	714
May 2013	302	428	730
Jun 2013	253	490	743
Jul 2013	27	544	571
Aug 2013	538	486	1024#
Sep 2013	858	769	1627
Oct 2013	1137	591	1728
Nov 2013	1139	686	1825
Dec 2013	1229	838	2067
Jan 2014	1353	1012	2365
Feb 2014	1325	1107	2432
Mar 2014	1225	1170	2395
Apr 2014	1273	1177	2450
May 2014	1225	1170	2395
Jun 2014	1189	1169	2358
Jul 2014	1127	1146	2273
Aug 2014	1084	1233	2317

Gambar 3: Jumlah individu di Nauru dan Papua New Guinea Offshore Processing Centre Tahun 2012-2014¹⁸²

Statistik pada tahun 2012 yang diunduh oleh web *Parliament of Australia* terbatas dengan hanya dimulai dari bulan September 2012. Statistik tahun 2012 melihat bahwa gelombang pengungsi yang berada di kedua OPC milik Australia belum cukup besar walaupun individu yang ditampung di Nauru terlihat lebih banyak dibandingkan yang ada di Negara PNG. Sedangkan pada tahun

¹⁸² "Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," *Parliament of Australia*, diakses 11 Februari, 2018, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore#_Total_number_of

2013, jumlah pengungsi maupun pencari suaka di kedua OPC terlihat mengalami kenaikan cukup signifikan walaupun jumlah kenaikan tetap lebih besar di lokasi penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di Nauru.

Tahun 2014 merupakan tahun dimana kenaikan jumlah pengungsi dan pencari suaka mengalami kenaikan sangat signifikan. Kenaikan tersebut terutama dirasakan di OPC milik Australia di Nauru karena satu bulan sebelum Januari 2014, jumlah pengungsi dan pencari suaka di Nauru hanya sebanyak 838 orang.¹⁸³ Jumlah total individu yang ditampung dari dua tempat tersebut juga terlihat sangat mengalami penambahan dimana pada Desember 2013 angka total hanya mencapai 2067 sedangkan satu bulan selanjutnya mencapai 2365 individu.¹⁸⁴ Dapat dilihat dari angka yang disediakan, terdapat peningkatan sebanyak 298 orang.

4.2 Australia Dan Refugee Settlement Arrangement (RSA) Dengan Kamboja

Pada sub bab kali ini, penulis akan menjelaskan studi kasus penelitian ini yaitu terkait RSA yang dilaksanakan antara Australia dan Kamboja tahun 2014. Sub bab ini akan menjelaskan terkait deskripsi dari RSA itu sendiri, respon berbagai pihak mengenai RSA, kaitan RSA dengan perjanjian pengungsi serta gambaran negara Kamboja dan tindakan nya terhadap pengungsi.

4.2.1. Deskripsi Refugee Settlement Arrangement (RSA)

Dokumen resmi Refugee Settlement Arrangement adalah dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) atau nota kesepahaman.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*,

¹⁸⁵ "Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia Relating To The Settlement of Refugees in Cambodia," Australian

Berdasarkan informasi dari laporan yang dipublikasi oleh pihak the Parliament of Australia, kesepakatan RSA merupakan sebuah *third country resettlement arrangement*¹⁸⁶, yang dimana jika dikaitkan dengan informasi dan pernyataan tersebut, Kamboja bukan merupakan sebuah tempat detensi milik Australia, seperti apa yang diinfokan dalam sebuah peta fasilitas detensi Australia yang telah penulis sertakan di latar belakang masalah.¹⁸⁷

Sebelum ditandatangani secara resmi di Phnom Penh oleh Australia dan Kamboja, proses nya menjalani waktu yang cukup panjang. Kedatangan Julie Bishop pada 22 Februari 2014 dapat dikatakan menjadi awal mula dari *arrangement* terkait.¹⁸⁸ Kedatangan tersebut juga merangkap adanya penawaran yang dilakukan oleh Bishop selaku Menteri Luar Negeri Australia kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.¹⁸⁹ Pada kesempatan tersebut, Julie Bishop menawarkan jika Kamboja dapat menerima beberapa pengungsi dari Australia.¹⁹⁰

Butuh waktu sekitar kurang lebih tujuh bulan sampai pada akhirnya RSA ditandatangani oleh Australia dan Kamboja. Dalam waktu

Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 12 Februari, 2018, <https://dfat.gov.au/international-relations/themes/people-smuggling-trafficking/Documents/cambodia-australia-mou-and-operational-guidelines.pdf>

¹⁸⁶ "Chapter 4," Parliament of Australia, diakses 2 Juni, 2018, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/NauruandManusRPCs/Report/c04

¹⁸⁷ Coddington, Kate dan Alison Mountz. "Countering Isolation With the Use of Technology: How Asylum-Seeking Detainees on Islands in the Indian Ocean Use Social Media to Transcend Their Confinement," *Journal of the Indian Ocean Region* 10 (1) (2014): 97-112, doi: 10.1080/19480881.2014.896104

¹⁸⁸ "Australia Asks Cambodia to House Asylum Seekers Detained in Transit," *The Guardian*, 23 Februari, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/australia-asks-cambodia-take-asylum-seekers>

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

tujuh bulan tersebut, negosiasi dikatakan berlangsung secara rahasia.¹⁹¹ Dari nota kesepahaman yang diterbitkan, penulis mengambil beberapa poin penting yang sekiranya dapat membantu pembaca memahami isi dari MoU ini. Poin-poin tersebut adalah Kamboja akan menawarkan pemukiman permanen bagi individu yang telah menjalani proses penentuan sebagai pengungsi di OPC milik Australia di Nauru dan sudah ditentukan bahwa individu terkait merupakan pengungsi dan memenuhi persyaratan masuk dan cara bermukim di Kamboja.¹⁹²

RSA bersifat *voluntary* atau sukarela,¹⁹³ dimana individu yang pergi ke Kamboja secara sukarela akan menulis pernyataan nya di persetujuan tertulis.¹⁹⁴ Mengenai jumlah pengungsi yang akan pindah dan tinggal di Kamboja serta pemilihan waktu kedatangan mereka, dibawah MoU ini akan disesuaikan dengan Kamboja.¹⁹⁵ Dan tentang hal finansial, Australia akan menanggung biaya transportasi pengungsi ke Kamboja termasuk biaya pendaratan, parkir, *ground handling*, dan servis penting lainnya.¹⁹⁶ Kamboja sendiri yang nantinya akan memfasilitasi proses kedatangan nya.¹⁹⁷

¹⁹¹ Daniel Pye, "Cambodia and Australia Sign Refugee Deal," *Aljazeera*, 26 September, 2014, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/cambodia-australia-sign-refugee-deal-nauru-suicide-teen-2014926124117550180.html>

¹⁹² "Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia Relating to The Settlement of Refugees in Cambodia," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 12 Februari, 2018, <https://dfat.gov.au/international-relations/themes/people-smuggling->

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

Mengenai layanan dan perawatan, pengungsi akan menerima layanan setaraf atau sepadan dengan standar komunitas lokal, sesuai dengan apa yang ditulis pada nota kesepahaman.¹⁹⁸ Terkait biaya yang dikeluarkan Australia, sebanyak AUD40 juta diberikan kepada Kamboja untuk kontrak empat tahun¹⁹⁹ dan \$15 juta untuk *International Organisation for Migration* (IOM)²⁰⁰ dengan tujuan agar IOM dapat menangani pengungsi ketika sampai di Kamboja. Berikut, foto penandatanganan dengan gambar empat berasal dari The Guardian dan gambar lima dari BBC.



Gambar 4: Proses penandatanganan RSA antara Australia dan Kamboja²⁰¹



Gambar 5: Kedua tokoh saling berjabat tangan²⁰²

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ "Australia and Cambodia Sign Refugee Resettlement Deal," *BBC*, 26 September, 2014, <http://www.bbc.com/news/world-asia-29373198>

²⁰⁰ Lindsay Murdoch, "Remaining Two Refugees in Cambodia Rue Leaving Nauru," *The Sydney Morning Herald*, 13 Maret, 2016, <http://www.smh.com.au/world/remaining-two-refugees-in-cambodia-rue-leaving-nauru-20160311-gnh7mo.html>

²⁰¹ Lauren Crothers dan Ben Doherty, "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia," *The Guardian*, 26 September, 2014,

<https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

²⁰² "Australia and Cambodia Sign Refugee Resettlement Deal," *BBC*, 26 September, 2014, <http://www.bbc.com/news/world-asia-29373198>

Lalu, sedikit menarik ke hari-hari hingga bulan sebelum RSA ditandatangani, disini penulis akan memaparkan secara singkat mengenai tanggapan dari beberapa pihak mengenai rencana pendatangannya RSA itu sendiri sebelum pada akhirnya kesepakatan tersebut ditandatangani pada 26 September 2014. Profesor Suvendrini Perera, pihak dari Curtin University Asia Pacific Institute, mengatakan telah menjalin kontak regular dengan pengungsi di Nauru OPC.

Salah satu kontak regular dilakukan tepat setelah Scott Morrison mengirim pesan melalui video kepada para pengungsi di Nauru satu hari sebelum penandatanganan dilakukan. Hasilnya, terdapat tujuh percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa pengungsi dan protes yang muncul di Nauru pada hari Kamis malam tersebut.²⁰³ Pesan yang disampaikan oleh Morrison sendiri berisi peringatan kepada para pengungsi di Nauru.

Bahwa mereka tidak akan bisa pindah ke Australia, dan tetap akan tinggal di Nauru sampai mereka memilih untuk kembali ke negara asal atau bermukim di negara lain selain Australia. Berikut kalimat dari Morrison, *"If you are currently on ... Nauru, you will not be transferred to Australia," Morrison said. "You will remain there until you either*

²⁰³ Daniel Pye, "Cambodia and Australia Sign Refugee Deal," *Aljazeera*, 26 September, 2014, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/cambodia-australia-sign-refugee-deal-nauru-suicide-teen-2014926124117550180.html>

choose to return [home] or are resettled somewhere else other than Australia.”²⁰⁴

Lalu, paragraf selanjutnya akan dibahas terkait tanggapan dari organisasi-organisasi internasional yang muncul sebelum penandatanganan RSA dilakukan. Tanggapan organisasi internasional akan dimulai dari pihak UNHCR dan Amnesty sebagai organisasi yang mempunyai hubungan erat dengan pengungsi. Tertulis di halaman web resmi nya pada 26 September 2014, UNHCR sangat prihatin terhadap kesepakatan yang mengatur akan direlokasikan nya pengungsi di Nauru ke Kamboja.²⁰⁵ Antonio Guterres selaku *UN High Commissioner for Refugees* mengatakan,

*“This is a worrying departure from international norms. We are seeing record forced displacement globally, with 87 per cent of refugees now being hosted in developing countries. It’s crucial that countries do not shift their refugee responsibilities elsewhere,” said UN High Commissioner for Refugees António Guterres.*²⁰⁶

“International responsibility sharing is the basis on which the whole global refugee system works. I hope that the Australian government will reconsider its approach.”²⁰⁷

*“Refugees are persons who are fleeing persecution or the life-threatening effects of armed conflict. They are entitled to better treatment than being shipped from one country to the next,” Guterres added.*²⁰⁸

²⁰⁴ Lauren Crothers dan Ben Doherty, “Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia,” *The Guardian*, 26 September, 2014,

<https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

²⁰⁵ UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation,” UNHCR, diakses 15 Februari, 2018, <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

Guterres beranggapan bahwa kesepakatan RSA merupakan bentuk dari keberangkatan yang mengkhawatirkan dari norma internasional dan adalah penting bagi negara-negara untuk tidak memindahkan tanggung jawab mengenai pengungsi nya di tempat lain. Komisioner tinggi PBB tersebut juga berharap Pemerintah Australia mempertimbangkan kembali pendekatan tersebut.

Pada akhir pendapat nya, Guterres menambahkan terkait pembahasan pengungsi itu sendiri, bahwasanya pengungsi ialah orang-orang yang pergi atau melarikan diri dari adanya penganiayaan atau konflik bersenjata yang dapat mengancam nyawa nya. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan perawatan yang lebih baik dibandingkan dikirim dari satu negara ke negara lain.

Dapat dilihat dari komentar dan respon UNHCR yang tertulis di halaman web resmi nya, kesepakatan RSA semakin menjadi kesepakatan yang penuh kontroversi terutama ketika UNHCR sendiri sebagai organisasi yang menangani pengungsi sudah berbicara dan merasa sangat prihatin dengan sikap Australia tersebut. Terlebih lagi, menurut Vivian Tan selaku petugas pres UNHCR, mengklarifikasi bahwa UNHCR sendiri tidak terlibat dan tidak mempunyai peran dalam perjanjian bilateral tersebut.²⁰⁹

Sedangkan Amnesty juga beranggapan tidak jauh beda dari UNHCR. Tanggapan dari Amnesty muncul pada bulan Mei 2014 dan bulan September 2014 tanggal 25. Tanggapan Amnesty di bulan Mei

²⁰⁹ Lauren Crothers dan Ben Doherty, Loc.Cit

2014 mengatakan bahwa kesepakatan antar dua negara tersebut yang akan mengirim pengungsi dan pencari suaka ke salah satu negara di Asia Tenggara harus dihapus dan Australia seharusnya mengakhiri aktivitas yang ada di *Offshore Processing* nya dan tidak memindahkan tanggung jawab pengungsi nya ke negara lain yang benar-benar lebih miskin.²¹⁰

Serta Kamboja seharusnya menyadari resiko serius seputar kesepakatan ini dan harus benar-benar mempertimbangkan apakah Kamboja siap untuk berpartisipasi.²¹¹ Karena negara ini hanya memiliki kapasitas terbatas untuk memproses klaim pencari suaka dan masih berjuang untuk menghormati dan melindungi hak-hak warganya sendiri.²¹² Sedangkan tanggapan Amnesty pada 25 September 2014 atau di satu hari sebelum penandatanganan dilakukan,²¹³ mengatakan bahwa keputusan Australia untuk mengirim beberapa pengungsi ke Kamboja dari Nauru merupakan sebuah bentuk perlakuan yang tercela dan kejam karena hak asasi manusia yang dimiliki oleh Kamboja tidak bisa dipertanggung jawabkan.²¹⁴

Rupert Abbott yang mempunyai kedudukan sebagai Wakil Direktur Asia Pasifik di *Amnesty International* berkata bahwa perjanjian ini seperti menaruh kepentingan politik jangka pendek dari Pemerintah Australia lebih dulu dibandingkan dengan mengusahakan untuk

²¹⁰ "Australia and Cambodia Should Scrap Asylum Seeker Deal," Amnesty, Diakses 31 Maret, 2018, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/australia-cambodia-scrap-asylum-seeker-deal/>

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ "Cambodia: New Deal with Australia Signs Away Refugee Rights," *Amnesty*, diakses 15 Februari, 2018, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/cambodia-new-deal-australia-signs-away-refugee-rights/>

²¹⁴ *Ibid.*

melindungi beberapa orang paling rentan di dunia yaitu pengungsi.²¹⁵

Dan hal ini membuat Kamboja terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Australia. Berikut rincian dari apa yang dikatakan oleh Abbott terkait pelanggaran HAM oleh Australia, *"It makes Cambodia complicit in Australia's human rights breaches and seriously flawed offshore processing system."*²¹⁶

Selain itu, pihak Amnesty juga menghubungkan terkait transparansi yang kurang dalam proses RSA dibuat, yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam diskusi atau setidaknya mengajukan keberatan atas dasar standar hak asasi manusia internasional²¹⁷. Disini, *Amnesty International* menjadi salah satu dari kelompok hak-hak internasional lainnya yang mempertanyakan kecocokan Kamboja sebagai negara tuan rumah bagi pengungsi yang direlokasi oleh Australia.²¹⁸

Amnesty International mempertanyakan kesesuaian Kamboja tersebut karena situasi hak asasi manusia di Kamboja bermasalah dan telah terjadi penurunan yang signifikan mengenai penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.²¹⁹ Penurunan tersebut ditandai dengan tindakan keras oleh aparat keamanan untuk memukul pekerja dan

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*,

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*,

aktivis di bulan Januari 2014 sementara penggusuran paksa, perselisihan dan perebutan tanah juga memberikan dampak kepada ribuan orang.²²⁰

Di akhir pernyataan nya, Amnesty mengatakan bahwa respon Australia juga terlihat membingungkan.²²¹ Ditandai dengan adanya kutukan Australia untuk catatan hak asasi manusia (HAM) Kamboja pada *UN Human Rights Hearing* bulan Januari 2014.²²² Namun di Februari 2014 Menteri Luar Negeri Australia melakukan kunjungan mengejutkan dengan pergi ke Kamboja untuk membuka obrolan terkait kesepakatan RSA yang penandatanganan nya dilakukan tujuh bulan kemudian di Kamboja.²²³

Diliput juga oleh CNN, Pemerintah Australia memang pada kesempatan *UN Human Rights Hearing* tersebut telah mengkritik catatan Hak Asasi Manusia Kamboja.²²⁴ Kritik tersebut berisi bahwa Kamboja perlu berhenti dalam membunuh pemrotes jalanan, menindas oposisi politik dan menahan orang tanpa pengadilan terlebih dahulu.²²⁵ Catatan HAM di Kamboja sendiri memburuk sejak pemilihan majelis nasional pada 28 Juli 2013 menurut *Human Rights Watch (HRW)*²²⁶

²²⁰ *Ibid.*,

²²¹ *Ibid.*,

²²² *Ibid.*,

²²³ Lauren Crothers dan Ben Doherty, "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia," *The Guardian*, 26 September, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

²²⁴ Tim Hume, "Australian Deal to Settle Refugees in Cambodia Slammed as 'New Low,'" *CNN*, 26 September, 2014, <http://edition.cnn.com/2014/09/26/world/asia/australia-cambodia-refugee-deal/>

²²⁵ *Ibid.*,

²²⁶ "World Report 2014: Cambodia," Human Rights Watch, diakses 15 Desember, 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/cambodia>

Padahal, terdapat hubungan erat mengenai HAM di sebuah negara dan penerimaan nya terhadap pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi setidaknya mendapatkan hak dan bantuan dasar yang sama seperti orang asing lainnya yang merupakan penduduk resmi, termasuk kebebasan berpikir, bergerak, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.²²⁷

Selain Amnesty dan UNHCR, sebuah kelompok HAM internasional memberikan komentar pada 3 Juni 2014 yang berisi bahwa Kamboja tidak dapat dipercaya dalam menegakkan atau menjunjung tinggi hak pengungsi untuk bermukim di negara nya dibawah kesepakatan bilateral dengan Australia yang mengandung kontroversi tersebut.²²⁸ *Human Rights Watch* yang berbasis di AS turut mempertanyakan kemampuan Kamboja secara aman memukimkan pencari suaka dan pengungsi yang ada di OPC Nauru.²²⁹ Walaupun Pemerintah Kamboja sendiri telah memberikan pernyataan jaminan bahwa Kamboja hanya akan menerima pengungsi yang secara sukarela datang ke negara nya.²³⁰

Kemudian, Eang Vuthy selaku Direktur Eksekutif dari *Equitable Cambodia* turut memberikan komentar seperti dibawah ini,

"We call upon the Australian Government to uphold its international obligation and respects the rights of refugees. We also call upon the two countries to consider this deal and ensure

²²⁷ "Protecting Refugees: Questions and Answers," UNHCR, diakses 17 Oktober, 2017, <http://www.unhcr.org/afr/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html>

²²⁸ Samean Yun, "Rights Groups Cites 'Major Concerns' in Cambodia-Australia Refugee Deal," *Radio Free Asia*, 4 Juni, 2018, <https://www.rfa.org/english/news/cambodia/refugees-06032014171848.html>

²²⁹ *Ibid.*,

²³⁰ *Ibid.*,

*that adequate support and protection are provided these refugees.*²³¹”

Vuthy menyampaikan terkait permintaan nya kepada Pemerintah Australia untuk menegakkan kewajiban internasional nya dan untuk menghormati hak-hak pengungsi. Serta meminta kepada kedua negara yaitu Australia dan Kamboja untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan RSA tersebut dan memastikan bahwa dukungan dan perlindungan yang memadai akan diberikan kepada para pengungsi yang akan bermukim di Kamboja.

Tanggapan dari Eang Vuthy yang berasal dari *Equitable Cambodia* menjadi salah satu tanggapan yang berasal dari Kamboja. Selanjutnya terdapat tanggapan dari Elaine Pearson selaku Direktur Human Rights Watch Australia. Pada pernyataan nya bulan Mei 2014, Pearson mencela catatan HAM di Kamboja dimana kebebasan berkespresi, berkumpul serta berasosiasi sedang berada dibawah serangan regular dan korupsi juga turut merajalela.²³² Selain itu Direktur HRW Australia menambahkan bahwa hal-hal di pengadilan Kamboja ditentukan oleh suap dan pengaruh politik, bukan dengan hukum dan fakta.²³³

²³¹ “Cambodian Groups Protest Against Australian Refugee Deal.” Refugee Action Coalition Sydney, diakses 31 Maret, 2018, <http://www.refugeeaction.org.au/?p=3533>

²³² Samean Yun, Loc.Cit.

²³³ *Ibid.*,

4.2.2. Refugee Settlement Arrangement (RSA) dan Perjanjian Pengungsi

Adanya tanggapan dari beberapa pihak sebelum penandatanganan RSA dilakukan, menjadikan studi kasus ini semakin terlihat kontroversial. Kali ini, penulis akan mengaitkan RSA dan hubungan nya dengan beberapa perjanjian yang berhubungan dengan pengungsi maupun hak asasi manusia. Tujuan penulis mengaitkan kedua hal tersebut salah satunya adalah juga untuk meningkatkan urgensi maupun anomali yang ada di dalam studi kasus penelitian penulis. Pertama merupakan kaitan nya antara RSA dengan nota kesepahaman antara Australia dan Nauru terkait mekanisme transfer dan penilaian pengungsi dan pencari suaka di Republic of Nauru.

Salah satu dari nota kesepahaman tersebut, tepatnya pada sub bab *‘outcomes for persons transferred to nauru’* menyebutkan bahwa Australia akan membantu Nauru untuk memukimkan *transferees* yang telah didefinisikan membutuhkan perlindungan internasional oleh Nauru ke negara dunia ketiga yang aman. Seperti apa yang ditulis di nota kesepahaman antar dua negara tersebut,

*“The Commonwealth of Australia will assist the Republic of Nauru to settle in a third safe country all Transferees who the Republic of Nauru determines are in need of international protection, other than those who are permitted to settle in Nauru pursuant to Clause 12”*²³⁴

²³⁴ “Memorandum of Understanding Between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia Relating to the Transfer to and Assessment of Persons in Nauru, Related Issues,” Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 23 Februari, 2018, <http://dfat.gov.au/geo/nauru/pages/memorandum-of-understanding-between-the-republic-of-nauru-and-the-commonwealth-of-australia-relating-to-the-transfer-to-and.aspx>

Melihat pernyataan dalam MoU tersebut, pihak HRW mengatakan bahwa sebelumnya Australia berkomitmen untuk memukimkan pengungsi ke “*third safe country*.”²³⁵ Namun setelah Australia menandatangani perjanjian dengan Kamboja, *Human Rights Watch* merasa bahwa Australia akan gagal memenuhi persyaratan kesepakatan nya karena Kamboja bukan negara ketiga yang aman.²³⁶

Selanjutnya adalah kaitannya antara RSA dengan Konvensi Pengungsi atau yang lebih dikenal dengan 1951 *Refugee Convention*. Disini, terdapat hubungan nya antara RSA dengan poin pertama artikel 33 pada Konvensi Pengungsi mengenai larangan pengusiran atau pengembalian yang berbunyi,

*“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion”*²³⁷

Dalam poin pertama artikel 33 dapat disimpulkan bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan pengusiran atau pengembalian terhadap pengungsi ke wilayah yang hidupnya dan kebebasan nya mungkin dapat terancam terkait ras nya, agama, kebangsaan, maupun keanggotaan nya dalam sebuah kelompok sosial dan politik.

²³⁵“Australia/Cambodia: Deal Puts Refugees at Risk,” *Human Rights Watch*, diakses 23 Februari, 2018, <https://www.hrw.org/news/2014/09/25/australia/cambodia-deal-puts-refugees-risk>

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ “Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees,” UNHCR, diakses 23 Februari, 2018, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLLxFm6bbNYJ:www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf+&cd=2&hl=jv&ct=clnk&gl=id>

Disini, walaupun RSA adalah bersifat sukarela, penulis merasa bahwa pengungsi yang berangkat ke Kamboja sebenarnya tidak benar-benar mempunyai pilihan dan membuat unsur perjanjian RSA yang *voluntary* tersebut dipertanyakan. Terlebih lagi, Kamboja adalah negara yang dapat mengancam hidup dan kebebasan dari pengungsi sendiri seperti apa yang ditulis di poin pertama artikel 33 pada Konvensi Pengungsi. Dimana deksripsi lebih rinci nya terkait gambaran Kamboja sebagai negara sesaat sebelum pengungsi di Nauru datang, akan dijelaskan di sub bab dengan judul ‘Gambaran Negara Kamboja.’

Penulis mengatakan bahwa pengungsi yang berangkat ke Kamboja tidak benar-benar mempunyai pilihan karena didukung dengan pernyataan Scott Morrison terkait hal tersebut yaitu, *“If you are currently on ... Nauru, you will not be transferred to Australia,” Morrison said. “You will remain there until you either choose to return [home] or are resettled somewhere else other than Australia.”*²³⁸

Pernyataan diatas merupakan komentar Morrison sesaat sebelum RSA ditandatangani dan mempunyai sari inti bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Nauru tidak benar-benar ada pilihan karena pilihan yang ada hanya kembali ke tempat asal atau bermukim di tempat lain selain Australia. Jika mereka tidak memilih pilihan tersebut, individu tersebut akan tetap tinggal di Nauru. Gambaran umum mengenai keadaan

²³⁸ Lauren Crothers dan Ben Doherty, “Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia,” *The Guardian*, 26 September, 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>

di pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru tersebut akan dibahas di sub bab dengan judul 'Gambaran Nauru *Offshore Processing Centre*.'

Masih membahas mengenai kaitan antara RSA dan Konvensi Pengungsi, Juru bicara UNHCR turut mengatakan bahwa perjanjian Kamboja dan Australia bukan solusi yang tahan lama dan tidak sesuai dengan jiwa dari *resettlement*²³⁹. Lalu, Antonio Guterres dari UNHCR kembali menambahkan bahwa keputusan RSA merupakan tindakan keberangkatan dari norma internasional yang mengkhawatirkan.²⁴⁰

Di website resmi Australian Human Rights Commission juga memberikan informasi bahwa Australia mempunyai kewajiban untuk tidak mengembalikan orang yang menghadapi ancaman kekerasan HAM di bawah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment* (CAT) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC).²⁴¹ Serta tidak diperbolehkan untuk mengirim orang ke dunia ketiga yang mereka sendiri akan dihadapkan dengan ancaman yang serius terkait hak asasi nya. Kewajiban tersebut juga berlaku kepada mereka yang juga belum diproses menjadi pengungsi.²⁴²

²³⁹ Australia/Cambodia: Deal Puts Refugees at Risk," *Human Rights Watch*, diakses 23 Februari, 2018, <https://www.hrw.org/news/2014/09/25/australia/cambodia-deal-puts-refugees-risk>

²⁴⁰ UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation," UNHCR, diakses 15 Februari, 2018, <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>

²⁴¹ "Asylum Seekers and Refugees Guide," Australian Human Rights Commission, diakses 23 Februari 2018, <https://www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekers-and-refugees/asylum-seekers-and-refugees-guide>

²⁴² *Ibid.*

4.2.3. Gambaran Kamboja dan Tindakan nya Terhadap Pengungsi

Negara yang mempunyai puncak tertinggi di Gunung Cardamom dan secara administratif terdiri dari dua puluh provinsi tersebut terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Laos, Thailand, Vietnam dan Teluk Thailand.²⁴³ Negara ini mempunyai ukuran setengah dari negara Jerman,²⁴⁴ dan Phnom Penh merupakan ibu kota dari Kamboja dengan bahasa utama yang digunakan adalah Khmer serta agama yang paling banyak dianut adalah Buddhism.²⁴⁵ Kamboja termasuk anggota dari *Association of Southeast Asian Nations*²⁴⁶ atau yang biasa disebut dan disingkat, ASEAN bersamaan dengan sembilan negara lain.

Saat ini, Kepala Negara Kamboja adalah King Norodom Sihamoni, yang telah dilantik sebagai seorang raja pada 29 Oktober 2004.²⁴⁷ Raja di Kambodia sendiri pernah merasakan status semi-istimewa sebelum seperti saat ini yang dimana peran nya hanya sebagian besar *ceremonial*.²⁴⁸ Sedangkan Perdana Menteri Kamboja yang saat ini masih menjabat adalah Hun Sen.²⁴⁹ Perdana Menteri di Kamboja bertindak sebagai kepala pemerintahan, berbeda dengan King Sihamoni yang mempunyai simbol

²⁴³ "Geography in Cambodia," Facts and Details, diakses 15 Maret, 2018, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Cambodia/sub5_2e/entry-2928.html

²⁴⁴ *Ibid.*,

²⁴⁵ BBC Monitoring, "Cambodia Country Profile," *BBC News*, 26 Februari, 2018, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13006539>

²⁴⁶ "ASEAN Member States," ASEAN, diakses 15 Maret, 2018, <http://asean.org/asean/asean-member-states/>

²⁴⁷ BBC Monitoring, Loc. Cit.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

sebagai persatuan nasional karena Pemerintahan Kamboja tergolong monarki konstitusional.²⁵⁰

Perdana Menteri Hun Sen tergolong ke dalam salah satu perdana menteri yang menduduki kursi pemerintahan di Kamboja terlama dan telah berkuasa dalam berbagai koalisi sejak tahun 1985.²⁵¹ Bahkan menurut informasi yang penulis dapat dari Website *Human Rights Watch*, Hun Sen saat ini merupakan pemimpin politik terlama ke-enam di dunia. Posisi Hun Sen berada di belakang Robert Mugabe dan Yoweri Museveni dari Zimbabwe dan Uganda.²⁵² Di halaman website *Human Rights Watch* (HRW) pada bulan Januari 2015, dikatakan bahwa tanggal 14 Januari 2015 merupakan hari dimana Hun Sen telah menduduki kursi Perdana Menteri Kamboja selama 30 tahun sejak 14 Januari 1985.²⁵³

Lama nya periode posisi Hun Sen tersebut tidak hanya menuai protes, namun juga muncul laporan dan publikasi di website yang mengungkapkan bahwa pada saat Pemerintahan Hun Sen menjabat, hak asasi manusia di Kamboja buruk. Padahal, terdapat hubungan erat mengenai HAM di sebuah negara dan penerimaan nya terhadap pengungsi. Menurut UNHCR, pengungsi setidaknya mendapatkan hak dan bantuan dasar yang sama seperti orang asing lainnya yang merupakan penduduk

²⁵⁰ "What Type of Government Does Cambodia Have?," World Atlas, diakses 15 Maret, 2018, <https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-cambodia-have.html>

²⁵¹ BBC Monitoring, "Cambodia Country Profile," *BBC News*, 26 Februari, 2018, <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13006539>

²⁵² "Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression," Human Rights Watch, diakses 15 Maret, 2018, <https://www.hrw.org/news/2015/01/13/cambodia-30-years-hun-sen-violence-repression>

²⁵³ *Ibid.*

remi, termasuk kebebasan berpikir, bergerak, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.²⁵⁴

Salah satu publikasi website dan laporan yang memaparkan terkait keadaan hak asasi manusia di Kamboja disaat Pemerintahan Hun Sen serta kaitan nya terhadap perjanjian RSA antar Australia-Kamboja adalah halaman website *Human Rights Watch* pada 13 Januari 2015 yang berjudul *Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression. Donor Countries Should Promote Democracy, Human Rights*²⁵⁵, laporan yang diteliti dan ditulis oleh Brad Adams selaku direktur Divisi Asia di Human Rights Watch dengan judul *30 Years of Hun-Sen : Violence, Repression, and Corruption in Cambodia*²⁵⁶ serta transkrip wawancara yang dilakukan oleh David O'Shea dan dipublikasi oleh Media SBS berjudul *Cambodia's Home Boys*.²⁵⁷

Di awal halaman website Human Rights Watch yang berjudul *Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression. Donor Countries Should Promote Democracy, Human Rights*, Brad Adams selaku penulis laporan *30 Years of Hun-Sen : Violence, Repression, and Corruption in Cambodia*, mengatakan bahwa Kamboja perlu sebuah reformasi agar masyarakat nya dapat mempratikkan hak asasi manusia dasarnya tanpa ada

²⁵⁴ "Protecting Refugees: Questions and Answers," UNHCR, diakses 17 Oktober, 2017, <http://www.unhcr.org/afr/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html>

²⁵⁵ "Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression," Loc.Cit.

²⁵⁶ Adams, Brad. 2015. *30 Years of Hun Sen: Violence, Repression, and Corruption in Cambodia*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2015/01/12/30-years-hun-sen/violence-repression-and-corruption-cambodia>

²⁵⁷ SBS, "The Cambodia Solution?," SBS, <https://www.sbs.com.au/news/dateline/story/cambodian-solution>

ketakutan akan ditahan, disiksa dan dieksekusi.²⁵⁸ Karena Hun-Sen sudah menjabat selama tiga dekade dan telah secara berulang-ulang menggunakan kekerasan politik, represi dan korupsi untuk tetap berkuasa.²⁵⁹ Lalu, Adams menambahkan pentingnya peran donor internasional untuk membuat reformasi tersebut benar-benar terjadi.²⁶⁰

Setelah adanya kalimat pembuka dari Brad Adams, HRW sendiri menginformasikan terkait ketegangan dari Pemerintahan Hun-Sen dilihat dari kata-kata yang dilontarkan oleh Hun-Sen sendiri di beberapa kesempatan. Pada halaman website nya, HRW mengatakan bahwa Hun-Sen telah memerintah dengan kekerasan dan menimbulkan ketakutan. Hun-Sen sendiri sering mendeskripsikan politik sebagai perebutan kematian antara dirinya dan semua individu yang berani menentangnya.²⁶¹

Contoh kata-kata yang dilontarkan oleh Hun-Sen yang dapat mewakili ketegangan pemerintahan nya terdapat di tanggal 18 Juni 2005, 5 Agustus 2009 dan yang terakhir adalah pada 20 Januari 2011. Di Juni 2005, Hun-Sen memperingatkan lawan politik nya yang dituduh sebagai pemberontak bahwa mereka harus menyiapkan peti mati dan menyatakan kehendak-kehendak mereka pada istri masing-masing.²⁶² Komentar Hun-Sen terkait muncul tak lama setelah dirinya mengumumkan bahwa mantan raja Kamboja, Norodom Sihanouk, yang

²⁵⁸ "Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression," Human Rights Watch, diakses 15 Maret, 2018, <https://www.hrw.org/news/2015/01/13/cambodia-30-years-hun-sen-violence-repression>

²⁵⁹ *Ibid.*,

²⁶⁰ *Ibid.*,

²⁶¹ *Ibid.*,

²⁶² *Ibid.*,

turun untuk mengekspresikan pertentangan nya terhadap metode pemerintahan Hun-Sen, akan lebih baik mati.²⁶³

Setelah itu, pada sebuah pidato tanggal 5 Agustus 2009, Hun-Sen menirukan pemicu sebuah senjata ketika memperingatkan individu yang mengkritik nya untuk tidak menggunakan kata “kediktatoran” untuk menggambarkan pemerintahan nya.²⁶⁴ Tidak sampai tahun 2009 saja, pada tahun 2011 tepatnya tanggal 20 Januari, Hun-Sen melemparkan kata-kata kontroversial kembali, berbunyi, *“I not only weaken the opposition, I’m going to make them dead ... and if anyone is strong enough to try to hold a demonstration, I will beat all those dogs and put them in a cage.”*²⁶⁵

Kalimat tersebut merupakan bentuk respon dari Perdana Menteri Kamboja, Hun-Sen terhadap sugesti yang muncul dari masyarakat bahwa dirinya seharusnya merasa gelisah dan cemas melihat adanya penggulingan seorang diktator di Tunisia pada saat peristiwa ‘Arab Spring.’²⁶⁶ Selanjutnya, terdapat wawancara yang dilakukan oleh David O’Shea dan dipublikasi oleh media SBS terkait pengiriman pengungsi jalur laut yang ada di OPC milik Australia di Nauru ke Kamboja. Yang dimana transkrip dari wawancara itu sendiri akan penulis sertakan di halaman belakang dari penelitian ini bersamaan dengan dokumen penting lainnya.

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *Ibid.,*

²⁶⁵ *Ibid.,*

²⁶⁶ *Ibid.,*

Pada ringkasan berita nya, sebelum masuk pada transkrip wawancara, O'Shea mengatakan bahwa ia pernah berbincang dengan pengungsi yang telah tinggal di Kamboja dan melihat serta memperhatikan realita sehari-hari dari kemiskinan dan keputusasaan.²⁶⁷ Dengan tidak adanya dukungan dari Pemerintah Kamboja, pengungsi-pengungsi tersebut bergantung pada dana kesejahteraan organisasi untuk bertahan hidup.²⁶⁸

Dalam transkrip wawancara tersebut terdapat satu tema penting menurut penulis yang dapat dihubungkan dengan studi kasus penelitian yaitu tanya jawab terkait apa yang telah dilakukan Kamboja terhadap beberapa pengungsi sebelum RSA ini ditandatangani. Awalnya, dimulai dengan pertanyaan yang ditujukan kepada *The Jesuit Refugee Service* di Phnom Penh dan diwakilkan oleh Sister Denis Coghlan. Coghlan telah tinggal selama lebih dari dua dekade di Kamboja. Pertama kali ia datang, banyak orang di Kamboja mengungsi setelah adanya masa kejam Khmer Rouge.²⁶⁹

Coghlan mengatakan, di the Jesuit Refugee Service atau JRS, banyak masyarakat Rohingya. Mereka bergantung kepada JRS dalam hal pangan dan akomodasi dasar.²⁷⁰ Individu-individu tersebut menerima pinjaman untuk mengembangkan bisnis kecil menjual roti India di jalan, yang bahkan tepung dan telur nya disediakan oleh pihak JRS.²⁷¹ Laki-laki dari Rohingya juga ikut berbicara bahwa jika tidak ada JRS, mereka akan

²⁶⁷ SBS, Loc.Cit.

²⁶⁸ *Ibid.*,

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*

mati. Ia menyebutkan bahwa Kamboja merupakan negara miskin dan mereka tidak bisa berbicara bahasa mereka.²⁷² Dan menjalankan sebuah bisnis sangat sulit di Kamboja yang bahkan masyarakat lokal sendiri tidak dapat bertahan.²⁷³ Pada akhir kalimat, laki-laki tersebut berpikir bagaimana ia akan bertahan jika warga lokal saja sulit bahkan tidak bisa mencari nafkah.²⁷⁴

Sister Denise sendiri menjadi saksi ketika 22 pencari suaka di Kamboja diculik dibawah todongan senjata dan dilarikan ke China pada 19 Desember 2009.²⁷⁵ Pada saat itu Coghlan berada di bandara, dengan panik mencoba untuk menghentikan proses deportasi mereka karena ia tahu bahwa mereka akan dihadapkan pada penjara atau bahkan lebih buruk dari itu.²⁷⁶ Setelah kasus pengungsi Rohingya JRS, Sister Denise Coghlan dan 22 pencari suaka yang dikirim ke China, terdapat tanya jawab dengan Bong Bun atau disebut B yaitu *American deportees* yang sudah sebelas tahun di Kamboja dan rekan nya, Rain.²⁷⁷

Bung Bon di deportasi ke Kamboja dan disebutkan di wawancara ini bahwa B tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemerintah, yang menyebabkan hidupnya selama sebelas tahun disana, sulit.²⁷⁸ Teman *deportees* dari B sendiri banyak yang bunuh diri dengan cara lompat dari

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.,*

²⁷⁵ *Ibid.,*

²⁷⁶ *Ibid.,*

²⁷⁷ *Ibid.,*

²⁷⁸ *Ibid.,*

jembatan dan menggantung diri nya masing-masing.²⁷⁹ Setelah mendengar adanya kabar akan dipindahkan nya beberapa pengungsi dari Pusat Australia di Nauru, B bertanya-tanya dan tearkejut mengenai apa yang terjadi pada pengungsi tersebut dan terkait periode waktu mereka akan tinggal di Kamboja.²⁸⁰

Rain, rekan dari B yang berasal dari Kentucky juga menggambarkan terkait kondisi nya sebagai *deportees* di Kamboja.²⁸¹ Rain berbicara bahwa disaat kedatangan nya pertama kali di Kamboja, keluarga nya mengirim uang tetapi telah habis dan mengatakan bahwa Pemerintah Kamboja tidak memberikan dukungan terhadap nya²⁸². Selama ini, Rain bertahan hidup dengan hanya nasi dan kecap. Ia tidak mempunyai uang untuk membayar sewa dan mempunyai firasat bahwa nantinya ia akan menjadi gelandangan di jalan.²⁸³

Selain itu, penulis juga menemukan informasi dari laporan pihak *Cambodian Centre for Human Rights* di halaman website nya terkait kondisi HAM di Kamboja terutama pada periode 2013-2014. Pada tahun 2013 HAM di Kamboja dikatakan memburuk²⁸⁴ serta pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014, kondisinya tergolong mengerikan atau

²⁷⁹ *Ibid.*,

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*,

²⁸² *Ibid.*,

²⁸³ *Ibid.*,

²⁸⁴ Cambodian Centre for Human Rights. 2013. *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*. Cambodian Centre for Human Rights. http://cchrcambodia.org/admin/whatwedo/hrsc/Situation_of_Human_Rights_and_State_of_Democracy_2013_en.pdf

disebut ‘*dire*’.²⁸⁵ Di sepanjang tahun 2013, aktivis tanah, *media professionals*, pemimpin serikat kerja serta pejuang HAM di Kamboja menjadi subjek penangkapan sewenang-wenang, subjek ancaman hukuman mati dan ancaman hukum.²⁸⁶ Hak untuk bebas berekspresi yang sebenarnya adalah landasan dari demokrasi, tergolong buruk sekali di Kamboja.²⁸⁷

Kebebasan pres yang dijamin dibawah Pasal 41 dari Konstitusi disimpulkan berbeda sekali dengan realita nya. Kambodia menduduki ranking 143 dari sebanyak 170 negara pada tahun 2013 dari survey *World Press Freedom* terkait *Index of Reporters Without Borders*.²⁸⁸ Peringkat tersebut merupakan peringkat terendah Kamboja yang pernah ada yang mana ranking yang dipegang turun 26 posisi dari tahun 2012 karena adanya tindakan keras pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pres akhir-akhir tahun ini.²⁸⁹ Di tahun yang sama, juga terdapat demonstrasi pekerja pabrik garmen yang secara reguler memprotes dan menyerang pemerintah terkait gaji rendah, kondisi kerja yang buruk serta hak akan tanah dan perumahan.

Sepanjang peristiwa, demonstran ditekan dengan keras menggunakan senjata *electroshock*, senjata api, kanon air, gas air mata dan

²⁸⁵ Cambodian Centre for Human Rights. 2014. *Situation of Human Rights in 2014*. Cambodian Centre for Human Rights.

http://cchrcambodia.org/admin/whatwedo/hrsc/Situation_of_Human_Rights_2014_Eng.pdf

²⁸⁶ Cambodian Centre for Human Rights, Loc.Cit.

²⁸⁷ *Ibid.*,

²⁸⁸ Reporters Without Borders for Freedom of Information. 2013. *2013 World Press Freedom Index: Dashed Hopes After Spring*. Reporters Without Borders For Freedom of Information. <https://rsf.org/en/news/2013-world-press-freedom-index-dashed-hopes-after-spring> dalam *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*

²⁸⁹ *Ibid.*,

semacam pentungan.²⁹⁰ Hasil dari demonstrasi tersebut, pekerja yang tak terhitung jumlahnya dipukuli sebanyak tiga perempuan keguguran, satu orang lumpuh, dua orang gugur dan sekitar enam belas orang terluka.²⁹¹ Lalu terkait bisnis atau pekerjaan dan HAM, menurut program dari *International Labour Organisation's Better Factories Cambodia* (BFC), perbaikan belum dibuat bertahun-tahun termasuk mengenai keamanan dan kesehatan pekerja, keamanan kebakaran dan pekerja anak.²⁹²

Contohnya, di tahun 2012, hanya 12% pabrik yang patuh terhadap kebijakan hukum mengenai *overtime* atau lembur.²⁹³ Dan perempuan, yang mengisi sebagian besar tenaga kerja, diancam akan pemecatan setelah mendapati mereka hamil.²⁹⁴ Tidak hanya itu, perempuan-perempuan tersebut dimotivasi untuk melakukan aborsi diberbagai kasus.²⁹⁵ Tambahan lagi, pada 10 Desember 2013, juga terdapat peristiwa memilukan yang dilakukan oleh Sam Rainsy. Rainsy melakukan pidato yang berisi mendiskriminasi masyarakat Vietnam, mengatakan bahwa mereka mengambil lapangan kerja dan lahan warga Khmer.²⁹⁶ Kamboja

²⁹⁰ *Ibid.*,

²⁹¹ *Ibid.*,

²⁹² International Labour Organization Better Factories Cambodia. 2014. *Thirty First Synthesis Report on Working Conditions in Cambodia's Garment Sector*. International Labour Organization Better Factories Cambodia.
http://www.usfashionindustry.com/pdf_files/Cambodia%20Factories.pdf dalam *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*

²⁹³ Cambodian Centre for Human Rights. 2013. *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*. Cambodian Centre for Human Rights.
http://cchrcambodia.org/admin/whatwedo/hrsc/Situation_of_Human_Rights_and_State_of_Democracy_2013_en.pdf

²⁹⁴ *Ibid.*,

²⁹⁵ *Ibid.*,

²⁹⁶ "CCHR Press Release – Phnom Penh, 18 December 2013," Cambodian Centre for Human Rights, diakses 16 Maret, 2018,

sendiri, terus memulangkan minoritas teraniaya yang melarikan diri dari Vietnam termasuk Christian Montagnards dan etnis Khmer Krom.²⁹⁷

Sedangkan di tahun 2014, situasi HAM di Kamboja tetap mengerikan bahkan ketika masyarakat Kamboja menjadi semakin aktif dalam menuntut rasa hormat terkait HAM dan kebebasan dasar mereka. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan diblokirnya akses ke Freedom Park, tempat umum yang secara khusus didesain untuk menyuarakan opini dalam pertemuan publik.²⁹⁸ Pembatasan tersebut diberlakukan setelah demonstrasi yang diselenggarakan oleh pekerja garment dalam menuntut kenaikan gaji.²⁹⁹ Lalu, di Bulan Oktober 2014, seorang jurnalis di Provinsi Kratie menjadi jurnalis ketiga belas yang dibunuh di Kamboja sejak tahun 1994 ketika mencoba melaporkan adanya *illegal logging*.³⁰⁰

Selepas dipaparkan mengenai gambaran Kamboja dan tindakan nya terhadap pengungsi tersebut, kali ini penulis akan melanjutkan pembahasan terkait hubungan antara Australia dan Kamboja. Dua negara ini dapat dikatakan memulai hubungan secara resmi di tahun 1952 karena di tahun tersebut Australia memulai hubungan diplomatik dengan

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=456&id=5 dalam *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*

²⁹⁷ Cambodian Centre for Human Rights. 2011. *False Promises: Exploring the Citizenship Rights of the Khmer Krom in Cambodia*. Cambodian Centre for Human Rights.

http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summary_and_Recommendations%20False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_the_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf dalam *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*

²⁹⁸ Cambodian Centre for Human Rights. 2014. *CCHR Press Release – Phnom Penh, 4 January 2014*, Cambodian Centre for Human Rights.

http://cchrcambodia.org/media/files/press_release/459_200cpcctrvcohratd_en.pdf dalam *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*

²⁹⁹ *Ibid.*,

³⁰⁰ Meas Sokchea dan Dantel Pye, "Journalist Killed in Kratie," *The Phnom Penh Post*, 13 Oktober, 2014, <http://www.phnompenhpost.com/national/journalist-killed-kratie>

Kamboja.³⁰¹ Namun menurut halaman website *Australian Bureau of Statistics* dengan judul *Australia's Bilateral Relationship* yang dipublikasi pertama pada 24 May 2012 dan diperbarui 11 November 2015³⁰², hubungan kedua negara ini terlihat tidak cukup dekat.

Dapat diperhatikan dari daftar pertama yang ada yaitu Amerika Serikat. Pada daftar pertama tersebut, dikatakan hubungan Australia dan Amerika Serikat sangat penting bagi kepentingan keamanan dan ekonomi internasional Australia yang lebih luas.³⁰³ Negara-negara yang terlihat menjalin hubungan dekat dengan Australia, dipaparkan dengan paragraf panjang dan diposisikan di daftar teratas dibandingkan dengan negara-negara lain.

Contohnya adalah pada daftar hubungan bilateral Australia dengan negara-negara di Asia Utara, Jepang dan China menjadi posisi teratas dengan deskripsi bahwa hubungan Australia dan Jepang termasuk yang paling dekat dan penting.³⁰⁴ Didukung dengan nilai-nilai dan pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan internasional. Sedangkan dengan China, tertulis bahwa hubungan mereka berdasar dari adanya sikap saling menghormati dan berbagi dalam hal minat dan perbedaan.³⁰⁵

³⁰¹ "Cambodia Country Brief," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 18 Maret, 2018, <http://dfat.gov.au/geo/cambodia/pages/cambodia-country-brief.aspx>

³⁰² "Australia's Bilateral Relationship," Australian Bureau of Statistics, diakses 18 Maret, 2018, <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Australia's%20bilateral%20relationships~210>

³⁰³ *Ibid.*,

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ *Ibid.*,

Lalu di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi posisi dua teratas dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.³⁰⁶ Dengan penjelasan bahwa Indonesia dan Australia merupakan tetangga dekat dan menjalin beragam hubungan mengenai politik, keamanan, komersial dan budaya.³⁰⁷ Terkait Malaysia, keamanan regional, perdagangan dan reformasi sektor publik menjadi hal yang membuat kedua negara tersebut dekat.³⁰⁸

Sedangkan hubungan bilateral antara Australia dan Kamboja berada dalam posisi ketujuh dan dideskripsikan dengan paragraf singkat dimana hubungan antara dua negara tersebut meningkat, didukung oleh hubungan historis yang berasal dari peran utama Australia dalam *the Cambodian Peace Process*.³⁰⁹ Selain itu, Australia menjadi donor terbesar kedua terhadap *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* atau yang terkenal dengan Pengadilan Khmer Rouge.³¹⁰ Media Khmer Times juga mendukung pernyataan tersebut dengan turut menginformasikan bahwa total bantuan Australia hampir sebanyak \$23,2 juta Dollar antara tahun 2005 dan 2014.³¹¹

Lalu, di kalimat terakhir bagian hubungan bilateral Australia dan Kamboja, berisi informasi mengenai minat investor Australia yang terus tumbuh terhadap Kamboja termasuk dalam sektor perbankan,

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Ros Chanveasna, "Australia Cements Closer Ties," *Khmer Times*, 19 Oktober, 2017, <http://www.khmertimeskh.com/5086841/australia-cements-closer-ties/>

infrastruktur, pertambangan dan sektor agribisnis.³¹² Mengenai hubungan antara Australia dan Kamboja beberapa tahun terakhir, pada 18 Oktober 2017, Australia meningkatkan hubungan dengan Kamboja ditandai dengan adanya penandatanganan dengan isi kerjasama untuk meningkatkan percakapan tentang semua area dari hubungan bilateral, termasuk pendidikan, pembangunan, kejahatan transnasional, *irregular migration* dan hak asasi manusia.³¹³

Penandatanganan tersebut juga dikatakan aneh karena ketika negara-negara lain memikirkan kembali untuk menjalin hubungan dengan sebuah negara yang semakin terlihat otoriter, Australia malah memperkuat hubungan diplomatik nya dengan Kamboja.³¹⁴ Salah satu negara yang memikirkan kembali untuk menjalin hubungan dengan Kamboja adalah Swedia.³¹⁵ Diplomat Swedia mengatakan bahwa negara Skandinavia memang memikirkan ulang mengenai hubungan nya dengan Kamboja karena semakin menjauhnya negara tersebut dari asas-asas demokrasi.³¹⁶

Duta Besar HAM Swedia, Annika Ben David, turut menyatakan perhatian yang mendalam pada situasi politik yang sedang berlangsung di Kamboja.³¹⁷ Swedia, sebagai salah satu negara di Wilayah Skandinavia, tidak hanya memikirkan kembali hubungan nya dengan Kamboja, tetapi

³¹² "Australia's Bilateral Relationship," Op.Cit

³¹³ Lindsay Murdoch, "More Champagne: Australia Upgrades Ties With Cambodia Autocracy," *The Sydney Morning Herald*, 19 Oktober, 2017, <https://www.smh.com.au/world/more-champagne-australia-upgrades-ties-with-democracycrushing-cambodian-regime-20171019-gz3v36.html>

³¹⁴ Liam Cochrane, "Australia Strengthen Ties With Cambodia As Sweden 'Reconsiders Engagement,' *ABC News*, 20 Oktober, 2017, <http://www.abc.net.au/news/2017-10-20/australia-strengthens-ties-with-cambodia-as-sweden-reconsiders/9071856>

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*,

³¹⁷ *Ibid.*,

juga meninjau ulang terkait bantuan yang diberikan ke Kamboja, setelah lebih dari \$127 juta didonasikan dalam kurun waktu lima tahun.³¹⁸

Beberapa informasi yang telah penulis sajikan di paragraf-paragraf sebelumnya dapat mewakilkan gambaran negara Kamboja yang membuat respon kebijakan pengungsi Australia yang dituangkan dalam RSA dikatakan tergolong negatif, didukung dengan keadaan HAM di Kamboja yang berhubungan dengan pengungsi, komentar yang muncul dari pengungsi yang sudah tinggal di negara tersebut beberapa tahun sebelumnya serta peristiwa-peristiwa yang pecah di Kamboja pada tahun-tahun terkait. Bab gambaran negara Kamboja ini juga berhubungan dengan tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak sebelum RSA ditandatangani oleh kedua negara.

Selanjutnya terkait Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Kamboja melakukan ratifikasi pada 15 Oktober 1992.³¹⁹ Namun kenyataannya, terdapat kenyataan yang berbeda di Kamboja sendiri, didukung oleh pernyataan dari Phil Robertson selaku Wakil Direktur Asia Human Rights Watch. Robertson mengatakan,

“Sadly, I interpret UNHCR’s action as recognising the sorry reality of refugee protection in Cambodia, and the lack of interest by the government in improving the situation. Cambodia is one of the few countries in the region to ratify the Refugees Convention, but this has hardly translated into real protection for refugees who find themselves in the Kingdom,” he said, pointing to the

³¹⁸ *Ibid.*,

³¹⁹ States Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and the 1967 Protocol,” UNHCR, diakses 31 Maret, 2018, <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>

*Montagnard and Uighur cases as proof positive of the government's unwillingness to enact real protections.*³²⁰

Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa Wakil Direktur Asia HRW menyebut kurangnya minat dari Pemerintah Kamboja untuk memperbaiki realita perlindungan pengungsi di Kamboja. Serta menyatakan bahwa walaupun Kamboja menjadi salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, perlindungan yang nyata bagi para pengungsi di Kamboja seperti tidak diterjemahkan dengan benar.

The Phnom Penh Post juga menyertakan informasi bahwa jumlah individu yang ingin mencari perlindungan di Kamboja menurun drastis jumlahnya dari 250 orang tahun 2008 hingga hanya 2 orang tahun 2012.³²¹ Kelompok hak asasi manusia telah menyatakan terkait penurunan tersebut sebagai bukti bahwa kebijakan suaka yang diterapkan buruk dan telah melihat urgensi politik yang lebih dipentingkan dibandingkan dengan konvensi pengungsi.³²² Di tahun 2008 contohnya, hanya 16% dari 250 orang yang diberikan suaka.³²³

³²⁰ Abby Seiff, "UN's Refugee Office in Cambodia Shrinks," *The Phnom Penh Post*, 8 Januari, 2013, <https://www.phnompenhpost.com/national/un%E2%80%99s-refugee-office-cambodia-shrinks>

³²¹ *Ibid.*,

³²² *Ibid.*,

³²³ *Ibid.*,

BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUSTRALIA MENANDATANGANI RSA

Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Australia dalam menandatangani RSA ini, keputusan Australia untuk menandatangani RSA dengan Kamboja termasuk ke dalam respon kebijakan yang negatif menurut Karen Jacobsen. Jacobsen sendiri membagi respon kebijakan pemerintah terkait pengungsi menjadi *restrictive* dan *generous*.³²⁴ *Restrictive* sendiri terdiri dari respon tidak diizinkannya pengungsi masuk ke dalam wilayah negara, memperlakukan pengungsi secara kejam, membatasi pergerakan pengungsi dan *endangering their safety* atau membahayakan keselamatan pengungsi.³²⁵ Respon *restrictive* tersebut dapat tergolong menjadi respon negatif.³²⁶

Sedangkan respon *generous* adalah respon negara yang positif seperti menyediakan bantuan kepada pengungsi dan menjamin keselamatan mereka.³²⁷ Kesepakatan RSA yang dilakukan oleh Australia dengan Kamboja sendiri termasuk ke dalam respon *restrictive* atau negatif menurut Jacobsen adalah karena Australia terbilang dapat membahayakan keselamatan pengungsi jalur laut yang akan dikirim karena pertama, respon dari pengungsi jalur laut terkait kesepakatan tersebut sangat buruk ditandai dengan adanya respon percobaan bunuh diri oleh beberapa diantaranya seperti yang telah dipaparkan di bab empat.

³²⁴ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 655, DOI: 10.2307/2547631

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ *Ibid.*

Kedua, terdapat pernyataan pendapat dari beberapa rezim pengungsi internasional yang memang mengatakan bahwa Kamboja bukan merupakan negara yang tepat dalam kesepakatan tersebut karena salah satunya sejarah HAM dan sejarah terkait pengungsi-pengungsi yang menetap di Kamboja sebelumnya, masih tergolong buruk. Lalu, penjelasan yang lebih rinci terkait hal ini akan dijelaskan di bagian *introduction* dan kesimpulan di setiap parameter nya agar pembaca sendiri lebih mempunyai pemahaman yang dalam terkait cara penulis dalam menganalisis penelitian ini menggunakan Model dari Karen Jacobsen.

5.1. Variabel Bureaucratic Choices

Variabel *Bureaucratic Choices Made by The Government* ini, mempunyai indikator respon birokrasi pemerintah serta parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi. Parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi ini menekankan bahwa agensi pemerintah suatu negara dalam menerima pengungsi akan menentukan arah kebijakan pengungsi yang positif atau negatif. Ketika pengungsi merupakan sarana untuk kelangsungan hidup dan kemajuan karir birokrasi, lembaga suatu negara memiliki kepentingan pribadi dalam masalah pengungsi yang pada akhirnya personil tersebut akan mengalokasikan sumber daya lebih besar ke kamp pengungsi dan cenderung akan menetapkan kebijakan pengungsi yang positif.³²⁸

Dan jika pengungsi berada dalam tanggung jawab dari badan militer atau departemen lain yang memiliki tanggung jawab berbeda, beberapa pejabat akan

³²⁸ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 661, DOI: 10.2307/2547631

mempunyai kepentingan lebih sedikit terkait kesejahteraan pengungsi.³²⁹ Nanti nya, pengungsi tersebut dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber daya yang tersedia dan dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan negara dan hasilnya akhirnya, kebijakan pengungsi yang lebih negatif mungkin akan dijadikan nyata.³³⁰ Kebijakan pengungsi yang negatif ini termasuk kesepakatan Australia dengan Kamboja yaitu RSA.

Australia dalam hal ini, dalam merespon dan menangani pengungsi jalur laut dan yang akan dikirim ke Nauru *Offshore Processing Centre*, adalah menggunakan badan militer dibawah *Operation Sovereign Borders Joint Agency Task Force*. *Operation Sovereign Borders* atau OSB merupakan badan militer yang memimpin operasi keamanan perbatasan yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia melalui jalur laut dan melindungi perbatasan Australia.³³¹ OSB sendiri didirikan pada 18 September 2013 dan telah sukses dalam menurunkan jumlah usaha maritim ilegal ke Australia dan mencegah kematian di lautan.³³²

Menurut informasi yang diperoleh penulis dari *Australian National Audit Office* atau ANAO, kontribusi utama yang dibuat oleh Departemen OSB sendiri adalah sebagai kepala dari *Offshore Detention DAN Returns Task Group*.³³³ Selain itu, OSB juga turut melakukan *Security Risk Reviews* di kedua pusat

³²⁹ *Ibid.*,

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ "Operation Sovereign Borders," Australian Government, diakses 3 April, 2018, <http://osb.homeaffairs.gov.au/>

³³² *Ibid.*,

³³³ "Offshore Processing Centres in Nauru and Papua New Guinea: Contract Management of Garrison Support and Welfare Services," Australian National Audit Office, diakses 3 April, 2018, <https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/offshore-processing-centres-nauru-and-papua-new-guinea-contract-management>

penahanan pengungsi jalur laut milik Australia yaitu Nauru dan Pulau Manus pada akhir tahun 2013.³³⁴ Media *Public Radio International* atau PRI juga mendukung hal tersebut dimana dalam halaman berita nya disebutkan bahwa Australia memang tidak akan mengizinkan pencari suaka dan pengungsi yang sampai melalui jalur laut bermukim di Australia, bahkan untuk tindakan *processing* pun.³³⁵

Sebagai gantinya, pihak Militer Australia mencegat mereka di laut dan mengembalikan nya ke negara keberangkatan, biasanya Indonesia atau ke Kamp Pulau Manus di Papua New Guinea atau Pulau Kecil Nauru.³³⁶ Australia sendiri membayar dua negara tersebut untuk menjadi tuan rumah sementara dan untuk mengelola kamp.³³⁷ Akses di Nauru OPC sendiri dikontrol dengan ketat.³³⁸ Setiap peristiwa atau acara yang ada di lokasi tersebut juga dilaporkan hanya sekali-sekali melalui individu pendukung pengungsi atau *refugee advocates* dan melalui *whistleblowers*³³⁹ atau menurut *Cambridge Dictionary*, individu yang menceritakan informasi ke pihak berwenang terkait hal gelap yang sedang terjadi biasanya di departemen pemerintah atau perusahaan.³⁴⁰

³³⁴ *Ibid.*,

³³⁵ Carol Hills, "For the Asylum-Seekers in One of Australia's Controversial Offshore Detention Camps, There's Good News and Bad News," *PRI*, 8 September, 2017, <https://www.pri.org/stories/2017-09-08/asylum-seekers-one-australias-controversial-offshore-detention-camps-theres-good>

³³⁶ *Ibid.*,

³³⁷ *Ibid.*,

³³⁸ Paul Farrel, Nick Evershed dan Helen Davidson, "The Nauru Files: Cache of 2,000 Leaked Reports Reveal Scale of Abuse of Children in Australian Offshore Detention," *The Guardian*, 10 Agustus, 2016, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention>

³³⁹ *Ibid.*,

³⁴⁰ "whistle-blower," *Cambridge Dictionary*, diakses 3 April, 2018, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whistle-blower>

Akses ketat di Nauru tersebut menyebabkan laporan mengenai peristiwa serius yang sedang terjadi menjadi sulit. Namun walaupun seperti itu Laporan ‘*Nauru Files*’ yang diterbitkan oleh the Guardian dapat sedikit memberikan gambaran mengenai peristiwa apa saja yang terjadi di kamp Nauru. *Nauru Files* mencakup informasi apa saja yang terjadi di OPC Nauru mulai dari Bulan Mei 2013 hingga Oktober 2015.³⁴¹ Isi dari dokumen tersebut kurang lebih adalah mengenai perkosaan, pelecehan seksual, usaha menyakiti diri sendiri, pelecehan pada anak-anak dan kondisi dari Kamp Nauru sendiri.³⁴²

Selain itu, juga disebutkan bahwa kerahasiaan di Pusat Nauru diduga sangat rapat, seperti adanya larangan mengambil foto di lokasi menggunakan kamera.³⁴³ Adanya badan militer yang menangani, merespon dan menerima pengungsi maupun pencari suaka jalur laut yang ada di Kamp Pengungsi Nauru tersebut membuat kebijakan seperti dipindahkan ke negara ketiga maupun dipulangkan ke negara asalnya akan diambil atau untuk lebih meringkasnya, kebijakan negatif lebih besar muncul.³⁴⁴ Karena agensi pemerintah yang menerima pengungsi adaah badan militer yang dimana pengungsi-pengungsi tersebut dipandang hanya sebagai beban yang menyulitkan sumber daya yang tersedia dan dinilai sebagai ancaman potensial terhadap keamanan suatu negara, seperti apa yang dikatakan oleh Karen Jacobsen.³⁴⁵

³⁴¹ Paul Farrel, Nick Evershed dan Helen Davidson, Loc.Cit.

³⁴² *Ibid.*,

³⁴³ *Ibid.*,

³⁴⁴ (Jacobsen, 1992; Robinson, 1985) dalam Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx,” *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 661, DOI: 10.2307/2547631

³⁴⁵ *Ibid.*

Dalam hal ini di jurnal nya, Jacobsen juga memberikan contoh negara yang menerima dan mengelola pengungsi menggunakan badan militer. Contoh tersebut terdapat di Thailand.³⁴⁶ Tanggung jawab terkait pengungsi Kamboja yang datang ke Thailand setelah tahun 1975 ditugaskan dan diserahkan kepada *Thai Defense Force*.³⁴⁷ Badan tersebut mengasosiasikan pengungsi dengan berbagai ancaman dan tindakan mereka sangat ketat terhadap pergerakan pengungsi itu sendiri dan mewajibkan mereka untuk tinggal di kamp pengungsi dekat dengan perbatasan Thailand dan Kamboja.³⁴⁸ Serta hanya dibolehkan untuk meninggalkan kamp ketika mereka akan ditampung di negara ketiga.³⁴⁹

Dalam kasus tersebut, banyak peristiwa *refoulement* atau tindakan secara paksa untuk memulangkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu negara dimana mereka cenderung menjadi subjek penganiayaan,³⁵⁰ peristiwa dipulangkannya pengungsi ke negara asalnya dan terdapat keluhan mengenai tindakan militer terhadap para pengungsi.³⁵¹ Nasib yang akan diterima oleh pengungsi yang ditangani oleh Militer Thailand tersebut, termasuk tindakan *refoulement* dan pilihan dikirimnya ke negara ketiga, juga termasuk dalam kebijakan pemerintah yang bukan murah hati dan dapat mengarah kepada kebijakan membatasi³⁵² menurut Jacobsen. Seperti kalimat yang tertulis di jurnal nya,

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Ibid.*,

³⁴⁹ *Ibid.*,

³⁵⁰ "Refoulement," Oxford Dictionaries, diakses 3 April, 2018, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/refoulement>

³⁵¹ (Jacobsen, 1992; Robinson, 1989) dalam Karen Jacobsen, Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 661, DOI: 10.2307/2547631

³⁵² *Ibid.*, 655.

“Some governments have received refugees with generosity, providing them with assistance and guaranteeing their safety. Others have tried to prevent refugees from entering, or have treated them harshly, restricting their movements and even endangering their safety,”³⁵³

Karena menurutnya, tindakan murah hati itu sendiri adalah menyediakan bantuan dan menjamin keamanan kepada pengungsi bukan mencegah pengungsi datang dan memperlakukan mereka dengan kasar, membatasi pergerakan nya atau bahkan membahayakan keamanan nya. Lalu, dilihat dari studi kasus Thailand, terdapat beberapa hal yang hampir mempunyai kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Australia kepada pengungsi dan pencari suaka yang ada di OPC milik Australia di Nauru yang juga sama-sama menggunakan badan militer untuk menerima pengungsi serta dapat berakibat pada kebijakan yang negatif.

Kesamaan tersebut dapat dilihat pada penempatan pengungsi. Dalam menerima pengungsi Kamboja, Thailand menempatkan mereka di Kamp dekat perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sedangkan disini Australia menempatkan pengungsi dan pencari suaka jalur laut di Nauru OPC, lokasi yang cukup jauh dengan perbatasan Australia. Hal yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Thailand adalah kedua negara yaitu Australia dan Thailand, sama-sama menempatkan pengungsi jauh dari pusat negara nya seperti di perbatasan negara atau lokasi yang cukup jauh dari perbatasan itu sendiri.

Selanjutnya, Militer Thailand juga membatasi pergerakan pengungsi itu sendiri di dalam kamp pengungsi. Nauru OPC disini juga mempunyai akses yang ketat yang menyebabkan laporan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pusat Nauru juga terbatas dan sulit untuk diliput. Salah satu dampak dari badan

³⁵³ *Ibid.*

militer yang menerima pengungsi tersebut adalah adanya kepentingan lebih sedikit terkait kesejahteraan pengungsi³⁵⁴ sehingga kesempatan terjadinya peristiwa-peristiwa negatif di Kamp pengungsi akan lebih besar seperti apa yang dipublikasi oleh the Guardian pada dokumen '*Nauru Files*' dibalik akses terbatas yang diterapkan Pusat Nauru.

Untuk meringkas nya, parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi ini dikatakan membawa pengaruh dalam keputusan Australia menandatangani RSA karena seperti yang telah disampaikan, menurut Jacobsen, ketika sebuah negara mengerahkan badan militer untuk menangani pengungsi, respon kebijakan pengungsi yang lahir akan negatif yaitu kebijakan yang bukan murah hati, melainkan yang bersifat membatasi seperti *endangering their safety* seperti respon kebijakan yang dikeluarkan Australia dengan menandatangani RSA dengan Kamboja.

5.2. Variabel International Influence

Analisa variabel kedua dari Model Jacobsen ini akan menganalisa dua indikator yang ada pada variabel *International Influence* yaitu indikator rezim pengungsi internasional dan indikator negara pengirim. Yang akan dianalisa terlebih dahulu adalah indikator rezim pengungsi internasional disertai dengan tiga parameter nya yaitu bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional dan ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional serta kelemahan kelembagaan. Sedangkan indikator negara pengirim mempunyai parameter hubungan negara pengirim dengan penerima.

³⁵⁴ *Ibid.*, 661.

5.2.1. Rezim Pengungsi Internasional

5.2.1.1. Bantuan Internasional oleh Rezim Pengungsi Internasional

Rezim pengungsi internasional adalah indikator paling pertama di variabel pengaruh internasional yang mana rezim pengungsi internasional ini sendiri mempengaruhi pemerintah tuan rumah dalam alasan praktis dan normatif.³⁵⁵ Disini, alasan praktis akan dianalisis terlebih dahulu oleh penulis. Menurut apa yang ditulis oleh Jacobsen dalam jurnalnya, secara alasan praktis bantuan internasional dapat meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk menerima pengungsi dengan menyediakan bantuan finansial, menstimulasi pasar domestik dan meningkatkan infrastruktur.³⁵⁶

Maksud dari bantuan tersebut nantinya akan memposisikan UNHCR sebagai rezim pengungsi internasional, mempunyai beberapa pengaruh kepada pemerintah tuan rumah karena dapat menyediakan bantuan ataupun mengurangi nya³⁵⁷ serta dapat mempengaruhi respon kebijakan suatu negara untuk lebih menerima gelombang pengungsi karena nantinya beban finansial negara akan dibantu oleh rezim internasional. Seperti keadaan yang terjadi di Pakistan tahun 1980, dimana UNHCR membantu

³⁵⁵ *Ibid.*, 662.

³⁵⁶ *Ibid.*

³⁵⁷ *Ibid.*

Pakistan dalam menerima pengungsi dengan mengeluarkan bantuan sebesar \$1 juta per-hari nya.³⁵⁸

Dalam kasus penelitian penulis, perjanjian RSA mengatur bahwa akan dikirimnya beberapa pengungsi di OPC Nauru yang telah memenuhi syarat ke Kamboja. Jadi yang akan dianalisis disini adalah bantuan internasional yang diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi yang ada di salah satu OPC Australia yaitu di Nauru. Nauru Offshore milik Australia sendiri merupakan hasil dari nota kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Nauru.³⁵⁹ UNHCR bukan merupakan salah satu pihak dalam MoU atau nota kesepahaman tersebut serta tidak secara operasional terlibat dalam proses penilaian klaim pengungsi pencari suaka di OPC Nauru.³⁶⁰

Maka dari itu, hal-hal seperti tanggung jawab akan perawatan dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang ditransfer dari Australia ke Nauru maupun PNG sepenuhnya ada di tangan negara yang terlibat dalam perjanjian bilateral.³⁶¹ Ini termasuk tanggung jawab mengenai kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pencari suaka dan pengungsi. Lalu juga tentang tanggung jawab

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ "Assistance," UNHCR, diakses 23 April, 2018. <http://www.unhcr.org/assistance-in-australia-and-the-region.html#g>

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ *Ibid.*

terhadap solusi tahan lama yang ditunjukkan kepada pengungsi dan pencari suaka di masing-masing *Offshore Processing*.³⁶²

Disini UNHCR tidak mempunyai posisi untuk menginvestigasi keluhan-keluhan terkait kondisi individu di tahanan Nauru maupun PNG.³⁶³ UNHCR hanya mempunyai peran sebagai pengawas terkait implementasi dari Konvensi Pengungsi 1951 di Nauru dan Papua New Guinea.³⁶⁴ Salah satu contoh dari peran pengawas tersebut adalah adanya kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh UNHCR ke masing-masing lokasi tahanan untuk memantau kepatuhan negara terhadap standar internasional.³⁶⁵

Terkait biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di Nauru *Offshore* berasal dari Pemerintah Australia sendiri termasuk infrastruktur dan pelayanan yang dibutuhkan di lokasi.³⁶⁶ Dapat dilihat dari pengelompokan pengeluaran Pemerintah Australia di tahanan Nauru tahun 2014-2015 yang terdapat di halaman online ABC News, terdapat pengelompokan biaya untuk *garrison and welfare, healthcare services, property*, dan lain-lain.³⁶⁷ *Garrison* sendiri mencakup infrastruktur dan pelayanan yang disediakan untuk memelihara masing-masing

³⁶² *Ibid.*,

³⁶³ *Ibid.*,

³⁶⁴ *Ibid.*,

³⁶⁵ *Ibid.*,

³⁶⁶ ABC News, "Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing than the UN Spends on Refugee Programs in South East Asia," *ABC News*, 21 July, 2015, <http://www.abc.net.au/news/2015-07-14/cost-of-offshore-processing-united-nations-fact-check/6609764>

³⁶⁷ *Ibid.*

lokasi tahanan dan untuk para staf.³⁶⁸ Berikut di halaman selanjutnya adalah rincian pengeluaran pemerintah Australia di OPC Nauru dengan sumber DIBP melalui ABC News.

Breakdown of Government expenditure on Nauru 2014-15	
Charters	\$24,700,000
Escorts	\$8,600,000
Independent reviews	\$479,000
Garrison and welfare	\$316,900,000
Healthcare services	\$25,400,000
Family and unaccompanied minors welfare support	\$26,150,000
Property	\$150,000
Advisory Committee costs	\$205,000
Returns	\$2,800,000
Removals	\$810,000
Visas	\$15,500,000
Leases	\$1,800,000
Other payments to Government of offshore centre	\$600,000
Other costs	\$9,900,000
TOTAL	\$433,994,000
Departmental expenses - Staff	\$9,100,000
Departmental expenses - Supplies	\$26,000,000
TOTAL	\$35,100,000

Gambar 6: Rincian pengeluaran Pemerintah Australia di OPC Nauru 2014-2015³⁶⁹

Lalu, dapat dilihat dari fakta-fakta sebelumnya, UNHCR sebagai rezim pengungsi internasional hanya mempunyai peran sebagai pengawas dengan secara regular mengunjungi lokasi *offshore processing* Australia di Nauru dan tanggung jawab akan

³⁶⁸Commonwealth of Australia. 2014. Official Committee Hansard: Senate: Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee. Commonwealth of Australia. http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/estimate/e0ac4873-6e45-47ec-b82f-7eb06a2dd45f/toc_pdf/Legal%20and%20Constitutional%20Affairs%20Legislation%20Committee_2014_10_20_2981_Official.pdf

³⁶⁹ "Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing than the UN Spends on Refugee Programs in South East Asia," Loc.Cit.

perawatan dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang ditransfer dari Australia ke Nauru maupun Papua New Guinea sepenuhnya ada di tangan negara yang terlibat dalam perjanjian bilateral. Ini termasuk tanggung jawab mengenai kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pencari suaka dan pengungsi.

Dengan peran UNHCR yang terbatas karena tidak termasuk ke dalam *party* di nota kesepahaman antara Australia dan Nauru, pemberian bantuan, usaha menstimulasi pasar domestik maupun meningkatkan infrastruktur menjadi hal yang sangat sulit karena pintu awal bagi UNHCR untuk masuk juga sudah terbatas karena bukan merupakan pihak dalam perjanjian serta hanya menduduki peran sebagai pengawas. Terlebih lagi, Australia sendiri sebagai negara maju terlihat sangat cukup dalam masalah finansial untuk mengoperasikan *offshore* nya termasuk di Nauru, dilihat dalam tabel yang dibuat oleh ABC News yang mana infrastruktur dan pelayanan di tahanan Nauru dalam kategori *garrison and welfare*, dibiayai sendiri oleh Pemerintah Australia.

Biaya yang dikeluarkan oleh Australia tersebut sampai dibanding-bandingkan dengan pengeluaran PBB dalam program pengungsi di Asia Tenggara, apakah pengeluaran Australia lebih banyak atau tidak.³⁷⁰ Oleh karena nya, bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional yang dijalankan oleh UNHCR seperti usaha menstimulasi pasar domestik, meningkatkan

³⁷⁰ *Ibid.*

infrastruktur dan memberikan bantuan finansial untuk mengarahkan respon kebijakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Pusat Nauru menjadi positif dan tidak bersifat *endangering their safety* sangat tidak memungkinkan.

Hal tersebut tidak memungkinkan karena pergerakan UNHCR terbatas yang pada akhirnya membuat pengaruh UNHCR menjadi sangat kecil. Terlebih lagi, menurut data yang tersedia di halaman website UNHCR dengan judul '*Monitoring Reports*' penulis menemukan di data yang terpublikasi bahwa UNHCR hanya melangsungkan kegiatan *monitoring* ditanggal 3-5 Desember 2012 dan 7 hingga 9 Oktober 2013 di Pusat Nauru.³⁷¹ Selain itu, organisasi yang berhubungan dengan pengungsi seperti Amnesty International, berhubungan dengan segala tanggung jawab mengenai pengungsi dan fasilitas di Nauru *Offshore* ada di tangan *party* dari nota kesepahaman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pergerakan Amnesty juga terbatas.

Dimana penulis menemukan bahwa sebagian besar berita terkait Amnesty dan pengungsi di Nauru *Offshore* serta fasilitasnya hanya terdapat berita mengenai kunjungan Amnesty ke Pusat Tahanan Pengungsi milik Australia di Nauru seperti apa yang dilakukan oleh UNHCR. Contohnya pada 19-22 November 2012, tim dari Amnesty mengadakan investigasi independen pertama ke

³⁷¹ "Monitoring Reports," UNHCR, diakses 28 April, 2018, <http://www.unhcr.org/en-au/search?comid=5811a3437&cid=49aea93ae2&scid=49aea93a6d&tags=monitoringreport>

OPC Australia di Nauru untuk menentukan situasi HAM yang ada di lokasi terkait.³⁷² Dan pada kepulangnya, penemuan Amnesty sendiri dipublikasi di *briefing paper* dengan judul *Nauru Offshore Processing Facility Review 2012*.³⁷³

Dari hasil laporan Amnesty tersebut penulis juga menemukan bahwa ketika akomodasi di Pusat Tahanan Nauru ditemukan buruk, Amnesty hanya bisa menyarankan kepada Pemerintah Australia untuk segera memperbaiki fasilitas yang tidak layak tersebut karena Amnesty prihatin bahwa akomodasi yang ada dapat melanggar peraturan standar minimum PBB terhadap tahanan khususnya bahwa semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh tahanan dan semua akomodasi untuk istirahat harus memenuhi semua persyaratan kesehatan.³⁷⁴ Sikap Amnesty tersebut dapat menandakan bahwa pergerakan organisasi tersebut terbatas dikarenakan memang setiap tanggung jawab terhadap tahanan dan fasilitas di Nauru sendiri ada di tangan pihak yang terlibat dalam perjanjian bilateral.

Paparan mengenai posisi UNHCR dan Amnesty di Pusat Tahanan Nauru yang menurut penulis menjadi organisasi utama yang berhubungan dengan pengungsi, dapat menjadi sedikit

³⁷² “Amnesty International Fact-Finding Visit to Nauru,” Right Now, diakses 1 Mei, 2018, <http://rightnow.org.au/interview-3/amnesty-internationals-fact-finding-visit-to-nauru/>

³⁷³ *Ibid.*,

³⁷⁴ Amnesty International. 2012. *Nauru Camp A Human Rights Catastrophe With No End in Sight*. Amnesty International.
<https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/asa420022012en.pdf>

gambaran bahwa memang pergerakan organisasi sulit di pusat tahanan tersebut. Kesimpulan nya, parameter bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional mempunyai pengaruh dalam penandatanganan RSA oleh Australia karena UNHCR sebagai rezim pengungsi internasional utama atau primer menurut Jacobsen³⁷⁵

Serta Amnesty mempunyai peran yang sangat terbatas di Nauru OPC untuk mengarahkan respon kebijakan lebih positif dan pada akhirnya respon yang muncul dari Australia arah nya negatif atau bersifat *endangering their safety*. Dimana kesepakatan Australia-Kamboja sendiri tergolong menjadi respon kebijakan pemerintah yang negatif jika disesuaikan dengan jenis respon pemerintah oleh Jacobsen.

5.2.1.2. Ancaman Publisitas oleh Rezim Pengungsi Internasional

Ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional ini dapat secara singkat dideskripsikan bahwa ancaman publisitas internasional yang buruk dapat digunakan oleh organisasi pengungsi untuk menekan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengungsi yang lebih positif.³⁷⁶ Beberapa pemerintah memiliki keinginan untuk tidak dipandang buruk oleh dunia internasional,

³⁷⁵ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 657, DOI: 10.2307/2547631

³⁷⁶ *Ibid.*, 663.

jadi publisitas yang diberikan mengenai pelanggaran hukum terkait pengungsi bisa menjadi pertimbangan politis yang dapat membentuk respon kebijakan pemerintah.³⁷⁷

Dalam studi kasus yang disediakan Jacobsen yaitu Thailand, penulis dapat menyimpulkan bahwa ancaman publisitas yang dimaksud adalah pemberitaan dari media mengenai respon kebijakan negatif pemerintah yang melanggar hukum terkait pengungsi seharusnya dapat mengarahkan respon kebijakan pemerintah menjadi positif.³⁷⁸ Lalu jika disesuaikan dengan studi kasus penulis, akan difokuskan terhadap pemberitaan di media yang mencakup kalimat pernyataan dari UNHCR sebagai rezim pengungsi internasional utama dan organisasi yang berhubungan dengan pengungsi lainnya, bahwa keputusan Australia adalah tindakan melanggar hukum pengungsi dan termasuk respon negatif.

Rentang waktu dari adanya pemberitaan media negatif terhadap sikap Australia disini, penulis memutuskan adalah pada waktu sebelum penandatanganan RSA. Jika jumlah pemberitaan media negatif terhadap sikap Australia sedikit dipublikasi sebelum penandatanganan RSA, dampak respon kebijakan yang lahir akan tetap negatif karena pemberitaan untuk mendorong atau menyetir agar respon kebijakan nya bisa lebih positif, tidak massif

³⁷⁷ *Ibid.*

³⁷⁸ *Ibid.*

jumlahnya. Selain itu, dapat juga dilihat melalui keputusan Australia beberapa tahun sebelum 2014 yang jenisnya hampir sama dengan RSA dan melihat apakah respon dari sebagian besar rezim pengungsi internasional positif atau tidak ditandai dengan ada atau tidaknya pemberitaan negatif mengenai tindakan Australia terkait.

Setelah menjelaskan penekanan mengenai data seperti apa yang akan penulis cari, di beberapa halaman selanjutnya penulis akan mulai menyajikan dan menganalisis data. Dimulai dari data tentang pemberitaan negatif mengenai tindakan Australia di sebelum penandatanganan RSA. Ketika penulis melakukan pencarian terkait pemberitaan negatif tersebut, ditemukan bahwa jumlah ancaman publisitas yang mencantumkan ancaman publisitas oleh UNHCR maupun organisasi yang berhubungan dengan pengungsi lainnya, hanya sebanyak 6 media yang melakukan publikasi adanya rencana penandatanganan RSA. Berikut di halaman selanjutnya adalah tabel nya,

No	Tanggal Publikasi Berita	Nama Media	Nama Organisasi Yang Disebut di Berita
1.	3 Mei 2014 ³⁷⁹	The Cambodia Daily	Amnesty International
2.	3 Mei 2014 ³⁸⁰	Khmer Times	Amnesty International
3.	25 September 2014 ³⁸¹	Amnesty	Amnesty International
4.	15 September 2014 ³⁸²	International La Croix	UNHCR
5.	15 September 2014 ³⁸³	UCA News	UNHCR
6.	20 May 2014 ³⁸⁴	The Sydney Morning Herald	UNHCR

Tabel 2: Pemberitaan ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional sebelum RSA ditandatangani. Diolah oleh penulis.

Tabel diatas merupakan tabel olahan penulis yang hasilnya, hanya terdapat 6 pemberitaan media yang menyertakan kalimat *condemn* atau mengutuk dan kalimat seperti adanya pelanggaran hukum pengungsi oleh Australia. Kalimat ancaman publisitas yang dikeluarkan oleh UNHCR di beberapa media tersebut contohnya adalah seperti kutipan di halaman selanjutnya,

³⁷⁹ Lauren Crothers, "Amnesty International Urges Govt to Scrap Asylum Seeker Plans," *The Cambodia Daily*, 3 Mei, 2014, <https://www.cambodiadaily.com/news/amnesty-international-urges-govt-to-scrap-asylum-seeker-plans-57996/>

³⁸⁰ Khmer Times, "Amnesty International Calls on Cambodia and Australia to Scrap Refugee Deal," *Khmer Times*, 3 Mei, 2014, <https://www.khmertimeskh.com/news/1237/amnesty-international-calls-on-cambodia-and-australia-to-scrap-refugee-deal->

³⁸¹ "Cambodia: New Deal With Australia Signs Away Refugee Rights," *Amnesty*, diakses 3 Mei, 2014, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/cambodia-new-deal-australia-signs-away-refugee-rights/>

³⁸² Michael Sainsbury, "UN Slams New Australia-Cambodia Refugee Deal," *International La Croix*, 15 September, 2014. <https://international.la-croix.com/news/un-slams-new-australia-cambodia-refugee-deal/62>

³⁸³ Michael Sains bury, "UN Refugee Agency Slamd Cambodia-Australia Deal," *UCA News*, 15 September, 2014, <https://www.ucanews.com/news/un-refugee-agency-slams-cambodia-australia-deal/71943>

³⁸⁴ Lindsay Murdoch, "Cambodia's PM Hun Sen Confirms Controversial Agreement to Resettle Refugees from Australia," *The Sydney Morning Herald*, 20 Mei, 2014, <https://amp.smh.com.au/politics/federal/cambodias-pm-hun-sen-confirms-controversial-agreement-to-resettle-refugees-from-australia-20140520-zrh3.html>

“This is a worrying departure from international norms. We are seeing record forced displacement globally, with 87 per cent of refugees now being hosted in developing countries. It’s crucial that countries do not shift their refugee responsibilities elsewhere,” said UN High Commissioner for Refugees António Guterres.³⁸⁵

“International responsibility sharing is the basis on which the whole global refugee system works. I hope that the Australian government will reconsider its approach.”³⁸⁶

“Refugees are persons who are fleeing persecution or the life-threatening effects of armed conflict. They are entitled to better treatment than being shipped from one country to the next,” Guterres added.³⁸⁷

Sedangkan Amnesty International sendiri di sebagian besar media yang sudah penulis tulis di halaman sebelumnya, mengatakan bahwa perjanjian RSA seperti menaruh kepentingan politik jangka pendek dari Pemerintah Australia lebih dulu dibandingkan dengan mengusahakan untuk melindungi beberapa orang paling rentan di dunia yaitu pengungsi.³⁸⁸ Dan hal ini membuat Kamboja terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Australia.³⁸⁹

Selain itu, Amnesty juga berkomentar bahwa keputusan Australia tersebut merupakan sebuah bentuk perlakuan yang tercela dan kejam karena hak asasi manusia yang dimiliki oleh

³⁸⁵ UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation,” UNHCR, diakses 15 Februari, 2018, <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>

³⁸⁶ *Ibid.*

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ “Cambodia: New Deal with Australia Signs Away Refugee Rights,” *Amnesty*, diakses 15 Februari, 2018, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/cambodia-new-deal-australia-signs-away-refugee-rights/>

³⁸⁹ *Ibid.*

Kamboja tidak bisa dipertanggung jawabkan.³⁹⁰ Dan apa yang dilakukan Australia sendiri dapat dikatakan membingungkan menurut Amnesty karena satu bulan sebelum pihak dari Australia membuka obrolan kepada Kamboja terkait RSA, Australia sendiri secara terbuka mengutuk keadaan HAM di Kamboja yang sangat buruk.³⁹¹

Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh dua rezim yang berhubungan dengan pengungsi internasional tersebut adalah sebagian besar kalimat yang ditulis oleh media-media yang telah penulis jabarkan di tabel halaman sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di halaman online media masing-masing yang mana footnote nya sudah penulis cantumkan pada tabel sebelumnya.

Tabel sebelumnya menggambarkan bahwa jumlah pemberitaan negatif tergolong tidak massif. Disini penulis dapat menggarisbawahi bahwa parameter ancaman publisitas rezim pengungsi internasional dalam mempengaruhi keputusan Australia untuk menandatangani RSA adalah berpengaruh sifatnya. Karena pemberitaan negatif di media terkait rencana Australia menandatangani RSA atau terkait rentang waktu sebelum RSA ditandatangani, pemberitaan nya tidak banyak.

³⁹⁰ *Ibid.*

³⁹¹ *Ibid.*

Oleh karena nya penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya jika pemberitaan negatif nya muncul lebih banyak sebelum RSA ditandatangani, respon kebijakan nya akan lebih positif dan bisa saja Australia menghentikan proses menuju penadatangan karena adanya pemberitaan negatif yang massif. Namun, fakta yang diperoleh berbeda. Jumlah pemberitaan negatif sebelum RSA ditandatangani tidak banyak dan menyebabkan respon yang lahir tidak dapat disetir untuk lebih positif.

Pada akhir paragraf, penulis mempunyai kesimpulan inti bahwa parameter ini memiliki pengaruh dalam pandangan RSA oleh Australia yang tergolong respon kebijakan negatif oleh sebuah pemerintah karena dengan adanya ketidakmasif-an pernyataan rezim pengungsi internasional di media terkait pelanggaran hukum pengungsi oleh Australia. Ketidakmasif-an tersebut berakhir pada respon kebijakan pengungsi yang lahir tidak dapat disetir untuk lebih positif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.2.1.3. Kelemahan Kelembagaan

Kelemahan kelembagaan ini bertindak sebagai parameter dimana indikator nya sendiri adalah rezim pengungsi internasional. seperti yang telah penulis paparkan di bab dua, kelembagaan negara yang lemah ditandai dengan implementasi kebijakan

pengungsi yang buruk.³⁹² Yang mana implementasi tidak baik tersebut muncul dari faktor komunikasi dan jalan raya yang buruk serta jaringan komunikasi yang tidak lancar.³⁹³

Keadaan kelembagaan yang lemah memberikan manfaat dan ruang bagi UNHCR untuk mengambil sebuah peran terkait kebijakan pengungsi.³⁹⁴ Yang menurut Jacobsen, dengan adanya sifat UNHCR yang mempunyai biaya lebih banyak dan lebih berpengalaman dalam bidangnya, negara terkait akan lebih sulit menolak desakan atau tekanan yang dilakukan oleh UNHCR pada tahap awal masuknya pengungsi karena lembaga sebuah negara sedang lemah.³⁹⁵ Kata kunci di parameter ini sendiri adalah komunikasi yang berjalan tidak baik, jalan raya yang buruk serta adanya jaringan komunikasi yang tidak lancar.

Pada tahun 2014 di tanggal publikasi 27 April 2014, menurut *International LPI (Logistics Performance Index)* ranking yang dikeluarkan oleh *World Bank*, Australia masuk ke dalam dua belas besar diantara 160 negara dalam kualitas infrastruktur yang terdiri kualitas perdagangan dan transportasi yang berhubungan dengan infrastruktur seperti pelaburan, rel kereta api, jalan raya dan teknologi informasi.³⁹⁶ Australia

³⁹² Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 664, DOI: 10.2307/2547631

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ "Global Rankings 2014," The World Bank, diakses 3 April, 2018, <https://lpi.worldbank.org/international/global/2014>

mencetak angka 4.00 di kualitas infrastruktur LPI sementara Jerman menduduki nomor satu diangka 4.32.³⁹⁷

Angka 4.00 tersebut merupakan sebuah peningkatan bagi Australia karena di tahun 2012 pada tanggal publikasi 2 Februari 2014, Australia hanya mencetak angka 3.83 dengan Amerika Serikat sebagai negara dengan kualitas infrastruktur terbaik nomor satu.³⁹⁸ Kualitas infrastruktur Australia yang telah dipaparkan diatas berhasil mencerminkan kualitas yang dimiliki sebuah negara yang makmur dan dikatakan berhasil dengan mencetak angka tinggi diantara negara-negara maju lainnya. Walaupun tidak semua negara makmur mempunyai kualitas infrastruktur yang baik, Australia cukup dapat membuktikan bahwa negara nya pantas mempunyai label sebagai negara yang makmur dan sukses nomor dua tahun 2014 menurut UNDP³⁹⁹

Lalu terkait kata kunci lainnya, jaringan komunikasi yang dimiliki Australia di tahun 2014 juga tergolong bagus. *The International Telecommunication Union* (ITU) mengeluarkan *Annual Global ICT Data* dan *ICT Development Index Country Rankings* pada tahun 2014 tepatnya pada kesempatan *press releases* di Geneva. Hasilnya, Australia adalah salah satu negara yang masuk 30 besar *ITU's ICT Development Index*.⁴⁰⁰

Ranking yang dikeluarkan oleh ITU tersebut berusaha mengukur

³⁹⁷ *Ibid.*,

³⁹⁸ "Global Rankings 2012," The World Bank, diakses 3 April, 2018, <https://lpi.worldbank.org/international/global/2012>

³⁹⁹ "Australian in Brief," Australian Government, diakses 3 April, 2018, <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf>

⁴⁰⁰ "ITU Releases Annual Global ICT Data and ICT Development Index Country Rankings," ITU, diakses 3 April, 2018, http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/68.aspx#.Wn1dfaiWbIU

keseluruhan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional.⁴⁰¹ Dalam *ranking* yang dipublikasi oleh ITU tersebut Australia termasuk konsisten dalam mempertahankan posisi nya di *top 30-ranking* IDI karena pada tahun 2012 dan 2013 Australia masih berada di *top-30 ranking* tersebut.⁴⁰²

ITU menggabungkan sebanyak sebelas indikator menjadi satu ukuran tunggal yang dapat digunakan sebagai alat pembandingan secara global, regional dan nasional serta dapat membantu untuk melacak kemajuan dalam perkembangan TIK seiring berjalannya waktu.⁴⁰³ International Telecommunication Union mengukur mulai dari akses teknologi dan informasi itu sendiri, penggunaan dan keterampilan nya, jumlah rumah tangga yang memiliki komputer, pengguna internet, tingkat melek huruf dasar dan yang terakhir ialah pelanggan yang berlangganan internet dan menggunakan telepon seluler secara tetap.⁴⁰⁴

Infrastruktur dan jaringan komunikasi di Australia terlihat hampir mendekati kata sempurna dilihat dari skor yang dicapai disetiap pengukuran dan perbandingan nya terhadap negara-negara lain, maju maupun berkembang. Keadaan kelembagaan Australia yang baik pada tahun 2014 maupun di tahun-tahun sebelumnya membuat ruang untuk UNHCR yang mempunyai sifat *better-financed* dan *more-experienced*

⁴⁰¹ *Ibid.*,

⁴⁰² "MIS 2014 Reports Charts," ITU, diakses 28 April, 2018, <https://www.itu.int/en/newsroom/Pages/wtis14-mis-images.aspx>

⁴⁰³ "ITU Releases Annual Global ICT Data and ICT Development Index Country Rankings,"

Loc.Cit.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

menemukan dirinya sulit untuk melangsungkan kemampuan nya agar negara dapat mengarahkan kebijakan nya menjadi positif.

Karena seperti apa yang telah Karen Jacobsen tulis di jurnal modelnya, UNHCR biasanya memanfaatkan kondisi kelembagaan lemah di sebuah negara untuk mengisi peran nya dengan dua sifat spesialnya agar negara terkait akan lebih sulit menolak desakan atau tekanan yang dilakukan oleh UNHCR pada tahap awalnya pengungsi.⁴⁰⁵ Lalu, kembali lagi kepada pernyataan terakhir Jacobsen di indikator rezim pengungsi internasionala yang sebenarnya kelemahan kelembagaan menjadi salah satu faktor yang dapat memaksa tindakan pemerintah tuan rumah agar menjadi lebih positif seperti apa yang penulis kutip dibawah ini,

“In sum, the need for assistance, the avoidance of negative publicity, and institutional weakness all move the host government toward interaction with the international refugee regime, which, in turn, pressures the government towards more positive refugee policies and practices.”

Namun kondisi kelembagaan Australia pada saat terkait ditemukan tidak lemah karena kondisi jaringan komunikasi maupun jalan raya yang termasuk ke dalam kualitas infrastruktur termasuk di kategori baik, bahkan sangat baik karena posisi nya tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada akhirnya, parameter kelemahan kelembagaan ini dapat dikatakan menjadi parameter yang berpengaruh terhadap

⁴⁰⁵ Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx,” *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 664, DOI: 10.2307/2547631

respon kebijakan pemerintah Australia yang negatif karena kelembagaan Australia pada saat waktu terkait tergolong baik dan bagus serta disaat itu, UNHCR tidak dapat mengisi peran istimewa nya dan tidak bisa menekan Australia agar setidaknya negara tersebut bisa mengubah kebijakan nya menjadi lebih positif.

5.2.2. Negara Pengirim

5.2.2.1. Hubungan Negara Pengirim dengan Penerima

Indikator negara pengirim mempunyai penekanan pada hubungan negara pengirim dengan negara penerima. Hubungan antar kedua nya akan mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi pemerintah.⁴⁰⁶ Yang dalam hal ini akan mempengaruhi keputusan kebijakan pengungsi yang dikeluarkan oleh Australia. Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan menurut Jacobsen dan menurut hasil respresentasi penulis, untuk menganalisa indikator kedua dalam variabel *international influence* ini.

Pertama, hubungan negara pengirim dan negara penerima secara tradisional dan hubungan kedua negara saat ini atau di waktu terkait berhubungan dengan studi kasus penelitian. Disini penulis akan meneliti mengenai hubungan negara pengirim yaitu Australia dengan negara penerima yaitu Kamboja. Secara historis, dua negara ini dapat dikatakan mempunyai hubungan baik namun tidak terlalu dekat. Hubungan secara

⁴⁰⁶ *Ibid.*

resmi antara kedua negara dimulai tahun 1952 karena di tahun tersebut Australia memulai hubungan diplomatik dengan Kamboja.⁴⁰⁷

Namun menurut halaman website *Australian Bureau of Statistics* dengan judul *Australia's Bilateral Relationship* yang dipublikasi pertama pada 24 May 2012 dan diperbarui 11 November 2015⁴⁰⁸, hubungan kedua negara ini terlihat tidak cukup dekat. Dapat diperhatikan dari daftar pertama yang ada yaitu Amerika Serikat. Pada daftar pertama tersebut, dikatakan hubungan Australia dan Amerika Serikat sangat penting bagi kepentingan keamanan dan ekonomi internasional Australia yang lebih luas.⁴⁰⁹

Negara-negara yang terlihat menjalin hubungan dekat dengan Australia, dipaparkan dengan paragraf panjang dan diposisikan di daftar teratas dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya adalah pada daftar hubungan bilateral Australia dengan negara-negara di Asia Utara, Jepang dan China menjadi posisi teratas dengan deskripsi bahwa hubungan Australia dan Jepang termasuk yang paling dekat dan penting.⁴¹⁰ Didukung dengan nilai-nilai dan pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan internasional. Sedangkan dengan China, tertulis bahwa hubungan mereka berdasar dari adanya sikap saling menghormati dan berbagi dalam hal minat dan perbedaan.⁴¹¹

⁴⁰⁷ "Cambodia Country Brief," Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, diakses 18 Maret, 2018, <http://dfat.gov.au/geo/cambodia/pages/cambodia-country-brief.aspx>

⁴⁰⁸ "Australia's Bilateral Relationship," Australian Bureau of Statistics, diakses 18 Maret, 2018, <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Australia's%20bilateral%20relationships~210>

⁴⁰⁹ *Ibid.*,

⁴¹⁰ *Ibid.*

⁴¹¹ *Ibid.*,

Lalu di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi posisi dua teratas dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.⁴¹² Dengan penjelasan bahwa Indonesia dan Australia merupakan tetangga dekat dan menjalin beragam hubungan mengenai politik, keamanan, komersial dan budaya.⁴¹³ Terkait Malaysia, keamanan regional, perdagangan dan reformasi sektor publik menjadi hal yang membuat kedua negara tersebut dekat.⁴¹⁴

Sedangkan hubungan bilateral antara Australia dan Kamboja berada dalam posisi ketujuh dan dideskripsikan dengan paragraf lebih singkat dibandingkan dengan negara-negara yang telah penulis sebutkan sebelumnya dimana hubungan antara dua negara tersebut meningkat, didukung oleh hubungan historis yang berasal dari peran utama Australia dalam *the Cambodian Peace Process*.⁴¹⁵ Selain itu, Australia menjadi donor terbesar kedua terhadap *the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* atau yang terkenal dengan Pengadilan Khmer Rouge.⁴¹⁶

Hubungan antara Australia dan Kamboja tersebut baru terlihat terdapat peningkatan menjelang tahun 2014 atau di tahun 2014 sendiri.⁴¹⁷ Peningkatan hubungan tersebut pertama terjadi di sektor perdagangan. Dimana total perdagangan barang antara kedua negara sangat meningkat menjadi sebanyak \$138,75 juta tahun 2014 dari \$80,26 juta di tahun

⁴¹² *Ibid.*

⁴¹³ *Ibid.*

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ Cheunboran Chanborey, "Strengthening Cambodia-Australia Ties," *Khmer Times*, 16 Maret, 2016, <https://www.khmertimeskh.com/news/22862/strengthening-cambodia-australia-ties/>

2013.⁴¹⁸ Hal menarik lain, Kamboja menikmati surplus perdagangan dengan nilai lebih dari \$11 juta karena meningkatnya ekspor produk garmen, alas kaki, sepeda motor dan sepeda ke Australia yang sebagian nya adalah karena adanya *Generalized System of Preferences* (GSP) yang diberikan Australia kepada produk Kamboja sejak tahun 2003.⁴¹⁹

Selanjutnya, dari aspek hubungan diplomatis, hubungan antara Australia dan Kamboja atau sebaliknya juga sedang diperdalam di tahun 2012 dan 2014.⁴²⁰ Ditandai dengan sedang meningkatnya jumlah *high-level exchanges*⁴²¹. Dimulai pada tahun 2012, jumlah pejabat Australia yang mengunjungi Kamboja sedang meningkat diilustrasikan dengan adanya kedatangan Perdana Menteri Julia Gillard dan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr.⁴²² Dan pada tahun 2014 sendiri, Kamboja juga kembali menyambut kedatangan Julie Bishop selaku Menteri Luar Negeri Australia dan Menteri Imigrasi, Scott Morrison.⁴²³

Berikutnya, tahun 2013 Pemerintah Australia menginisiasi ‘New Colombo Plan’ dalam rangka mendukung pelajar Australia untuk mengambil studi dan melakukan magang di Kawasan Indo Pasifik.⁴²⁴ Sebagai bagian dari prakarsa tersebut, hasilnya Kamboja menerima sebanyak 99 pelajar Australia dan diperkirakan akan semakin meningkat

⁴¹⁸ *Ibid.*

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ *Ibid.*

⁴²¹ *Ibid.*

⁴²² *Ibid.*

⁴²³ *Ibid.*

⁴²⁴ *Ibid.*

dalam beberapa tahun selanjutnya.⁴²⁵ Dilihat dari hubungan antara kedua negara di aspek tradisional atau historis serta di waktu-waktu menjelang 2014 maupun di tahun 2014 nya sendiri, hubungan Australia dan Kamboja maupun sebaliknya terlihat baik-baik saja terutama di tahun 2013 dan 2014 yang mana malah semakin meningkatnya hubungan antar kedua negara.

Hubungan antara Australia dan Kamboja yang dalam posisi baik-baik saja bahkan cenderung meningkat ini akhirnya bisa mendorong Kamboja bersedia untuk menerima pengungsi jalur laut dari Nauru OPC yang dikirim oleh Australia, terlepas dari setiap permasalahan yang masih ada di Kamboja itu sendiri. Australia pun, sebagai negara pengirim, mendapatkan sinyal positif dari penerimaan yang diberikan Kamboja terhadap *boat people*. Penerimaan Kamboja tersebut membuat Australia semakin yakin untuk mengirimkan para *boat people* yang ada di Nauru OPC ke Kamboja.

Oleh karena itu, penulis menilai parameter hubungan antara Australia dengan Kamboja (negara pengirim-negara penerima) menjadi salah satu faktor Australia untuk mengambil keputusan dengan menandatangani RSA. Hubungan yang baik dan semakin meningkat menegaskan hubungan baik antara kedua negara ini yang tentu saja melancarkan proses RSA.

⁴²⁵ *Ibid.*

5.3 Variabel Local Absorption Capacity

Variabel *local absorption capacity* atau kapasitas penyerapan lokal, akan dianalisa terkait dua indikator yaitu indikator kapasitas ekonomi dan keterbukaan sosial. Indikator yang akan dianalisa terlebih dahulu adalah indikator kapasitas ekonomi yang mempunyai empat parameter. Lalu dilanjutkan dengan analisa indikator keterbukaan sosial yang diikuti sebanyak empat parameter.

5.3.1. Kapasitas Ekonomi

5.3.1.1. Ketersediaan Tanah

Kapasitas ekonomi suatu negara untuk menyerap pengungsi atau menerima pengungsi ditentukan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan tanah, daya dukung lahan, pola pekerjaan serta infrastruktur. Ketersediaan tanah atau lahan ini menjadi faktor atau parameter nomor satu dalam kapasitas ekonomi.⁴²⁶ Dalam parameter ini Jacobsen mengatakan bahwa daerah yang penduduknya padat biasanya tidak mempunyai lahan atau tanah untuk mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak.⁴²⁷

Dan di indikator kapasitas ekonomi tersebut, terdapat satu kalimat yang patut diperhatikan untuk menganalisa beberapa faktor atau parameter yang ada di kapasitas ekonomi. Kalimat tersebut adalah, kapasitas ekonomi yang tinggi memungkinkan komunitas

⁴²⁶ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

⁴²⁷ *Ibid.*

yang ada untuk mengatasi permintaan sumber daya yang dibebankan oleh pengungsi.⁴²⁸ Australia mempunyai area seluas 7,692,024 km persegi⁴²⁹ dan dalam halaman website The Telegraph, media tersebut melakukan penelitian “*The 10 Least Densely Populated*” negara di dunia berdasarkan angka terbaru yang tersedia dari Divisi Populasi PBB.⁴³⁰

Hasilnya, Australia menduduki posisi ketujuh negara di dunia yang paling tidak padat penduduknya yang setelah itu disusul oleh Iceland, Suriname dan Botswana. Penelitian tersebut diukur dalam jumlah orang per kilometer persegi.⁴³¹ Sedangkan menurut data yang diterbitkan oleh OECD pada 11 Agustus 2014, populasi masyarakat Australia dalam *million persons* berjumlah 23.4 juta sangat berbeda dibandingkan dengan populasi yang ada di Amerika Serikat yaitu sebanyak 319 juta orang.⁴³² Berikut di halaman selanjutnya penulis sajikan data berbentuk grafik dari OECD tahun 2014,

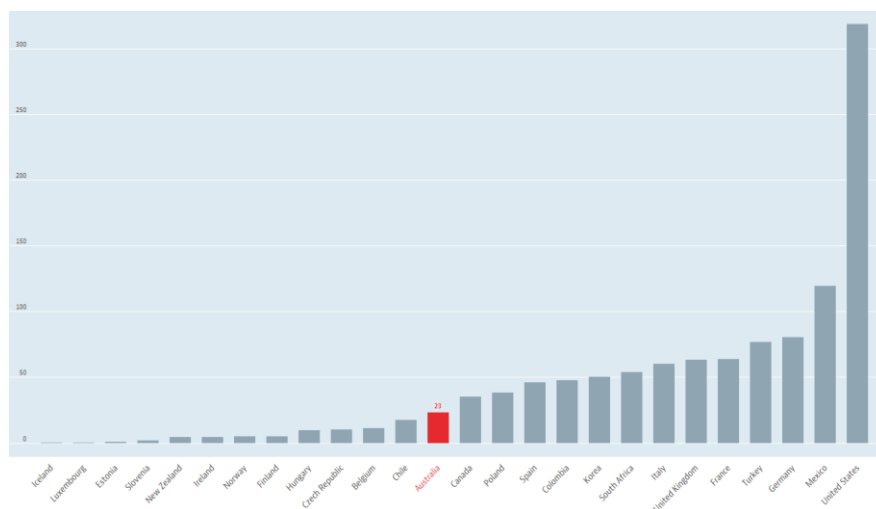
⁴²⁸ *Ibid.*,

⁴²⁹ “Land Areas of States and Territories,” Australian Government, diakses 10 April, 2018, <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories>

⁴³⁰ Lizzie Porter, “Mapped: The World’s Most – and Least – Crowded Countries,” *The Telegraph*, 11 Juli, 2017, <https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/The-wrlds-least-densely-populated-countries/>

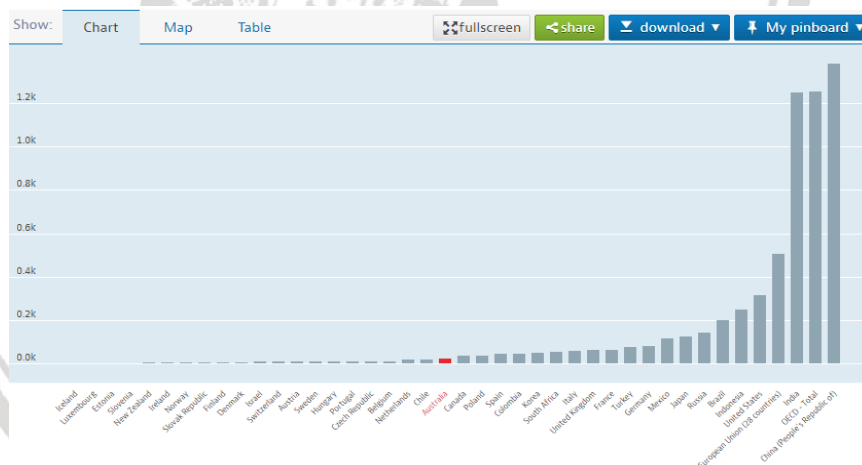
⁴³¹ *Ibid.*,

⁴³² “Population,” OECD, diakses 10 April, 2018, <https://data.oecd.org/pop/population.htm>



Gambar 7: Perbandingan jumlah populasi beberapa negara tahun 2014. Grafik berwarna merah merupakan Australia⁴³³

Lalu di tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, populasi penduduk Australia lebih sedikit dibandingkan tahun 2014 yaitu berjumlah 23 juta.⁴³⁴ Dibawah ini juga merupakan tabel dari OECD namun adalah data tahun 2013⁴³⁵,



Gambar 8: Perbandingan jumlah populasi beberapa negara tahun 2013. Grafik berwarna merah merupakan Australia.⁴³⁶

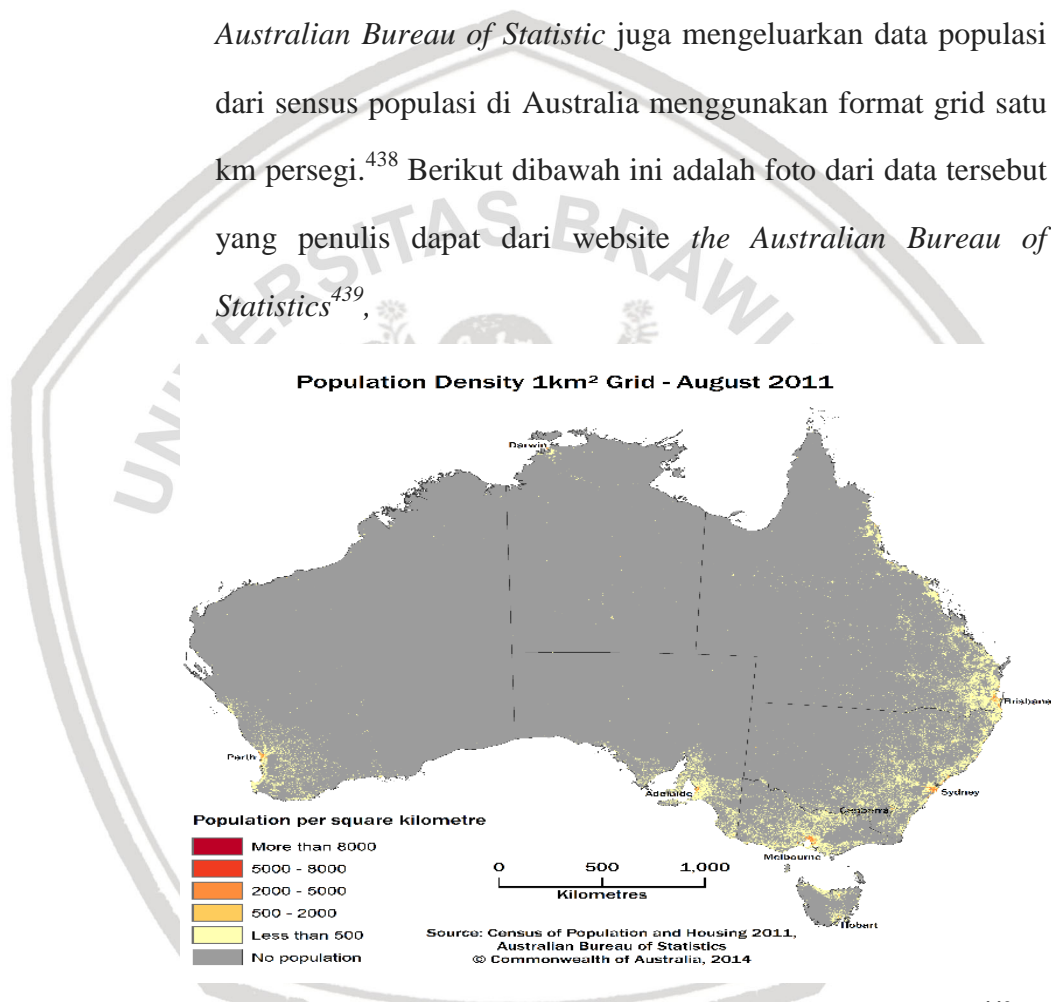
⁴³³ *Ibid.*

⁴³⁴ *Ibid.*

⁴³⁵ *Ibid.*

⁴³⁶ *Ibid.*

Data yang penulis dapat dari OECD tersebut tidak berbeda dengan jumlah populasi Australia yang tertulis di halaman website The Telegraph tahun 2017 bahwa populasi Australia yang berjumlah 23 juta membuat negara tersebut menjadi negara ketujuh dalam kategori negara di dunia yang mempunyai populasi paling tidak padat.⁴³⁷ Pada tahun 2011, *the Australian Bureau of Statistic* juga mengeluarkan data populasi dari sensus populasi di Australia menggunakan format grid satu km persegi.⁴³⁸ Berikut dibawah ini adalah foto dari data tersebut yang penulis dapat dari website *the Australian Bureau of Statistics*⁴³⁹,



Gambar 9: Kepadatan penduduk di Australia tahun 2011⁴⁴⁰

Gambar di atas menunjukkan bahwa populasi di Australia sebagian besar tinggal di daerah pesisir dan area di tengah negara

⁴³⁷ Lizzie Porter, Loc.Cit.

⁴³⁸ "Australian Population Grid 2011," Australian Bureau of Statistics, diakses 10 April, 2018, <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1270.0.55.007>

⁴³⁹ *Ibid.*

⁴⁴⁰ *Ibid.*

tersebut dapat dikatakan kosong. Di tahun 2011 tersebut, populasi Australia berjumlah 22.3 juta⁴⁴¹, tidak berbeda jauh dengan jumlah populasi di tahun 2014 yaitu sebanyak 23.4 juta.⁴⁴² Yang maka dari itu kemungkinan besar peta kepadatan penduduk di Australia tahun 2014 hampir mempunyai kesamaan dengan peta kepadatan tahun 2011 yang dimana sebagian besar lahan, kosong.

Di halaman website *Real Australia Travel* turut disebutkan bahwa 85% dari populasi Australia tinggal berjarak 50 kilometer dari garis pantai.⁴⁴³ Informasi tersebut sejalan dengan peta yang dipublikasi oleh *the Australian Bureau of Statistic*, ditandai oleh warna kuning di garis pantai dan hanya warna keabuan mendekati area tengah Australia.

Selain itu, kepadatan penduduk di Australia yang rendah juga didukung dengan informasi bahwa hanya terdapat 3 orang per kilometer persegi dari luas lahan, di tahun 2014.⁴⁴⁴ Berbeda sekali dengan Macao SAR, China yang mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 19,432 orang per kilometer persegi dari luas lahan dengan tahun yang sama dari penghitungan kepadatan penduduk di Australia.⁴⁴⁵ Untuk analisa parameter ketersediaan lahan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jacobsen, ketersediaan tanah atau lahan berhubungan dengan padat atau

⁴⁴¹ "Population," OECD, diakses 28 April, 2014. <https://data.oecd.org/pop/population.htm>

⁴⁴² *Ibid.*,

⁴⁴³ "Australia Facts," Real Australia Travel, diakses 10 April, 2018, <http://www.realaustraliatravel.com/australia-facts.html>

⁴⁴⁴ "Population Density (People per sq km of land area)," The World Bank, diakses 10 April, 2018, <https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?end=2014&start=1961>

⁴⁴⁵ *Ibid.*

tidaknya penduduk disebuah negara karena jika daerah yang penduduknya padat biasanya tidak mempunyai lahan atau tanah untuk mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak.

Dilihat dari pernyataan Jacobsen dan dihubungkan dengan data dan fakta yang telah penulis dapat, Australia bukan merupakan negara yang mempunyai penduduk padat yang maka dari itu seharusnya Australia mempunyai lahan atau tanah untuk mendukung pendatang baru dalam jumlah banyak mengingat area luas negara nya adalah seluas 7,692,024 km persegi.

Oleh karena nya, penulis menganalisa parameter ketersediaan tanah tidak mempunyai pengaruh dalam keputusan Australia menandatangani RSA yang tergolong dalam respon kebijakan pemerintah *endangering their safety* kepada pengungsi. Karena seharusnya dengan keadaan Australia seperti itu, negara ini dapat menerima pengungsi karena penduduk nya tidak padat dan mengarah ke jenis respon pemerintah yang menurut Jacobsen sendiri adalah *generous*, bukan *restrictive* atau *endangering their safety* seperti yang faktanya dilakukan oleh Australia dengan Kamboja tahun 2014.

5.3.1.2. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan salah satu parameter yang ada di indikator kapasitas ekonomi diantara tiga parameter lainnya yaitu ketersediaan lahan, infrastruktur dan pola pekerjaan. Tiga parameter yaitu ketersediaan lahan, daya dukung lahan serta infrastruktur sifat nya adalah berkaitan

dengan adanya faktor saling mempengaruhi antara kelompok pengungsi yang banyak dengan dampaknya pada lahan yang tersedia serta kualitas ketersediaan air dan tanah yang dimana gelombang pengungsi dianggap memaksakan ekosistem yang ada.⁴⁴⁶

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalimat dibawah ini menjadi penting dalam menganalisa seluruh empat parameter yang ada di indikator kapasitas ekonomi, “*High economic capacity enables a community to cope with the resource demands imposed by refugees.*”⁴⁴⁷ Daya dukung lahan ini dapat dioperasionalkan menjadi daya dukung air dan kualitas tanah di Australia untuk menerima pengungsi. Jenis tanah di Australia cenderung tipis dan tidak subur.⁴⁴⁸ Untuk menganalisa parameter ini, perlu untuk terlebih dahulu dipaparkan mengenai kepadatan penduduk di Australia serta luas tanah di Australia itu sendiri.

Australia adalah negara terbesar keenam setelah Rusia, Kanada, China, Amerika Serikat dan Brazil. Dalam kilometer persegi, daerah daratan Australia ialah 7.659.861 dan daerah pulau nya seluas 32.163, dengan total nya 7.692.024 kilometer

⁴⁴⁶ Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx,” *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

⁴⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴⁸ “Geografi Australia: Number of People,” Australian Government, diakses 3 April, 2018, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab08/untuk.html>

persegi.⁴⁴⁹ Walaupun mempunyai lahan yang luas, kepadatan penduduk di Australia sangat rendah.⁴⁵⁰ Dibuktikan dengan data CIA Factbook tahun 2014 yang juga diunduh di website Photius.com dimana kepadatan penduduk Australia dihitung menurut *person per sq km*, mempunyai nilai 2.90.

Berbeda sekali dengan China yang mempunyai nilai setinggi 141.02.⁴⁵¹ Dan sudah dikenal bahwa masyarakat Australia sebagian besar nya tinggal di sekitar garis pantai yang membuat sekitar 7,7 juta kilometer persegi tanah Australia tidak berpenghuni atau kosong.⁴⁵² Disini, terdapat hubungan antara lahan yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah dan mengapa masyarakat Australia sebagian besar tinggal di sekitar garis pantai. Australia mempunyai lahan yang luas namun jumlah lahan yang bisa dihuni, terbatas, karena sebagian besar wilayah Australia kering dan sebenarnya Australia termasuk benua berpenghuni paling gersang di dunia dan kekeringan merupakan salah satu ciri iklim yang selalu ada di banyak wilayah di Australia.⁴⁵³

⁴⁴⁹ "Area of Australia – States and Territories," Australian Government, diakses 3 April, 2018, <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories>

⁴⁵⁰ "Geografi Australia: Number of People," Loc.Cit.

⁴⁵¹ "Population Density – Persons Per Sq Km 2014 Country Ranks, Alphabetical," Photius, diakses 3 April 2018, https://photius.com/rankings/geography/population_density_persons_per_sq_km_2014_1.html

⁴⁵² Leith Huffadine, "Maps Show Just How Empty Australia Really Is! How the Population Clings to the Coast and Jams Into Tiny Urban Clusters, *Daily Mail UK*, 16 November, 2015, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3320021/Maps-just-Australia-really-population-clings-coast-jams-tiny-urban-clusters.html>

⁴⁵³ "Geografi Australia: Number of People," Australian Government, diakses 3 April, 2018, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab08/untuk.html>

Oleh karena nya, banyak wilayah di lingkungan Australia dianggap sangat rapuh.⁴⁵⁴ Jadi singkatnya, Australia mempunyai lahan awal yang luas serta diantaranya masih banyak yang kosong, namun sedikit dari tanah atau lahan tersebut yang bisa dihuni. Didukung dengan keadaan bahwa area gurun di Australia mempunyai temperatur sangat hangat dan menjadi salah satu lokasi yang sulit dalam hal bertahan hidup untuk tanaman, manusia maupun hewan.⁴⁵⁵ Total ukuran dari gurun di Australia sendiri adalah sebanyak 2.3 juta kilometer persegi dan menempati 44% dari seluruh area di Australia.⁴⁵⁶ Data di website Australian Government juga menyatakan bahwa *arable land* atau tanah subur di Australia hanya 6% dari daratan Australia.⁴⁵⁷

Lalu, mengenai daya dukung air yang mempunyai hubungan erat dengan keadaan keamanan air di Australia, disini penulis akan menyajikan data dari publikasi yang dikeluarkan oleh Institut Penelitian *Future Directions International* (FDI) pada 16 September 2014.⁴⁵⁸ Dalam publikasi tersebut terdapat beberapa poin-poin penting yang diantaranya adalah, Australia hanya menerima sedikit lebih dari satu persen dari sumber air

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ 'Australia Desert,' Australia On Net, diakses 28 April, 2018, <http://www.australiaonnet.com/tourism/deserts.html>

⁴⁵⁶ *Ibid.*

⁴⁵⁷ "Our Natural Environment," Australian Government, diakses 3 April, 2018, <https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-natural-environment>

⁴⁵⁸ "Australia's Water Security Part 1: Water Resources," Future Directions, diakses 28 April, 2018, http://www.futuredirections.org.au/publication/australia-s-water-security-part-1-water-resources/#_ftn2

tawar yang ada di dunia.⁴⁵⁹ Berhubungan dengan hal tersebut, *water run-off* di Australia juga jauh dengan pusat populasi, industri dan pertanian di Australia yang mana tiga pusat tersebut berlokasi di daerah pantai dan Selatan Australia sedangkan sebanyak 50% *water run-off* tersedia di daerah Utara Australia yang memiliki iklim tropis dan sub tropis.⁴⁶⁰

Poin penting lainnya, sekitar 85 hingga 95% curah hujan di Australia hilang karena evaporasi atau transpirasi yang berakhir dengan hanya lima hingga 10% curah hujan tahunan Australia mencapai sungai, lokasi penyimpanan air dan akuifer air tanah.⁴⁶¹ Selanjutnya, di bagian akhir dari publikasi FDI tersebut, disimpulkan dengan judul '*Australia Current Water Environment*' bahwasanya hanya lima hingga satu persen dari sumber daya air di Australia yang dapat diakses untuk konsumsi.⁴⁶² Serta dengan adanya curah hujan yang sangat tinggi di beberapa wilayah di Australia, hal tersebut membuat tantangan lebih lanjut dalam menyimpan dan mengakses air di Australia.⁴⁶³

Dapat dilihat dari informasi yang telah penulis sampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa daya dukung air maupun tanah yang dimiliki Australia kurang baik

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ *Ibid.*

⁴⁶¹ *Ibid.*

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ *Ibid.*

ditandakan dengan kondisi tanah nya yang kurang subur dan dalam mendapatkan air masih tergolong tidak mudah, walaupun Australia termasuk negara maju. Disini salah satu kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh Australia tidak tinggi karena keadaan yang sudah disebutkan tersebut.

Oleh karena nya, parameter daya dukung lahan menjadi parameter yang berpengaruh karena kapasitas ekonomi nya dalam hal ini tidak tinggi dan dapat mengarah kepada keraguan untuk menerima pengungsi dalam jumlah banyak karena keadaan asli di Negara Australia sendiri tidak terlalu baik dalam kualitas tanah dan daya dukung air nya. Jika Australia memaksakan untuk menerima pengungsi dalam jumlah banyak di wilayahnya, menurut penulis hal tersebut akan mengancam kondisi sumber daya alam nya yang awalnya memang sudah tidak terlalu baik dan bagus.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah Jacobsen sendiri katakan bahwa ketika kapasitas ekonomi rendah, respon kebijakan yang lahir akan negatif yang dalam hal ini parameter daya dukung lahan dikatakan berpengaruh karena kapasitas daya dukung lahan rendah yang mengakibatkan keputusan RSA ditandatangani oleh Australia dimana keputusan RSA sendiri adalah keputusan dengan jenis respon kebijakan pemerintah yang negatif.

Terlebih lagi, walaupun Australia mempunyai area seluas 7,692,024 km persegi, 40% wilayah di Australia tidak dapat ditinggali atau *uninhabitable* karena cuaca nya terlalu panas di tengah-tengah gurun.⁴⁶⁴ Dan BBC turut mengatakan bahwa daratan besar di pusat Australia sudah terlalu kering untuk menampung banyak orang.⁴⁶⁵

5.3.1.3. Pola Pekerjaan

Dalam parameter pola pekerjaan ini, dikatakan bahwa ancaman yang dirasakan oleh masyarakat lokal di negara tuan rumah akan lebih kecil atau lebih sedikit jika para pengungsi mempunyai keterampilan di pertanian, dapat berkontribusi di tenaga kerja dan pasar modal.⁴⁶⁶ Penelitian terkait pekerjaan dari pengungsi maupun pencari suaka yang sampai di Australia sejak tahun 2007 sebelum dikirim ke *Offshore Processing* sendiri termasuk sedikit jumlahnya, seperti apa yang tertulis di jurnal yang ditulis oleh Caroline Fleay, Anita Lumbus dan Lisa Hartley dengan judul “*People Seeking Asylum in Australia and their Access to*

⁴⁶⁴ “Australia Facts,” Real Australia Travel, diakses 10 April, 2018, <http://www.realaustraliatravel.com/australia-facts.html>

⁴⁶⁵ Richard Grey, “How Can We Manage Earth’s Land?,” *BBC*, 29 Juni, 2017, <http://www.bbc.com/future/story/20170628-how-to-best-manage-earths-land>

⁴⁶⁶ Karen Jacobsen, “Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx,” *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

Employment: Just What Do We Know?" di *Cosmopolitan Civil Societies Journal: An Interdisciplinary Journal* tahun 2016.⁴⁶⁷

Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pengungsi dan pencari suaka yang sampai menggunakan perahu pada tahun 2010 hingga 2011, empat dari sebelas peserta yang sampai telah memegang pengalaman pekerjaan terkait konstruksi bangunan, dua diantaranya mempunyai pengalaman manajemen perhotelan, satu individu lain terkait pengalaman nya di bidang TIK dan yang lainnya dalam bidang teknik.⁴⁶⁸ Semua peserta tersebut sebelumnya mendekam dalam penahanan imigrasi (sekitar lima hingga 21.5 bulan) dimana pada saat itu sekelompok individu tersebut belum dapat menggunakan kemampuan kerja mereka.⁴⁶⁹

Selanjutnya, terdapat hasil kajian lain yang menggunakan sebanyak 29 peserta untuk penelitian nya.⁴⁷⁰ Hasil dari penelitian tersebut, sebagian besar pencari suaka yang datang melalui perahu sejak 13 Agustus 2012 mempunyai pengalaman kerja dan atau pendidikan tinggi sebelum tiba di Australia.⁴⁷¹ Namun sayangnya, mereka yang tiba di Australia menggunakan perahu setelah tanggal

⁴⁶⁷ Caroline Fleay, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley, "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?" *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8 (2) 2016, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>

⁴⁶⁸ *Ibid.*

⁴⁶⁹ (Fleay, Hartley & Kenny 2013, p. 481) dalam Caroline Fleay, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley, "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?" *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8 (2) 2016, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>

⁴⁷⁰ (Hartley & Fleay 2014, p. 17) dalam Caroline Fleay, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley, "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?" *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8 (2) 2016, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>

⁴⁷¹ *Ibid.*

13 Agustus 2012 dan yang telah dilepas ke komunitas Australia dari tahanan imigrasi, tidak dapat bekerja setidaknya sampai tahun 2015 karena mereka tidak diberikan hak untuk bekerja oleh Australia.⁴⁷²

Lalu pada akhir paragraf jurnal yang ditulis oleh Caroline Fleay dan kawan-kawan yaitu tepatnya pada bagian kesimpulan, disimpulkan bahwa karena terdapat jumlah yang sedikit dalam mendokumentasikan kemampuan dan pengalaman dari pengungsi yang mencari suaka di Australia sejak tahun 2007, jurnal ini menyimpulkan sementara bahwa setidaknya beberapa diantara mereka tiba di Australia dengan membawa kemampuan dan kualifikasi yang besar⁴⁷³. Terlebih lagi terdapat penelitian Australia dan penelitian internasional lainnya yang mengatakan bahwa individu yang mempunyai latar belakang pengungsi sangat termotivasi untuk bekerja dan menjadi independent secara ekonomi.⁴⁷⁴

Namun rupanya, walaupun pengungsi yang datang menggunakan perahu ke Australia terlihat membawa beberapa kemampuan dan sumber daya seperti apa yang telah penulis jelaskan di halaman sebelumnya, terutama yang terjadi di tahun 2010 hingga 2011, poling opini pada tahun 2010 yang dilakukan

⁴⁷² *Ibid.*

⁴⁷³ *Ibid.*

⁴⁷⁴ (Fleay, Hartley & Kenny 2013; Hyndman & McLean 2006; Phullimore & Goodson 2006) dalam Caroline Fleay, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley, "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?" *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8 (2) 2016, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>

oleh Lowy Institute melihat bahwa terdapat sebanyak 75% masyarakat Australia yang khawatir dan gelisah terkait adanya pencari suaka atau pengungsi tidak sah yang datang ke Australia menggunakan perahu⁴⁷⁵.

Adanya rasa gelisah tersebut juga mungkin mempunyai hubungan antara kata-kata atau istilah politik yang dilontarkan dari pejabat pemerintah Australia kepada mereka yang tiba di Australia melalui jalur laut dengan sikap masyarakat yang berakhir pada persepsi masyarakat Australia ke pengungsi atau pencari suaka perahu seperti hasil dari poling opini terkait.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan di jurnal yang ditulis oleh Caroline Fleay dan kawan-kawan bahwasanya anggota komunitas yang lebih berprasangka terhadap orang-orang yang mencari suaka mendukung representasi negatif sama seperti apa yang diidentifikasi dalam politik, contohnya '*queue jumpers*', '*illegals*' dan '*not genuine refugees*'.⁴⁷⁶ Dari beberapa informasi dan fakta di halaman-halaman sebelumnya, penulis dapat menganalisa bahwa para parameter pola pekerjaan adalah sifatnya berpengaruh dalam keputusan Australia menandatangani RSA karena masyarakat lokal Australia masih merasa terancam dengan

⁴⁷⁵ (Lowy Institute, 2010) dalam Fiona H, Mckay, Samantha L, Thomas dan Susan, Kneebone, "It would be okay if they came through the proper channels: community perceptions and attitudes toward asylum seekers in Australia," *Journal of Refugee Studies* Vol. 25, no. 1 (2012): 2, doi: 10/1093/jrs/fer010

⁴⁷⁶ Pedersen, Watt & Hansen 2006; Suhnan, Pedersen & Hartley 2012) dalam Caroline Fleay, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley, "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?" *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8 (2) 2016, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>

adanya pencari suaka dan pengungsi yang datang melalui jalur laut ke negara nya.

Rasa ancaman tersebut dapat mengarah kepada respon kebijakan yang *restrictive*. Terlebih lagi fungsi poling opini yang dilakukan Pemerintah Australia adalah untuk menyediakan informasi kepada pemerintah mengenai apakah mereka sejalan dengan opini publik terkait isu-isu spesifik.⁴⁷⁷ Sebenarnya di jurnal nya, Jacobsen mengatakan bahwa rasa ancaman yang dirasakan masyarakat lokal akan lebih sedikit ketika pengungsi membawa sumber daya seperti keterampilan atau kemampuan di pertanian, tenaga kerja dan pasar modal.⁴⁷⁸ Dan biasanya negara yang makmur dan terpadang akan lebih merasakan manfaat dari adanya gelombang pengungsi dibandingkan dengan negara-negara miskin.⁴⁷⁹

Namun nampaknya, walaupun pengungsi jalur laut tersebut membawa dan mempunyai beberapa kemampuan di tahun 2010-2011 yaitu sekitar tiga hingga empat tahun sebelum tahun 2014 seperti yang telah dijelaskan, di tahun 2010 terdapat hasil poling opini yang menyebutkan bahwa masyarakat Australia masih merasa terancam akan adanya pencari suaka maupun pengungsi yang datang melalui perahu. Jadi pada intinya, masyarakat

⁴⁷⁷ (Brett dan Moran 2006) dalam Fiona H, McKay et.al, Op.Cit.,2012, hlm 3.

⁴⁷⁸ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

⁴⁷⁹ *Ibid.*

Australia masih merasa terancam walaupun mereka memiliki kemampuan dalam bidangnya yang mana menyebabkan respon kebijakan pemerintah akan lebih pada arah *restrictive* karena adanya rasa terancam tersebut atau dalam arti lain, parameter ini mempunyai pengaruh.

Ketika masyarakat merasa terancam terkait pola pekerjaan pengungsi terkait, respon kebijakan yang lahir akan negatif yang mana dalam hal ini, RSA tergolong menjadi respon kebijakan pemerintah yang negatif karena termasuk jenis kebijakan *endangering their safety* menurut Jacobsen.

5.3.1.4. Infrastruktur

Pada parameter infrastruktur ini, Jacobsen sendiri tidak menyebutkan lebih rinci di jurnal model nya. Dalam model nya, Jacobsen hanya mencantumkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kota.⁴⁸⁰ Namun disini penulis ingin lebih rinci dalam menganalisis parameter infrastruktur yang oleh karena nya penulis juga menemukan rincian dari parameter infrastruktur tersebut dalam tulisan Jacobsen lain berjudul '*Can refugees benefit the state? Refugee resources and African Statebuilding*'.⁴⁸¹ Dalam tulisan tersebut, terdapat rincian infrastruktur yang juga ada didalam *UNHCR'S Refugee Affected programmes*.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ Karen Jacobsen, "Can refugees benefit the state? Refugee resources and African statebuilding," *Journal of Modern African Studies* 40, 4 (2002): 577-596, DOI: 10.1017/S0022278X02004081

Rincian tersebut adalah infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, klinik kesehatan serta sekolah. Rincian infrastruktur tersebut biasanya digunakan Program UNHCR untuk membantu negara terkait membantu pengungsi.⁴⁸² Lalu kembali lagi kepada model Jacobsen bahwa kapasitas ekonomi yang tinggi akan lebih memungkinkan kemampuan komunitas lokal untuk menerima permintaan sumber daya yang diminta oleh pengungsi, lebih baik. Oleh karena nya parameter infrastruktur dapat disimpulkan kualitas infrastruktur di Australia baik atau tidak karena kapasitas ekonomi yang tinggi mempunyai arti kualitas tertentu di sebuah negara adalah baik.

Pertama, kualitas jalan di Australia. Telah dijelaskan di parameter kelemahan kelembagaan sebelumnya, bahwa di tahun 2014 menurut *International LPI Ranking* yang dikeluarkan oleh *World Bank*, Australia masuk ke dalam 12 besar diantara 160 negara dalam kualitas infrastruktur yang terdiri kualitas perdagangan dan transportasi yang berhubungan dengan infrastruktur seperti pelaburan, rel kereta api, jalan raya dan teknologi informasi.⁴⁸³ Australia mencetak angka 4.00 di kualitas infrastruktur LPI sementara Jerman menduduki posisi pertama diangka 4.32.⁴⁸⁴

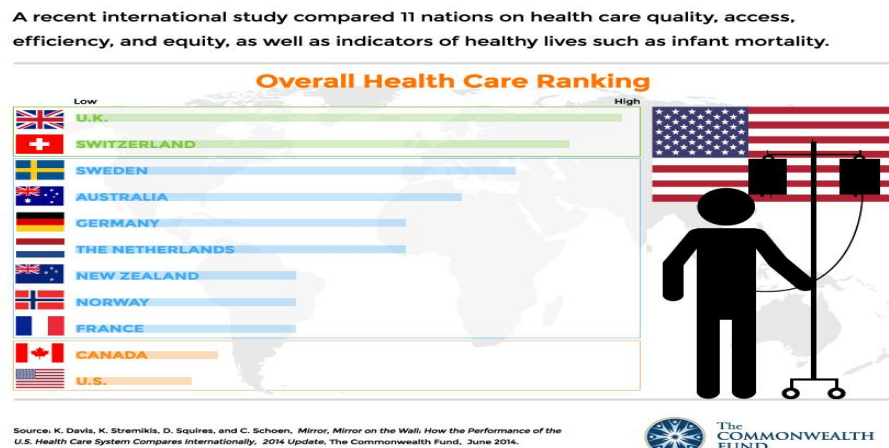
⁴⁸² *Ibid.*

⁴⁸³ "Global Rankings 2014," The World Bank, diakses 3 April, 2018, <https://lpi.worldbank.org/international/global/2014>

⁴⁸⁴ *Ibid.*

Lalu, mengenai kualitas kesehatan Australia dapat dilihat

dari gambar berikut ini.



Gambar 10: *Ranking* 11 negara terkait layanan kesehatan tahun

2014. Australia ada di posisi ke-4⁴⁸⁵

Dapat dilihat dari gambar diatas, Australia berada diposisi keempat dalam hal *health care ranking* menurut penelitian yang dilakukan oleh K. Davis, K. Stremikis, D. Squires dan C. Schoen di *Mirror, Mirror on the Wall* tahun 2014 tanggal 16 Juni yang dipublikasi oleh *the Common Wealth Fund*.⁴⁸⁶ *Health care* tersebut dihitung berdasarkan kualitas, akses, *efficiency*, *equity* dan *healthy lives*.⁴⁸⁷ Kualitas adalah mengenai perawatan yang efektif, aman, terkoordinasi dan berpusat pada pasien.⁴⁸⁸

⁴⁸⁵ “Mirror, Mirror on the Wall, 2014 Update: How the US Health Care System Compares Internationally,” *Common Wealth Fund*, diakses 11 April, 2018, <http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror>

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ *Ibid.*

⁴⁸⁸ *Ibid.*

Lalu akses terdiri dari keterjangkauan dan ketepatan waktu.⁴⁸⁹ Yang ketiga atau efisiensi terdiri dari salah satunya rekam medis dan usaha yang dihabiskan untuk mengurus dokumen.⁴⁹⁰ Equity atau keadilan membandingkan kinerja untuk individu berpenghasilan lebih tinggi dan lebih rendah di masing-masing negara⁴⁹¹ dan terakhir adalah *healthy lives* yang mencakup kematian, kematian bayi dan angka harapan hidup sehat.⁴⁹² Infrastruktur kesehatan Australia juga termasuk tinggi.⁴⁹³

Definisi dari infrastruktur kesehatan sendiri adalah fasilitas fisik yang memudahkan jalannya perawatan seperti laboratorium, pelatihan dan fasilitas pendukung lainnya; persediaan obat-obatan dan bahan lain yang dapat diandalkan.⁴⁹⁴ Lalu adanya staf terlatih dan sistem pelatihan nya profesional.⁴⁹⁵ Juga terdapat mekanisme untuk mendistribusikan sumber daya serta keahlian kepada orang-orang yang butuh.⁴⁹⁶ Sistem yang memadai tersebut nantinya

⁴⁸⁹ "The United States Health System Falls Out," *Common Wealth Fund*, diakses 11 April, 2018, <http://www.commonwealthfund.org/interactives/2017/july/mirror-mirror/>

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ *Ibid.*

⁴⁹² "Mirror, Mirror on the Wall, 2014 Update: How the US Health Care System Compares Internationally," Loc.Cit.

⁴⁹³ The Economist. Juni 2017. *Global Access to Health Care: Building Sustainable Health System*. <http://accesstohealthcare.eiu.com/wp-content/uploads/sites/42/2017/06/Globalaccesstohealthcare-3.pdf>

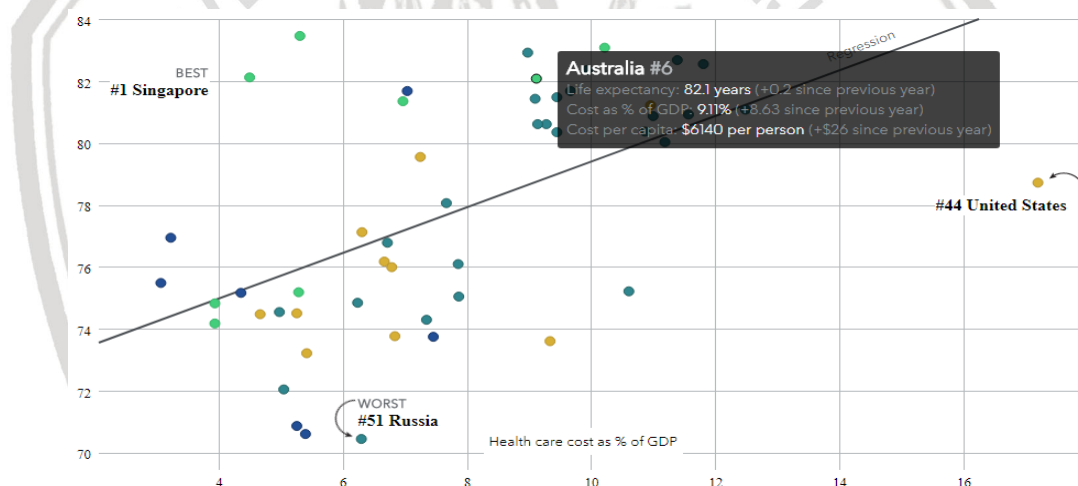
⁴⁹⁴ "Health Care Infrastructure," IZUMI Foundation, diakses 11 April, 2018, <http://izumi.org/about/how-we-work/health-care-infrastructure/>

⁴⁹⁵ *Ibid.*

⁴⁹⁶ *Ibid.*

mampu memberikan perawatan preventif, diagnostik dan kuratif, sesuai dengan kebutuhan individu yang dilayani.⁴⁹⁷

Publikasi dari website Bloomberg tanggal 18 September 2014 yang juga bersumber dari *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *World Health Organization (WHO)* dan *Hongkong Department of Health* disebutkan bahwa Australia menempati posisi keenam dalam kategori *Most Efficient Health Care* dengan Singapura menjadi negara posisi pertama. Berikut adalah gambar dari ranking tersebut,



Gambar 11: Ranking perawatan kesehatan paling efisien tahun 2014.

Australia menduduki posisi keenam.⁴⁹⁸

Posisi keenam yang ditempati oleh Australia merupakan sebuah peningkatan karena sebelumnya yaitu tahun 2013, Australia

⁴⁹⁷ *Ibid.*

⁴⁹⁸ "Where Do You Get the Most For Your Health Care Dollar?," *Bloomberg*, diakses 13 Mei, 2018, <https://www.bloomberg.com/graphics/infographics/most-efficient-health-care-around-the-world.html>

menempati posisi ketujuh. Berikut tabel yang menunjukkan hal tersebut,

Rank 2014	Rank 2013	Country	Efficiency score	Life expectancy	Health-care cost as percentage of GDP	Health-care cost per capita (US\$)	Change in life expectancy (years)	Change in health-care cost per capita (US\$)	Change in health-care cost per capita (%)	Change in GDP per capita (%)	Inflation (%)
1	2	Singapore	78.6	82.1	4.5	2,426	0.40	281.73	13.1	2.2	4.5
2	1	Hong Kong SAR	77.5	83.5	5.3	1,944	0.06	535.68	38.0	4.5	4.1
3	6	Italy	76.3	82.9	9.0	3,032	0.30	-306.64	-9.2	-8.6	3.0
4	3	Japan	68.1	83.1	10.2	4,752	0.50	110.93	2.4	0.7	0.0
5	8	South Korea	67.4	81.4	7.0	1,703	0.40	50.11	3.0	1.2	2.2
6	7	Australia	65.9	82.1	9.1	6,140	0.20	25.62	0.4	8.6	1.8

Gambar 12: *Ranking* perawatan kesehatan paling efisien dan perbandingan posisi tahun 2013 dan 2014⁴⁹⁹

Tabel diatas juga termasuk dalam kategori *Most Efficient Health Care* yang diterbitkan oleh Bloomberg yang juga bersumber dari *World Bank*, IMF, WHO dan *Hongkong Department of Health* namun perbedaan nya tabel tersebut juga melihatkan posisi yang ditempati masing-masing negara pada tahun 2013.⁵⁰⁰ Metodologi dari Bloomberg sendiri dalam memberikan peringkat kepada negara-negara adalah berdasarkan efisiensi dari sistem perawatan kesehatan yang diturunkan menjadi penghitungan harapan hidup, biaya relatif perawatan kesehatan per kapita serta biaya mutlak perawatan kesehatan per kapita.⁵⁰¹ *Absolute Cost* atau biaya mutlak perawatan kesehatan mencakup total pengeluaran kesehatan termasuk pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif.⁵⁰²

⁴⁹⁹ "Most Efficient Health Care 2014: Countries," Ospedale Sicuro, diakses 23 April, 2018, <http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf>

⁵⁰⁰ *Ibid.*

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid.*

Dari penjelasan sebelumnya mengenai *absolute cost*, dapat dihubungkan bahwa pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif sudah termasuk di penghitungan Bloomberg dan dari definisi infrastruktur kesehatan yang juga telah disebutkan sebelum ini, sistem yang memadai di fasilitas kesehatan akan dapat memberikan perawatan yang preventif, diagnostik dan kuratif sesuai dengan kebutuhan individu yang dilayani. Jadi, jika terdapat sebuah negara yang menduduki posisi tinggi dalam penghitungan Bloomberg, juga berarti bahwa infrastruktur kesehatan nya baik karena terdapat hubungan antara pelayanan kesehatan yang preventif dan kuratif dengan sistem yang memadai dalam fasilitas kesehatan.

Disini, menurut tabel yang dikeluarkan oleh Bloomberg, Australia berada dalam posisi tinggi yaitu posisi ketujuh di tahun 2013 dan mengalami peningkatan tahun 2014 dengan menempati posisi keenam.⁵⁰³ Dari tabel tersebut dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa di penghitungan *absolute cost* yaitu pelayanan kesehatan yang kuratif dan preventif, infrastruktur kesehatan di Australia termasuk baik karena pelayanan kesehatan yang kuratif dan preventif dapat membawa Australia di salah satu posisi teratas dibandingkan negara-negara lainnya. Menurut website Perusahaan Strategy& juga menyimpulkan bahwa sistem kesehatan Australia tergolong

⁵⁰³ *Ibid.*

tinggi.⁵⁰⁴ Perusahaan tersebut juga bercermin dari hasil tabel Bloomberg yang telah penulis sajikan sebelumnya.

Sedangkan terkait *municipal facilities* atau *city services* dan infrastruktur pendidikan, Australia juga tergolong tinggi dalam kualitas dua hal tersebut. Dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Mercer yang dipublikasi pada 19 Februari 2014. Survey tersebut berjudul ‘*2014 Quality of Living Worldwide City Rankings – Mercer Survey*.’⁵⁰⁵ Dalam melakukan survey terkait, Mercer menghitung berdasarkan 39 faktor yang dikumpulkan dalam sepuluh kategori, salah satunya adalah kategori *Public Services and Transportation* dan *Schools and Education*.⁵⁰⁶ Dimana dua kategori tersebut sesuai dengan apa yang penulis cari yaitu mengenai *city services* di Australia serta infrastuktur pendidikan.⁵⁰⁷

Definisi dari *municipal facilities* sendiri adalah fasilitas yang dimiliki oleh kota dimana pengertian dari *municipal* itu sendiri ialah *of or belonging to a town or city*.⁵⁰⁸ Lalu, hasil dari survey Mercer dibentuk dalam konsep *Top 5 and Bottom 5 Cities by Region*. Australia, berada dalam *Top 3 Cities* di Australasia. Yang mana dalam *Regional Rank* tahun 2014, Australia khususnya Sydney menempati posisi kedua dalam ukuran *region* dan dalam *Overall*

⁵⁰⁴ “Australia’s Health Care System: An Opportunity for Economic Growth,” Strategy&, diakses 23 April, 2018, <https://www.strategyand.pwc.com/reports/australias-healthcare-system>

⁵⁰⁵ “2014 Quality of Living Worldwide City Rankings – Mercer Survey,” Mercer, diakses 23 April, 2018, <https://www.mercer.com/newsroom/2014-quality-of-living-survey.html>

⁵⁰⁶ *Ibid.*

⁵⁰⁷ *Ibid.*

⁵⁰⁸ “Municipal,” Cambridge Dictionary, diakses 23 April, 2018, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/municipal>

Rank nya memegang posisi kesepuluh.⁵⁰⁹ Oleh karena itu, Mercer sendiri mengatakan bahwa Australia termasuk ke dalam peringkat tinggi di daftar kualitas hidup Mercer.⁵¹⁰

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diinfokan oleh Pemerintah Australia dalam website resmi nya yaitu studyinaustralia.gov.au bahwa seluruh sekolah di Australia harus terdaftar di departemen pendidikan negara bagian atau teritori dan tunduk pada persyaratan pemerintah dalam hal infrastruktur dan pendaftaran guru.⁵¹¹ Setelah dijelaskan mengenai rincian dari parameter infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kota seperti jalan raya dan jembatan, disimpulkan semua infrastruktur yang disebutkan, Australia menduduki posisi atas atau dalam kata lain kualitas infrastruktur nya baik dan bagus.

Karena semua rincian di dalam parameter infrastruktur tergolong tinggi di Australia, maka dari itu Australia tergolong dalam *high economic capacity* terkait beberapa infrastuktur yang telah disebutkan sebelumnya. Seharusnya, jika keadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kota seperti jalan raya dan jembatan baik dan bagus, respon kebijakan Pemerintah Australia akan condong ke arah positif, tidak bersifat *endangering their safety*.

⁵⁰⁹ “2014 Quality of Living Worldwide City Rankings – Mercer Survey,” Loc.Cit.

⁵¹⁰ *Ibid.*

⁵¹¹ “Schools in Australia,” Study in Australia, diakses 23 April, 2018, <https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/schools>

Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Jacobsen, jika kapasitas ekonomi suatu negara tinggi, seharusnya negara tersebut dikatakan mampu untuk menampung permintaan sumber daya yang diminta oleh para pengungsi.⁵¹² Kesimpulan nya, parameter infrastruktur ini tidak mempunyai pengaruh dalam Australia dalam menandatangani RSA karena adanya *high economic capacity* yang dimiliki oleh Australia dalam infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kota seperti jalan raya dan jembatan.

5.3.2. Keterbukaan Sosial

5.3.2.1. Makna Budaya Terkait Pengungsi

Dalam parameter makna budaya terkait pengungsi ini, sesuai deskripsi yang Jacobsen jelaskan dalam jurnal nya, makna budaya terkait pengungsi di sebuah negara dipengaruhi oleh faktor *cultural*, *historical* dan *religious* atau faktor budaya, historis dan agama. Seperti layaknya parameter lain, Jacobsen juga menyediakan contoh untuk membantu pembaca lebih memahami jurnal model tersebut dan disini penulis menemukan contoh dari Karen Jacobsen untuk membantu penulis dalam menganalisa parameter ini.

Contoh tersebut mengenai agama islam yang mempunyai tradisi positif yang kuat terhadap penawaran bagi pengungsi sementara atau pencari suaka meninggalkan negara nya karena

⁵¹² Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 667, DOI: 10.2307/2547631

adanya penganiayaan politik.⁵¹³ Dan prinsip yang berangkat dari negara-negara Islam yang ada di Arab tersebut berdasarkan prinsip keramahan dan prinsip untuk membantu yang lain.⁵¹⁴ Contoh negara yang disediakan oleh Jacobsen adalah Iran, Pakistan serta Sudan, dimana pada ketiga negara tersebut partai politik islam nampak dan elemen keagamaan dalam memaknai pengungsi penting sifatnya bagi komunitas untuk proses penerimaan.⁵¹⁵

Setelah dipaparkan terkait beberapa kalimat dan contoh untuk mendukung analisa, disini dapat dilihat bahwa untuk menganalisa studi kasus penulis pada penelitian ini dibutuhkan informasi terkait mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat di Australia dan jika informasi tersebut sudah ditemukan, lalu hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tradisi atau prinsip dan aspek historis seperti apa yang dimiliki oleh agama terkait atau agama yang mayoritas dipeluk oleh warga Australia dalam hal pengungsi maupun penerimaan pengungsi. Setelah hal tersebut tersedia, maka dapat diketahui apakah parameter makna budaya tersebut mempengaruhi Australia dalam menandatangani RSA atau tidak menurut analisa penulis.

Mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Australia adalah Katolik. Informasi tersebut berdasarkan sensus tahun 2011⁵¹⁶

⁵¹³ *Ibid.*, 668.

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ *Ibid.*

⁵¹⁶ "Media Release : 2016 Census Data Reveals No Religion is Rising Fast," Australian Bureau of Statistics, diakses 30 April, 2018,

yang dimana sensus di Australia dilaksanakan setiap lima tahun sekali.⁵¹⁷ Penulis menemukan bahwa Agama Katolik sudah dianut oleh sebagian besar masyarakat Australia sejak tahun 1991⁵¹⁸ dan hingga 2016 masih menjadi agama mayoritas di Negeri Kangguru ini.⁵¹⁹ Pada tahun 2011 sendiri, terdapat sekitar 25.3% warga Australia yang menganut Agama Katolik. Angka tersebut menjadikan agama katolik menduduki posisi nomor satu dalam daftar ‘*Religion Top 20-Australia*’ yang sensus nya dilakukan serta dipublikasi sendiri oleh *Australian Bureau of Statistics*.⁵²⁰

Berikut adalah gambar sensus tahun 2011 yang berdampingan dengan sensus tahun 2016 dan pada tabel berikut nya adalah sensus tahun 1991 yang juga berdampingan dengan sensus tahun 1996

<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A144540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument>

⁵¹⁷ “Making Sense of the Census Cheatsheet,” Australian Bureau of Statistics, diakses 30 April, 2018, <http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/makingsense>

⁵¹⁸ “Australia: 1996 Census (Religion),” John Mark Ministries, diakses 30 April, 2018, <http://www.jmm.org.au/articles/8174.htm>

⁵¹⁹ “Media Release : 2016 Census Data Reveals No Religion is Rising Fast,” Australian Bureau of Statistics, diakses 30 April, 2018,

<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A144540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument>

⁵²⁰ *Ibid.*

2016	2011
No religion – 30.1%	Catholic – 25.3%
Catholic – 22.6%	No religion – 22.3%
Anglican – 13.3%	Anglican – 17.1%
Uniting Church – 3.7%	Uniting Church 5.0%
Christian, (Not further defined)– 2.6%	Presbyterian and Reformed – 2.8%
Islam – 2.6%	Eastern Orthodox – 2.6%
Buddhism – 2.4%	Buddhism – 2.5%
Presbyterian and Reformed – 2.3%	Islam 2.2%
Eastern Orthodox – 2.1%	Christian (Not further defined) 2.2%
Hinduism – 1.9%	Baptist – 1.6%
Baptist – 1.5%	Hinduism 1.3%
Pentecostal – 1.1%	Lutheran – 1.2%

Gambar 13: Data agama mayoritas di Australia tahun 2011 dan 2016. ⁵²¹

Religious Group	1996 Census	%	1991 Census	%
Anglican	3,903,324	21.99	4,018,770	23.85
Baptist	295,178	1.66	279,920	1.66
Brethren	22,063	0.12	24,127	0.14
Catholic	4,798,950	27.03	4,606,644	27.34
Churches of Christ	75,023	0.42	78,039	0.46
JWs	83,414	0.47	74,803	0.44
Latter Day Saints	45,112	0.25	38,298	0.23
Lutherans	249,989	1.41	250,844	1.49
Oriental Christians	31,342	0.18	23,294	0.14
Orthodox	497,015	2.80	474,921	2.82
Pentecostals	174,720	0.98	150,665	0.89
Presbyterians	675,534	3.81	732,227	4.35
Salvation Army	74,145	0.42	71,984	0.43
Seventh Day Adventist	52,655	0.30	48,341	0.29

Gambar 14: Data agama mayoritas di Australia tahun 1991 dan 1996 ⁵²²

Dapat dilihat dari tabel pertama dan kedua, Agama Katolik masih menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat

⁵²¹ *Ibid.*

⁵²² “Australia: 1996 Census (Religion),” John Mark Ministries, diakses 13 Mei, 2018, <http://www.jmm.org.au/articles/8174.htm>

Australia. Lalu dalam paragraf selanjutnya, penulis akan menganalisa tradisi, aspek historis dan prinsip yang dimiliki oleh Agama Katolik sendiri yang nanti akan mempunyai pengaruh kepada bagaimana sebuah negara memaknai pengungsi serta penerimaannya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Jacobsen.

Prinsip dan tradisi yang dimiliki oleh Agama Katolik terkait pengungsi berakar pada surat paus yang dikirim ke semua uskup Gereja Katolik Roma tahun 1891 yang dimana surat tersebut dinamakan *Rerum Novarum*.⁵²³ Pada dasarnya surat tersebut membahas kondisi tenaga kerja atau *On the Condition of Labor* dan mengembangkan presentasi sistematis dari prinsip-prinsip hak dan tanggung jawab manusia.⁵²⁴ Namun, *Rerum Novarum* juga menjelaskan dan mengomentari terkait situasi imigran yang di kemudian hari nya, dalam sebuah konferensi, paus dan uskup menyintesis atau menyatukan tradisi teologis Katolik untuk mengartikulasi tiga prinsip dasar tentang imigrasi.⁵²⁵

Prinsip pertama mengatakan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bermigrasi untuk menyokong hidup mereka dan keluarga nya.⁵²⁶ Prinsip tersebut berdasarkan pada ajaran

⁵²³ "Catholic Social Teachings on Immigration and the Movement of Peoples," United States Conference of Catholic Bishops, diakses 30 April, 2018, <http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/catholic-teaching-on-immigration-and-the-movement-of-peoples.cfm>

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ *Ibid.*

⁵²⁶ *Ibid.*

Kristen Kuno maupun yang terdapat di Al-Kitab.⁵²⁷ Ajaran terkait turut menggarisbawahi bahwa sesuatu-sesuatu yang ada di dunia adalah milik semua manusia serta setiap manusia memiliki hak sama dalam menerima sesuatu yang penting dari bumi termasuk makanan, baju, tempat bernaung, hak atas pendidikan, perawatan medis, beragama dan ekspresi budaya.⁵²⁸ Tertulis juga dalam Lukas Injil (16: 19-31) yang bunyi nya adalah, *“the rich man was condemned for living well while the poor man starved at his doorstep,”*⁵²⁹

Kutipan ayat diatas kurang lebih jika diubah dalam bahasa Indonesia menjadi, “orang kaya tersebut dikutuk karena hidup dengan baik sementara orang miskin kelaparan di depan pintunya.”⁵³⁰ Dan dalam paragraf akhir di prinsip pertama tertulis bahwa masyarakat asli tidak mempunyai hak superior atas imigran karena sebelum Tuhan semuanya, sama. Bumi diberikan oleh Tuhan untuk semua. Berikutnya akan dipaparkan tentang prinsip kedua.⁵³¹

Prinsip kedua menggarisbawahi bahwa sebuah negara memiliki hak untuk mengatur perbatasan nya serta mempunyai hak untuk mengontrol imigrasi.⁵³² Hal tersebut berarti seorang yang bermoral tidak dapat hanya mempertimbangkan apa yang baik

⁵²⁷ *Ibid.*

⁵²⁸ *Ibid.*

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ *Ibid.,*

⁵³² *Ibid.,*

untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi harus bertindak dengan kebaikan semua individu sebagai panduan prinsip nya.⁵³³ Hal ini ketika masing-masing individu sebenarnya memiliki hak untuk berpindah tempat untuk mencari kehidupan yang lebih aman, namun sebuah negara juga tidak terikat untuk menerima semua yang ingin bermukim di negara nya.⁵³⁴

Ajaran sosial Katolik bersifat realistik.⁵³⁵ Ketika individu memiliki hak untuk berpindah tempat, tidak ada negara nya yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk menerima imigran dalam jumlah banyak yang sampai aspek sosial dan ekonomi di negara tersebut terancam.⁵³⁶ Di alasan ini, Katolik juga seharusnya tidak memandang pekerjaan pemerintah federal dan bagian *immigration control* nya sebagai negatif atau kejam. Mereka bekerja untuk menegakkan undang undang imigrasi negara yang sering dilakukan karena adanya rasa kesetiaan pada kebaikan untuk bersama.⁵³⁷

Yang terakhir adalah prinsip ketiga. Prinsip ini berisi bahwa sebuah negara harus mengatur perbatasan nya dengan keadilan dan rasa belas kasihan.⁵³⁸ Negara tidak dapat dengan mudah memutuskan hanya ingin mengabdikan kepada masyarakat sendiri dan tidak pada orang lain.⁵³⁹ Bahkan pada kasus migran

⁵³³ *Ibid.*,

⁵³⁴ *Ibid.*,

⁵³⁵ *Ibid.*,

⁵³⁶ *Ibid.*,

⁵³⁷ *Ibid.*

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ *Ibid.*

yang tidak terlalu bersifat darurat, negara maju mempunyai hak untuk membatasi gelombang imigrasi namun harus tetap berdasarkan nilai-nilai keadilan, rasa belas kasihan serta kebaikan bersama, tidak hanya untuk kepentingan negara itu sendiri.⁵⁴⁰

Pada akhirnya, prinsip ketiga ini ditutup dengan kalimat di Al-Kitab yang menyatakan bahwa, Tuhan berjanji bahwa penilaian kita akan didasarkan pada perlakuan kita terhadap individu paling rentan.⁵⁴¹ Sebelum Tuhan, kita tidak dapat memaafkan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang-orang tertentu yang mengklaim bahwa status hukum individu tidak tersedia atau kurang yang akhirnya dapat menghalangi hak individu terkait yang diberikan oleh Tuhan.⁵⁴²

Dalam aspek historisnya, dapat dilihat dari peristiwa akhir Perang Dunia Dua⁵⁴³ Dengan runtuhnya Nazi dan penciptaan baru Tirai Besi” Soviet, Benua Eropa dihadapkan dengan peristiwa migrasi jutaan orang yang tidak pernah terjadi sebelumnya.⁵⁴⁴ Gelombang tersebut bermigrasi untuk mencari keselamatan, makanan dan kebebasan. Pada saat itu, Paus Pius XII menulis *Exsul Familia* atau *The Émigré Family*, menempatkan Gereja tepat

⁵⁴⁰ *Ibid.*

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² *Ibid.*

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ *Ibid.*

di sisi para migran yang mencari kehidupan lebih baik dengan melarikan diri dari rumah asalnya.⁵⁴⁵

Sebelumnya pada contoh yang disediakan oleh Jacobsen, tertulis bahwa Islam memiliki tradisi positif yang kuat terhadap penerimaan pengungsi maupun hal-hal yang berhubungan dengan pengungsi yang salah satu prinsip nya berdasarkan pada *hospitality* dan *assistance to others*. Dari agama Katolik sendiri, sesuai dengan tiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip yang dianut oleh Katolik juga sebenarnya terbuka cukup lebar kepada pengungsi maupun migran namun pada prinsip kedua terlihat bahwa ajaran Katolik percaya bahwa sebuah negara tidak mempunyai kewajiban dan tidak terikat untuk menerima semua pengungsi yang datang untuk bermukim di negara nya walaupun memang Katolik juga percaya bahwa pengungsi memiliki hak pergi dari tempat asal untuk mencari kehidupan lebih baik.

Adanya tidak keterikatan untuk menerima semua pengungsi tersebut menjadi poin yang memberikan pengaruh kepada penandatanganan RSA oleh Australia tersebut yang dikategorikan sebagai respon kebijakan tidak *generous*. Hal tersebut penulis simpulkan karena Katolik masih mempunyai poin cukup longgar agar negara melakukan respon kebijakan negatif termasuk tidak menerima pengungsi di negara nya, seperti apa yang ada di prinsip

⁵⁴⁵ *Ibid.*

kedua dengan adanya ketidakterikatan tersebut. Berbeda dengan agama islam, sesuai informasi dari Jacobsen yang ada di modelnya.

Agama Islam memiliki prinsip untuk membantu orang lain dan keramahan dalam penerimaan pengungsi yang maka dari itu Islam dikenal mempunyai tradisi positif yang kuat terhadap pengungsi. Dilihat dari dua prinsip tersebut, penulis memperhatikan tidak ada ruang untuk membuat respon kebijakan negatif. Jikalau prinsip-prinsip yang dianut oleh Katolik tersebut, termasuk prinsip aspek historis, seperti terlihat ruang kecil untuk respon kebijakan negatif mengambil posisi. Ruang kecil tersebut terdapat pada prinsip kedua *Rerum Novarum*.

Kesimpulan nya dalam parameter ini, prinsip-prinsip yang dianut Katolik membuat respon kebijakan negatif sebuah negara masih dapat mengambil posisi dan kesempatan untuk diimplementasikan. Yang akhirnya respon kebijakan negatif termasuk sifat respon *endangering their safety* dalam RSA dapat terealisasi. Dalam paragraf terakhir parameter ini, penulis menggarisbawahi bahwa parameter makna budaya terhadap pengungsi ini memiliki pengaruh.

5.3.2.2. Etnisitas dan Kekerabatan

Parameter kedua dari indikator keterbukaan sosial ini mengacu pada kesamaan etnik maupun kesamaan kekerabatan yang dimiliki oleh negara tuan rumah dan negara asal pengungsi.

Jika terdapat kesamaan atau kemiripan etnik diantara keduanya, dikatakan dalam jurnal Jacobsen, bahwa hal tersebut menjadi prediktor kuat adanya respon penerimaan gelombang pengungsi oleh negara tuan rumah.

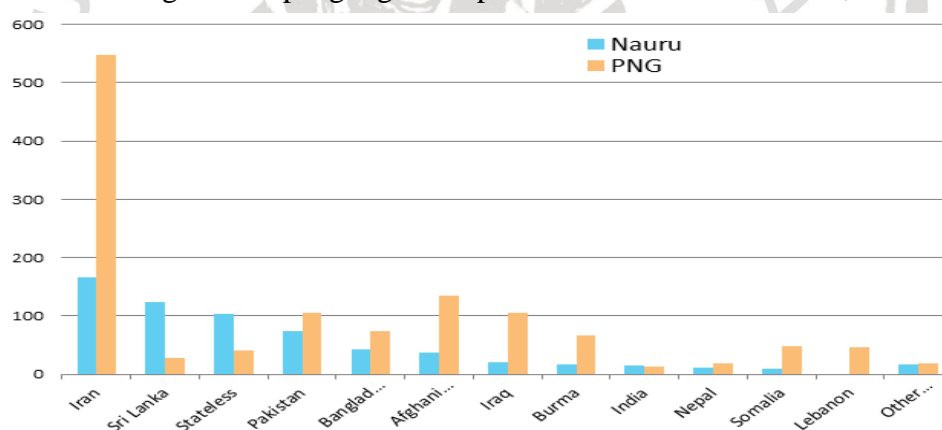
Lalu, jika disesuaikan dengan studi kasus penulis yang pertama akan dianalisis adalah kemiripan etnik antara negara asal pengungsi di Nauru OPC dan etnik di Australia lalu jika hal tersebut sudah ada temuan nya penulis akan mencari data dan menganalisis terkait kemiripan etnik antara negara asal di Nauru OPC dan etnik di negara Kamboja yang nanti akan berdampak kepada respon kebijakan pengungsi Australia. Sebagai contoh, ketika etnik di Australia dan negara asal pengungsi di Nauru OPC dilihat tidak mempunyai kedekatan, maka tindakan Australia tentunya akan negatif karena tidak terdapat kekerabatan etnis.

Dari tindakan negatif tersebut akan disambungkan kepada data antara kedekatan etnis negara asal pengungsi di Nauru OPC dan etnis di negara Kamboja. Jika terdapat kedekatan etnis antara negara asal pengungsi di Nauru OPC dan etnis di negara Kamboja, hal tersebut dapat membuat Australia semakin bulat untuk mengeluarkan respon kebijakan RSA dengan mengirim pengungsi jalur laut di Nauru OPC ke negara Kamboja.

Berhubung bahwa Australia sendiri tidak memiliki kekerabatan etnis yang dekat dengan negara asal pengungsi di

Nauru OPC yang maka dari itu keputusan Australia untuk mengeluarkan kebijakan mengirim pengungsi jalur laut ke Kamboja akan semakin kuat ketika kekerabatan etnis antara kedua nya erat. Hal tersebut menjadi sebuah contoh mengenai bagaimana penulis akan menganalisis parameter etnisitas dan kekerabatan. Di beberapa paragraf selanjutnya akan disajikan data dan analisis yang sebenarnya atau yang bukan merupakan sebuah contoh lagi.

Disini, pengungsi di OPC Nauru, negara asal nya sebagian besar dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Negara asal terbanyak diisi oleh Iran dari Benua Timur Tengah serta nomor dua diduduki oleh Srilanka dari Benua Asia Selatan.⁵⁴⁶ Berikut, gambar dari negara asal pengungsi dan pencari suaka di OPC Nauru,



Gambar 15: Mayoritas asal negara pengungsi dan pencari suaka di Pusat

Penahanan Pengungsi Jalur Laut Milik Australia di Nauru dan Pulau

Manus⁵⁴⁷

⁵⁴⁶ "Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," Parliament of Australia, diakses 1 Mei, 2018, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore

⁵⁴⁷ *Ibid.*

Etnisitas dan kekerabatan sendiri dapat dijelaskan melalui hubungan dengan etnik lain yang telah dijalin oleh Australia dalam waktu yang lama atau dari sisi historis dan juga dapat dicocokkan dari mayoritas etnik yang ada di Australia dan negara pengirim, apakah ada kemiripan atau tidak. Sesuai data yang sudah penulis tampilkan di bab empat, macam-macam etnis yang masuk ke Australia mulai dari abad sembilan belas hingga tahun 1970 sangat didominasi oleh masyarakat kulit putih Eropa termasuk Hungaria, Italia, Polandia, Russia, Yunani, Bulgaria, Armenia, Yugoslavia, Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraina, Czechoslovakia.⁵⁴⁸

Terlebih lagi, Australia sempat memiliki peraturan tegas bernama '*White Australian Policy*' yang bertahan sangat lama dari tahun 1901 hingga 1975 yang membatasi hanya beberapa kewarganegaraan yang dapat datang dan pindah ke Australia dimana kewarganegaraan tersebut adalah hanya masyarakat Eropa, terutama Eropa Utara.⁵⁴⁹ Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa Australia lebih memiliki kedekatan etnis dengan negara-negara di Eropa. Bahkan dalam buku James Jupp diinformasikan bahwa mayoritas proses imigrasi ke Australia adalah produk dari rekayasa

⁵⁴⁸ "History of Australia's Refugee Program," Refugee Council of Australia, diakses 1 Mei, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/>

⁵⁴⁹ "White Australian Policy," Multicultural Australia, diakses 1 Mei, 2018, <http://www.multiculturalaustralia.edu.au/hotwords/unpack/White.Australia.Policy>

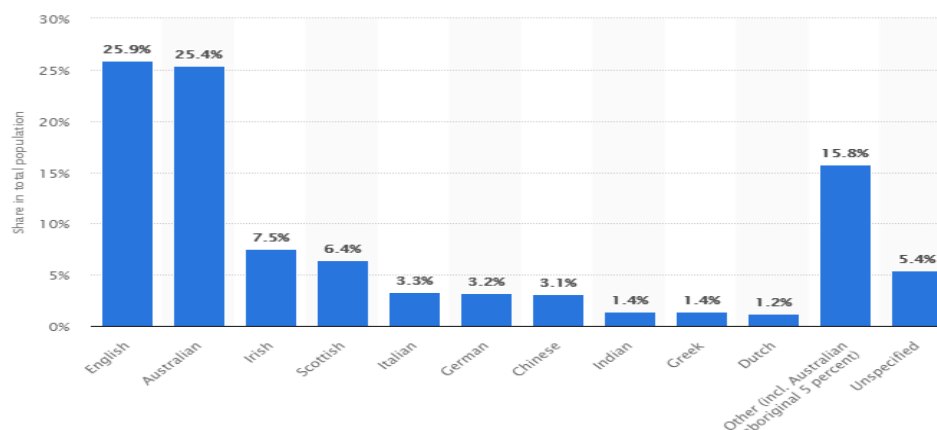
sosia yang bersifat disengaja untuk menciptakan jenis masyarakat tertentu didalamnya.⁵⁵⁰

Dari sisi historis sendiri telah cukup jelas bahwasanya, etnis selain dari negara-negara di Eropa terlihat sulit untuk masuk ke Australia ditandai dengan hanya etnis dari negara-negara tertentu yang boleh masuk dan pindah ke Negara Kangguru ini. Dan dari hal tersebut pula dapat disimpulkan seperti terdapat garis pemisah tegas antara masyarakat Eropa dan Non Eropa maupun warga kulit putih dan non kulit putih. Lalu tidak terlihat negara-negara yang ada di gambar sebelumnya, termasuk dalam daftar negara-negara yang diperbolehkan masuk ke Australia di era historis seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya.

Selanjutnya, akan dilihat dari mayoritas etnis yang ada di Australia sesaat sebelum RSA ditandatangani dan mayoritas etnis yang dimiliki oleh negara penerima. Dari kata kunci tersebut dapat diperhatikan apakah ada kemiripan atau kesamaan atau tidak. Berikut adalah gambar mayoritas etnik di Australia tahun 2011.

⁵⁵⁰ James Jupp, "From White Australian to Woonera: The story of Australian Immigration," *Cambridge University Press* (2007), http://books.google.co.id/books/about/From_White_Australia_to_Woomera.html?id=A9XR6eKT54AC&redir_esc=y

Australia: Ethnic groups as of 2011



Gambar 16: Urutan kelompok etnis terbesar di Australia tahun 2011.⁵⁵¹

Jika ingin ditarik lima tahun sebelum 2011 yaitu di tahun 2006, mayoritas etnis di Australia adalah *Australian* di posisi pertama.⁵⁵² diikuti dengan etnis *Australian, English, Irish, Scottish, Italian, German, Chinese, Greek, Dutch* dan *Indian*.⁵⁵³ Sedangkan di tahun 2013, mayoritas etnis di Iran sendiri adalah *Persians*.⁵⁵⁴ Dan di tahun 2006, *Persians* juga masih menempati posisi etnis terbesar di Iran dengan jumlah sedikit lebih dari setengah populasi Iran yang mana populasi Iran sendiri ialah 70,000.000.⁵⁵⁵

⁵⁵¹ Australia: Ethnic Groups as of 2011,” The Statistics Portal, diakses 1 Mei, 2018, <https://www.statista.com/statistics/260502/ethnic-groups-in-australia/#>

⁵⁵² Department of Immigration and Citizenship. 2008. *The People of Australia: Statistics from The 2006 Census*. Department of Immigration and Citizenship. https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/01_2014/poa-2008.pdf

⁵⁵³ *Ibid.*

⁵⁵⁴ “Iran Minorities,” The Iran Primer, diakses 1 Mei, 2018, <http://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity>

⁵⁵⁵ Rashidvash, Vahid. “Iranian People: Iranian Ethnic Groups,” *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 13, No 15 (Agustus 2013) 2016, <https://pdfs.semanticscholar.org/8ddc/b5154976f79cef65ec944dce613d3fd25d.pdf>

Dari perbandingan data tersebut dilihat bahwa kemiripan atau kesamaan etnik tidak terlihat dimana mayoritas etnis di Australia tahun 2006 dan 2011 diisi oleh mayoritas negara-negara Barat seperti Inggris, Irlandia, Skotlandia, Italia, Jerman, Yunani, Belanda dan sisanya adalah negara non-Barat seperti China dan India. Dalam halaman website *Australian Bureau of Statistics* mengenai *Ancestry* juga diinformasikan bahwa pada awal periode Kolonial hingga sampai setelah Perang Dunia Dua khususnya pada tahun 1986, sebanyak 57% populasi di Australia diisi oleh etnis *British* dan *Irish*.⁵⁵⁶

Serta pada masa *post-war immigration*, Etnis *Italian*, *Polish*, *German*, *Indian*, *Vietnamese*, *Greek*, *Dutch*, *Lebanese* dan *Chinese* mulai tersebar.⁵⁵⁷ Sedangkan menurut Index Mundi dengan khusus deskripsi etnis adalah pada tahun 2012, mayoritas etnis Sri Lanka didominasi oleh *Sinhalese* sebanyak 74.9% diikuti dengan Sri Lankan Tamil dengan jumlah persenan 11.2%.⁵⁵⁸ Dua mayoritas etnis Sri Lanka tersebut rupanya juga tidak memiliki kesamaan etnis dengan Australia yang mana pada data tahun 2006 dan 2011, etnis di Australia diisi oleh sebagian besar negara-negara Barat dan Eropa. Dari sisi kekerabatan etnis sendiri, dapat dilihat

⁵⁵⁶ "Population Characteristics: Ancestry of Australia's Population," Australia Bureau of Statistics, diakses 1 Mei, 2018, <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/bb8db737e2af84b8ca2571780015701e/af5129cb50e07099ca2570eb0082e462!OpenDocument>

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ "Sri Lanka Demographics Profile 2018," Index Mundi, diakses 1 Mei, 2018, https://www.indexmundi.com/sri_lanka/demographics_profile.html

bahwa etnis Iran dan Srilanka tidak mendominasi etnis Australia pada aspek historis dan pada tahun-tahun menjelang tahun 2014.

Jika saja etnis Iran maupun Sri Lanka pernah mengisi mayoritas etnis di Australia yang misalnya Etnis *Persians* mengisi dan menggantikan posisi Etnis *Irish* pada grafik sebelumnya, mungkin faktor kesamaan etnik masih dapat dicapai karena di Australia juga terdapat Etnis *Persians* seperti apa yang ada di Iran. Atau setidaknya etnis yang ada di Iran atau Srilanka hanya memiliki sedikit perbedaan dengan Etnis *Australian* atau *English* seperti halnya kedekatan etnis antara *English* dan *Australian* yang secara etnis hampir semua memiliki kesamaan walaupun pada akhirnya masing-masing tumbuh mandiri dalam menjalankan negaranya.

Disini penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan dan kekerabatan etnis yang dimiliki oleh Australia dan dua mayoritas asal negara pengungsi di pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru. Seperti apa yang dikatakan oleh Jacobsen, ketika tidak ada kekerabatan yang erat antara dua subjek terkait, respon kebijakan yang lahir cenderung tidak positif atau tidak menerima pengungsi ke wilayah negara, salah satunya.

Respon kebijakan Australia sendiri kepada pengungsi jalur laut tersebut adalah mengirim mereka ke *third country resettlement* yaitu Kamboja atau yang dapat tergolong dengan respon kebijakan

restrictive atau *endangering their safety* menurut Jacobsen yang dimana pengungsi jalur laut itu sendiri sebenarnya merasa ketakutan untuk dikirim ke Kamboja. Maka dari itu pada data dan analisis yang disajikan di beberapa paragraf selanjutnya, penulis akan mencari tahu mengenai kedekatan etnis antar negara Kamboja dan negara asal pengungsi di Nauru OPC.

Yang nanti hasilnya akan terlihat apakah parameter etnisitas dan kekerabatan memiliki pengaruh dengan keputusan Australia dalam menandatangani RSA dengan Kamboja. Berikut pada halaman berikutnya adalah grafik mengenai kelompok etnis yang ada di Kamboja dimana dari tahun 2009 hingga 2014, etnis Khmer mendominasi kelompok etnis di Kamboja.

Table 7. Distribution of population by ethnicity and geographical domain, 2004, 2009 and 2014. In Percent.

Marital status	CSES 2004 - 2014			
	Cambodia	Phnom Penh	Other urban	Other rural
2004				
Khmer	96.0	97.1	95.1	95.9
Cham	2.0	0.9	2.7	2.0
Chinese	0.1	0.3	0.3	0.0
Vietnamese	0.4	1.5	1.3	0.1
Thai	0.0	0.0	-	-
Lao	0.2	-	-	0.3
Other	1.4	0.2	0.7	1.6
Not stated	0.0	0.1	-	0.0
Total	100	100	100	100
2009				
Khmer	95.8	97.2	98.3	95.3
Cham	2.5	1.5	1.0	2.8
Chinese	0.0	0.0	0.0	0.0
Vietnamese	0.4	1.2	0.4	0.3
Thai	0.0	0.0	0.1	0.0
Lao	0.0	-	-	0.0
Other	1.1	0.0	0.1	1.4
Not stated	0.1	0.1	0.0	0.1
Total	100	100	100	100
2014				
Khmer	96.4	97.9	97.5	95.9
Cham	1.9	1.8	2.3	1.8
Chinese	0.0	0.0	0.0	0.0
Vietnamese	0.3	0.3	0.2	0.3
Thai	0.0	0.0	0.0	0.0
Lao	0.0	0.0	0.0	0.0
Other	1.4	0.0	0.0	1.8

Gambar 17: Kelompok Etnisitas di Kamboja dari Tahun 2004-2014⁵⁵⁹

Dapat dilihat bahwa Etnis Khmer memang telah mendominasi kelompok etnis di Kamboja sejak tahun 2004 hingga 2014 dengan etnis kedua yang ikut mendominasi adalah Etnis Cham. Jika dihubungkan dengan data pengungsi jalur laut yang ada di Nauru OPC, etnis antara Kamboja dan negara asal pengungsi

⁵⁵⁹ National Institute of Statistics Ministry of Planning. 2015. *Cambodia Socio-Economic Survey* 2014. National Institute of Statistics Ministry of Planning. http://www.ilearnincambodia.net/uploads/3/1/0/9/31096741/cses_2014_report.pdf

tidak memiliki kesamaan etnik. Dibuktikan bahwa etnis terbesar di Iran adalah Persians⁵⁶⁰ dan di Srilanka adalah Sinhalese⁵⁶¹.

Hal ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa parameter etnisitas dan kekerabatan bukan menjadi faktor pendorong Australia mengirimkan pengungsi jalur laut tersebut kepada Kamboja sebagai Negara penerima ketiga. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan etnik atau tidak adanya hubungan etnisitas dan kekerabatan yang erat antara pengungsi jalur laut dengan Kamboja sebagai Negara penerima ketiga.

Memang parameter ini menjadi pendorong Australia untuk memilih respon kebijakan *restrictive* dengan salah satunya tidak menerima pengungsi jalur laut tersebut dan memilih untuk mengeluarkan respon kebijakan *endangering their* (pengungsi) *safety* dengan mengirim beberapa dari mereka ke Kamboja. Tetapi parameter etnisitas dan kekerabatan dikatakan tidak mempunyai pengaruh dalam faktor-faktor mengapa Australia pada akhirnya menandatangani RSA atau bukan menjadi faktor pendorong dalam menentukan Kamboja sebagai Negara penerima ketiganya karena tidak adanya kesamaan etnik tersebut.

Singkatnya, parameter etnisitas dan kekerabatan tidak memiliki pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia.

⁵⁶⁰ "Iran Minorities," The Iran Primer, diakses 1 Mei, 2018, <http://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity>

⁵⁶¹ "Sri Lanka Demographics Profile 2018," Index Mundi, diakses 1 Mei, 2018, https://www.indexmundi.com/sri_lanka/demographics_profile.html

5.3.2.3. Pengalaman Historis

Pada parameter ini, pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan gelombang pengungsi sebelumnya dan sebagai pengungsi itu sendiri dikatakan mempengaruhi faktor penerimaan.⁵⁶² Ketika masyarakat pernah merasakan situasi persis seperti apa yang para pengungsi rasakan seperti situasi pergi meninggalkan negara nya dari adanya kekerasan, hasil respon nya akan positif karena rasa simpati mereka akan otomatis lebih tinggi.⁵⁶³ Serta, jika arus masuk sebelumnya telah membawa sebuah masalah di wilayah tersebut maka suasana kebencian masih bertahan di wilayah terkait.⁵⁶⁴

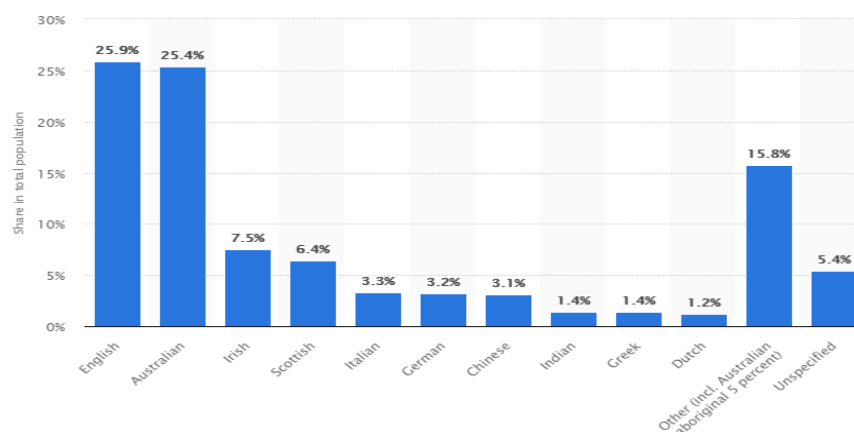
Australia sendiri dapat dikatakan sebagai negara pendatang dilihat dari data yang dipublikasi oleh *The Statistics Portal* yang akan penulis sajikan gambar nya setelah ini. Dari gambar dapat diperhatikan bahwa masyarakat Australia sebagian besar terdiri dari etnis *English* dan Etnis Eropa lainnya walaupun memang pada peringkat kedua, Etnis *Australian* juga masih turut mendominasi. Namun di peringkat-peringkat berikutnya bisa dikatakan bahwa Etnis dari negara-negara lain juga ikut mewarnai grafik kelompok etnis di Australia. Berikut, adalah gambarnya,

⁵⁶² Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 669, DOI: 10.2307/2547631

⁵⁶³ *Ibid.*

⁵⁶⁴ *Ibid.*

Australia: Ethnic groups as of 2011



Gambar 18: Urutan kelompok etnis terbesar di Australia tahun 2011⁵⁶⁵

Pada model Jacobsen tertulis bahwa jika masyarakat pernah merasakan situasi persis seperti apa yang para pengungsi rasakan (pergi meninggalkan negara nya dari adanya kekerasan) hasil respon nya akan positif.⁵⁶⁶ Masyarakat Australia sendiri sebagian besar adalah Etnis *English* sesuai data dari The Statistics Portal di halaman sebelumnya.⁵⁶⁷ Etnis *English* sendiri datang ke Australia, sesuai pengalaman nya, antara tahun 1947 dan 1982, ber-emigrasi ke Australia dengan bantuan dana dari Negara Inggris dan Pemerintah Australia. Jumlah masyarakat Inggris tersebut sekitar lebih dari satu juta.⁵⁶⁸

⁵⁶⁵ "Australia: Ethnic Groups as of 2011," The Statistics Portal, diakses 2 Mei, 2018, <https://www.statista.com/statistics/260502/ethnic-groups-in-australia/#>

⁵⁶⁶ Karen Jacobsen, Loc.Cit

⁵⁶⁷ "Australia: Ethnic Groups as of 2011," The Statistics Portal, diakses 2 Mei, 2018, <https://www.statista.com/statistics/260502/ethnic-groups-in-australia/#>

⁵⁶⁸ "Post World War II British Migration to Australia," Museums Victoria Collections, diakses 2 Mei, 2018, <https://collections.museumvictoria.com.au/articles/13640>

Jumlah banyak masyarakat Inggris yang masuk ke Australia tersebut adalah bagian dari Inisiatif Pembangunan Australia yang berjudul *'Populate or Perish.'*⁵⁶⁹ Inisiatif tersebut muncul setelah Perang Dunia Dua, yang mana untuk lebih jelasnya, inisiatif tersebut memungkinkan perjalanan terjangkau ke Australia dengan biaya tiket dewasa hanya £10 dan semua anak-anak dapat bepergian secara gratis pada tahun 1960-an.⁵⁷⁰ Skema Pembangunan Australia diatas memang sengaja dibuat untuk menarik perhatian Etnis Inggris.⁵⁷¹ Karena etnis tersebut juga dilihat secara budaya, dekat dengan masyarakat Australia dan dalam teori, lebih mungkin masuk ke dalam cara hidup Australia dibandingkan dengan imigran lainnya.⁵⁷²

Sedangkan, pengalaman masyarakat Australia yang lebih dekat dengan apa yang dirasakan oleh para pengungsi jalur laut adalah pengalaman masyarakat Australia Etnis Vietnam, Kamboja serta *Chinese*.⁵⁷³ Ketiga etnis di Australia tersebut sebelumnya mempunyai pengalaman dan mempunyai sejarah sebagai *boat people* untuk mencapai perbatasan atau perairan Australia walaupun pengalaman tersebut dialami oleh pendatang gelombang

⁵⁶⁹ *Ibid.*

⁵⁷⁰ *Ibid.*

⁵⁷¹ *Ibid.*

⁵⁷² *Ibid.*

⁵⁷³ "Boat Arrivals in Australia Since 1976," Parliament of Australia, diakses 2 Mei, 2018, https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/boatarrivals

pertama.⁵⁷⁴ Etnis Vietnam di Australia sebelumnya datang melalui perahu setelah jatuhnya Saigon ke pasukan komunis tahun 1975.⁵⁷⁵

Dari peristiwa Perang Vietnam tersebut, Australia menerima puluhan ribu pengungsi Vietnam, termasuk sekitar 2.000 orang yang datang ke Australia langsung dengan perahu atau melalui jalur laut.⁵⁷⁶ Dan beberapa tahun selanjutnya, juga terdapat sekitar 300 orang setiap tahun nya yang datang dimana sebagian besar berasal dari Kamboja, Vietnam dan China Selatan.⁵⁷⁷ Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja dan China Selatan itu lah yang kira-kira menurut penulis pernah merasakan situasi persis seperti apa yang pengungsi jalur laut rasakan. Ditandai dengan Etnis Vietnam yang datang melalui perahu karena adanya Perang Vietnam⁵⁷⁸ dan Kamboja serta China Selatan yang datang ke Australia juga melalui jalur laut.⁵⁷⁹

Alasan penulis memaparkan data mengenai pengalaman historis Etnis Vietnam, Kamboja dan China Selatan adalah untuk melihat apakah masyarakat Australia pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan dengan melihat etnis yang pernah datang ke Australia di aspek historis lalu disesuaikan dengan mayoritas kelompok etnis di Australia di tahun-tahun sebelum

⁵⁷⁴ *Ibid.*

⁵⁷⁵ John Masanauskas, "40 Years On, Vietnamese Community Says Thankyou, Australia," *Herald Sun*, 13 Ferbuari, 2015, <http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/40-years-on-vietnamese-community-says-thank-you-australia/news-story/82f40c679e0a84eae2fe3e4b07ace419>

⁵⁷⁶ *Ibid.*

⁵⁷⁷ "Boat Arrivals in Australia Since 1976," Loc.Cit

⁵⁷⁸ John Masanauskas, Loc.Cit.

⁵⁷⁹ "Boat Arrivals in Australia Since 1976," Loc.Cit

ditandatangani nya RSA. Sesuai dengan data yang telah disediakan sebelumnya, walaupun Etnis Vietnam, Kamboja, China Selatan persisnya merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan seperti meninggalkan negara nya karena perang dan menggunakan perahu, tiga etnis tersebut persentase jumlah etnis nya tidak termasuk dalam sepuluh etnis terbanyak di Australia pada tahun 2011 dan pada tahun 2006, tiga etnis tersebut juga tidak termasuk dalam posisi teratas kelompok etnis di Australia.

Dimana pada tahun 2006, Vietnam menduduki posisi etnis kedua belas di Australia sementara etnis Kamboja yang sebagian besar adalah Etnis Khmer ada di *ranking* 44 serta *Chinese Asian* di posisi 189.⁵⁸⁰ Dari fakta tersebut dilihat bahwa walaupun ketiga etnis tersebut pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan, dominasi mereka kecil di Australia di tahun 2006 maupun 2011 seperti yang telah dijelaskan dan telah dikalahkan oleh Etnis *English* yang dimana Etnis *English* tersebut belum pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan karena di pengalaman historis nya, masyarakat tersebut datang ke Australia dibiayai oleh Pemerintah Inggris dan Australia dibawah Skema Pembangunan Australia setelah Perang Dunia Dua⁵⁸¹

⁵⁸⁰ Department of Immigration and Citizenship. 2008. *The People of Australia: Statistics from The 2006 Census*. Department of Immigration and Citizenship. https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/01_2014/poa-2008.pdf

⁵⁸¹ "Post World War II British Migration to Australia," Museums Victoria Collections, diakses 2 Mei, 2018, <https://collections.museumvictoria.com.au/articles/13640>

Lalu terkait pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan gelombang pengungsi sebelumnya dapat disesuaikan dengan pengalaman historis yang dialami masyarakat Australia dengan gelombang *boat people* atau pengungsi jalur laut di Australia. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Jacobsen, jika arus masuk sebelumnya telah membawa sebuah masalah di wilayah terkait, maka suasana kebencian masih bertahan di wilayah tersebut. Berhubungan dengan hal diatas, gelombang pertama yaitu tahun 1976 hingga 1981 dari ‘boat people,’ pada awalnya gelombang tersebut diterima oleh publik Australia dengan simpati yang pada akhirnya kedatangan berikutnya semakin meningkatkan perhatian dari publik Australia.⁵⁸²

Dalam beberapa waktu dekat setelah gelombang pertama tersebut, diskusi publik Australia fokus terhadap isu adanya pengangguran yang semakin meningkat dan dampak dari manusia yang ‘*jumping the immigration queue*,’ atau istilah mendahului antrian.⁵⁸³ Isu *boat arrivals* pada masa Pemilihan Federal Australia tahun 1977 menjadi topik dominan di media Australia dengan klaim luas bahwa pada saat itu Australia seperti kehilangan kontrol terkait seleksi migran.⁵⁸⁴ Lalu seiring dengan jumlah individu yang

⁵⁸²“Boat Arrivals in Australia Since 1976,” Parliament of Australia, diakses 2 Mei, 2018, https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/boatarrivals

⁵⁸³ *Ibid.*

⁵⁸⁴ *Ibid.*

sampai di Australia menggunakan perahu meningkat, pihak yang tidak setuju juga semakin meningkat.⁵⁸⁵

Ditandai dengan istilah-istilah seperti '*invasion*', '*flood*' dan '*yellow peril*' tersebar luas.⁵⁸⁶ Selain adanya istilah-istilah tersebut, ketidakpuasan masyarakat Australia terhadap jumlah individu perahu yang tiba di Australia dan diizinkan untuk tinggal, melebar, hingga munculnya gerakan serikat buruh dari Waterside Workers' Federation tahun 1977.⁵⁸⁷

Pada gerakan tersebut, para buruh menyuarakan pemogokan dan melakukan protes karena *boat people* dikatakan lebih mendapatkan perlakuan istimewa atau '*preferential treatment*.'⁵⁸⁸ Setelah dipaparkan tentang pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan pengungsi sebelumnya serta data mengenai jika masyarakat di negara penerima pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan, di paragraf selanjutnya penulis akan menyimpulkan parameter pengalaman historis ini.

Penulis menyimpulkan bahwa parameter pengalaman historis ini mempunyai pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia yang negatif karena dominasi masyarakat Etnis di Australia adalah Etnis *English* yang tidak merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan di aspek historis karena Etnis *English*

⁵⁸⁵ *Ibid.*

⁵⁸⁶ *Ibid.*

⁵⁸⁷ *Ibid.*

⁵⁸⁸ *Ibid.*

tersebut sendiri terbang ke Australia dibiayai oleh Pemerintah Inggris dan Australia.

Walaupun terdapat masyarakat etnis di Australia yang pernah merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan seperti Etnis Vietnam, Kamboja dan China yang meninggalkan negara nya karena perang dan menggunakan perahu, etnis tersebut tidak mendominasi kelompok etnis di Australia yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Australia tidak merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan karena etnis di Australia didominasi oleh Etnis *English*.

Terlebih lagi, adanya faktor pengaruh tersebut juga ditandai dengan adanya pengalaman historis yang dialami masyarakat dengan gelombang pengungsi sebelumnya bahwa pengalaman tersebut, menurut penulis bukan merupakan pengalaman baik atau menyenangkan walaupun pada awalnya termasuk baik namun seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi jalur laut yang tiba, istilah-istilah buruk mulai muncul hingga sampai adanya protes yang dilakukan oleh para tenaga kerja dari Waterside Workers' Federation di Australia pada tahun 1977.

Dengan adanya dua aspek tersebut, respon kebijakan negatif yang dilakukan Australia lebih mungkin terjadi karena terdapat pengalaman historis cukup buruk serta dominasi masyarakat Australia sendiri di aspek historis nya tidak merasakan apa yang

pengungsi jalur laut rasakan. Yang maka dari itu parameter ini memiliki pengaruh bagi Australia dalam menandatangani RSA yang mana RSA sendiri adalah bentuk respon negatif. Karena adanya pengalaman historis cukup buruk serta masyarakat Australia sendiri tidak merasakan apa yang pengungsi jalur laut rasakan, hasil respon kebijakan nya akan negatif termasuk bersifat *endangering their safety*.

Berbeda ketika pengalaman historis nya baik dan warga Australia dapat merasakan atau memiliki sejarah hampir sama dengan apa yang dialami oleh pengungsi jalur laut, hasil respon kebijakan nya akan positif.

5.3.2.4. Keyakinan Terhadap Pengungsi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di kajian konseptual mengenai penjelasan dari parameter keyakinan terhadap pengungsi ini, parameter keempat dari indikator keterbukaan sosial akan mengarah kepada keyakinan mengenai alasan mengapa pengungsi datang, apakah datang hanya untuk alasan ekonomi atau dipandang bahwa mereka benar-benar dalam bahaya dan butuh bantuan atau dalam kata lain apakah gelombang tersebut benar-benar pengungsi atau tidak. Selain itu, parameter ini juga melihat simpati masyarakat terhadap gelombang tertentu.

Pengungsi dan pencari suaka yang ada di Nauru OPC merupakan gelombang yang datang melalui jalur laut. Maka dari

itu disini penulis akan mengarah kepada keyakinan masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut. Dalam menyajikan data mengenai keyakinan masyarakat Australia, penulis akan menjelaskan melalui hasil poling yang dilakukan oleh beberapa badan, pihak, maupun institusi. Dimulai dari beberapa tahun sebelum 2014 maupun beberapa hari maupun bulan sebelum tanggal 26 September 2014 atau tanggal RSA ditandatangani.

Di paragraf kali ini dan beberapa paragraf selanjutnya akan disajikan hasil poling mengenai keyakinan masyarakat Australia terhadap pengungsi dalam hal apakah mereka hanya datang untuk alasan ekonomi dan bukan benar-benar pengungsi atau keyakinan masyarakat Australia mempercayai bahwa pengungsi dan pencari suaka jalur laut adalah pengungsi. Disini, Jacobsen menekankan bahwa respon dari masyarakat lokal terhadap pengungsi dianggap penting karena dapat membantu pengungsi secara langsung nantinya dan karena respon masyarakat akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁵⁸⁹

Data yang akan disajikan dimulai dari hasil laporan Essential Report. Essential Report melakukan survey pada 21 Januari 2014 yang hasilnya adalah, ketika ditanyakan pendapat masyarakat Australia terkait apakah pencari suaka yang sampai di Australia menggunakan perahu adalah benar-benar pengungsi atau

⁵⁸⁹ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 670, DOI: 10.2307/2547631

tidak.⁵⁹⁰ Hasilnya, proporsi terbesar yaitu sebanyak 47% menyatakan bahwa pencari suaka jalur laut tersebut bukan *genuine refugees*.⁵⁹¹ Dan sisanya yaitu sebanyak 30% mengatakan bahwa mereka merupakan benar-benar pengungsi serta 23% masyarakat Australia merespon tidak tahu.⁵⁹²

Lalu dalam paragraf selanjutnya akan menyajikan mengenai rasa simpati yang dirasakan oleh masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut karena rasa simpati ini juga disebutkan dalam parameter *beliefs about refugees* oleh Jacobsen. Dalam aspek ini, penulis menemukan bahwa di tahun 2012 dalam sebuah survey nasional yang disiapkan untuk United Nations Refugee Agency, setengah dari masyarakat Australia mengatakan bahwa mereka merasa kurang simpatik terhadap pengungsi yang datang menggunakan jalur laut dibandingkan dengan mereka yang datang melalui jalur udara atau kamp pengungsi di luar Australia.⁵⁹³

Dan pada Maret 2013, menurut hasil poling yang dilakukan oleh Lowy Institute, menyatakan bahwa sebanyak 58% masyarakat Australia berpikir bahwa *offshore processing* menjadi pilihan yang tepat untuk memproses pencari suaka tidak sah atau *unauthorized*

⁵⁹⁰ "Asylum," Monash University, diakses 28 April, 2018, <https://www.monash.edu/mapping-population/public-opinion/surveys/inventory-of-surveys/asylum>

⁵⁹¹ *Ibid.*

⁵⁹² *Ibid.*

⁵⁹³ Michael Gordon, "Refugees are 'boat people' to most, UN Survey Finds," *The Age*, 18 Juni, 2012, <http://www.theage.com.au/federal-politics/political-news/refugees-are-boat-people-to-most-un-survey-finds-20120617-20ide.html>

*asylum seekers*⁵⁹⁴. Dan sisanya yaitu sebanyak 35% dalam posisi melawan pilihan tersebut, pilihan untuk memproses pencari suaka tidak sah di *offshore processing*.⁵⁹⁵ Poling yang disajikan oleh Lowy Institute melihat bahwa masyarakat Australia tidak mempercayai pencari suaka tidak sah yang biasanya ditunjukkan kepada mereka yang datang melalui jalur laut untuk diproses statusnya di Australia.

Dilihat dari adanya rasa simpati yang kecil terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut serta adanya pandangan negatif bahwa mereka yang datang dari jalur laut adalah bukan benar-benar pengungsi, maka parameter keyakinan terhadap pengungsi ini dapat dikatakan, menurut penulis, disertai dengan fakta-fakta yang ada, mempunyai pengaruh dalam penandatanganan RSA oleh Australia.

Karena, jika masyarakat memandang bahwa pengungsi-pengungsi maupun pencari suaka yang datang adalah murni karena memang sedang berada dalam bahaya yang nyata di negara asalnya atau sesuai dengan definisi pengungsi itu sendiri, respon yang akan muncul adalah baik dan akan dibantu pada akhirnya⁵⁹⁶. Namun dalam kasus keyakinan masyarakat Australia terhadap pengungsi jalur laut ini terlihat negatif karena tidak meyakini

⁵⁹⁴ "Asylum," Loc.Cit.

⁵⁹⁵ *Ibid.*

⁵⁹⁶ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 670, DOI: 10.2307/2547631

bahwa mereka adalah pengungsi dan rasa simpati terhadap gelombang tersebut tidak besar.

Maka dari itu respon kebijakan yang lahir adalah negatif atau bersifat *endangering their* (pengungsi) *safety* salah satunya karena keyakinan masyarakat Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka jalur laut lebih ke arah bukan *genuine refugees* dan rasa simpati hanya kecil. Berhubungan dengan hal tersebut, RSA sendiri merupakan respon kebijakan pemerintah yang tergolong *restrictive* atau *endangering their safety* atau negatif menurut Jacobsen.

5.4 Variabel National Security Considerations

Variabel ini adalah rangkaian variabel terakhir dari model Jacobsen. Isi dari variabel ini sendiri terdapat dimensi parameter dimensi strategis, dimensi rezim dan dimensi struktural. Yang mana setiap parameter nya dipisahkan per sub-bab.

5.4.1. Pengungsi sebagai Ancaman Keamanan

5.4.1.1. Dimensi Strategis

Dimensi strategis ini sebenarnya hampir memiliki kesamaan dengan variabel pertama yaitu *bureaucratic choices*. Variabel ancaman strategis ini menggabungkan pandangan tradisional keamanan seperti contohnya adalah kemampuan negara untuk mempertahankan wilayahnya dengan cara militer dari

serangan eksternal.⁵⁹⁷ Ketika semakin meningkatnya ancaman keamanan, badan militer menjadi semakin berpengaruh dalam urusan nasional dan personil dari militer tersebut cenderung lebih peduli dengan ancaman keamanan dibandingkan dengan kesejahteraan pengungsi.⁵⁹⁸

Penahanan sering mempunyai arti, mengendalikan pengungsi dengan menolak mereka untuk masuk, membatasi pergerakan dengan menempatkan gelombang pengungsi di kamp atau mempraktikkan tindakan *refoulement*.⁵⁹⁹ Dalam hal ini, Pemerintah Australia dalam menangani pengungsi jalur laut yang ditahan di OPC Nauru, awalnya ditangani oleh militer⁶⁰⁰ serta hingga di Pusat Tahanan nya juga dikepalai oleh Badan Militer Australia.⁶⁰¹ Selain itu, adanya kemampuan negara untuk mempertahankan negara nya secara militer dari serangan eksternal juga lekat hubungan nya dengan akan adanya tindakan *refoulement*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari adanya informasi tersebut diatas yang menyatakan bahwa pengungsi jalur laut ditangani oleh militer dari awal hingga di Pusat Tahanan nya, menurut penulis Pemerintah Australia

⁵⁹⁷ *Ibid.*, 672.

⁵⁹⁸ *Ibid.* 673.

⁵⁹⁹ *Ibid.*

⁶⁰⁰ Carol Hills, "For the Asylum-Seekers in One of Australia's Controversial Offshore Detention Camps, There's Good News and Bad News," *PRI*, 8 September, 2017, <https://www.pri.org/stories/2017-09-08/asylum-seekers-one-australias-controversial-offshore-detention-camps-theres-good>

⁶⁰¹ "Offshore Processing Centres in Nauru and Papua New Guinea: Contract Management of Garrison Support and Welfare Services," Australian National Audit Office, diakses 3 April, 2018, <https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/offshore-processing-centres-nauru-and-papua-new-guinea-contract-management>

menganggap bahwa pengungsi jalur laut yang ada di OPC Nauru adalah sebuah ancaman strategis bagi negara nya. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Jacobsen, variabel ancaman strategis ini menggabungkan keamanan tradisional seperti adanya kemampuan negara untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan eksternal dengan cara militer.

Tindakan Australia dengan cara mengerahkan militer terhadap pengungsi jalur laut di Pusat Nauru sejak kontak pertama hingga proses ditahannya mereka menandakan bahwa Australia mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya untuk melindungi negara nya dari ancaman eksternal. Terlebih lagi, *Operation Sovereign Borders* (OSB) atau badan militer yang memimpin Pusat Tahanan Nauru dan Manus memiliki tujuan untuk memerangi perdagangan manusia melalui jalur laut dan melindungi perbatasan Australia.⁶⁰²

Dilihat dari tujuan OSB tersebut, pengungsi jalur laut dianggap menjadi bahaya bagi Australia hingga Pemerintah nya sendiri sampai mengerahkan sebuah badan militer khusus yang memiliki tujuan untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Dan dalam parameter dimensi strategis ini penulis menyimpulkan bahwa dimensi ini memiliki pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia yang

⁶⁰² “Operation Sovereign Borders,” Australian Government, diakses 3 April, 2018, <http://osb.homeaffairs.gov.au/>

tergolong negatif karena adanya ancaman strategis yang dirasakan oleh Negara Kangguru ini.

Jika Australia tidak merasakan ancaman strategis, seharusnya respon kebijakan nya akan positif tetapi pada fakta nya negara ini merasakan ancaman tersebut yang menyebabkan respon kebijakan yang akan lahir adalah negatif termasuk respon dengan menandatangani RSA dengan Kamboja yang menjadi jenis respon kebijakan *endangering their* (pengungsi) *safety*,

5.4.1.2. Dimensi Rezim

Pada dimensi nomor dua variabel *national security considerations* ini menekankan kepada ancaman yang dirasakan pemerintah negara penerima. Pemerintah merasa terancam ketika pengungsi memasuki wilayah nya dengan ditandai oleh konflik etnis yang bersifat aktual maupun potensial yang dapat berakhir pada usaha untuk merubah proporsi etnis di negara penerima.⁶⁰³ Seperti contohnya kasus yang terjadi di pergerakan Warga Irian Jaya ke wilayah Papua New Guinea dan Masyarakat Laos ke area Thailand-Laos.⁶⁰⁴

Dalam kasus penelitian penulis, yang subjek nya adalah pengungsi di OPC Nauru, penekanan yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya tidak dapat diterapkan karena pengungsi di

⁶⁰³ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 673, DOI: 10.2307/2547631

⁶⁰⁴ *Ibid.*

Tahanan Nauru sendiri adalah *boat-people* dan tidak dapat masuk wilayah Australia melainkan dikirim ke Nauru atau Pulau Manus sejak tahun 2012.⁶⁰⁵ Sebelumnya, praktik ini juga diterapkan pada tahun 2001 hingga 2008 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2012.⁶⁰⁶

Namun walaupun begitu, Jacobsen menyatakan bahwa terdapat satu strategi luas yang menerapkan kontrol lebih besar terhadap pengungsi.⁶⁰⁷ Strategi tersebut diterapkan pemerintah negara penerima ketika pemerintah tersebut sebenarnya merasa terancam dengan adanya kehadiran gelombang terkait walaupun pengungsi secara langsung tidak terlibat dalam pertengkarannya domestik.⁶⁰⁸ Satu strategi luas tersebut adalah memisahkan pengungsi dari populasi lokal dengan menempatkan gelombang tersebut di kamp dibandingkan dengan mengizinkan mereka untuk menetap sendiri.⁶⁰⁹

Ketika sebenarnya tidak ada masalah etnis yang potensial, pemerintah lebih memilih untuk menempatkan pengungsi di sebuah kamp karena dengan melakukan hal tersebut, akan mengurangi adanya *political saliency* dalam komunitas lokal.⁶¹⁰

Selain itu, pengungsi di kamp akan lebih mudah dimonitor,

⁶⁰⁵ "Offshore Processing," Refugee Council of Australia, diakses 8 Mei, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing/>

⁶⁰⁶ *Ibid.*,

⁶⁰⁷ Karen Jacobsen., Loc.Cit.

⁶⁰⁸ *Ibid.*

⁶⁰⁹ *Ibid.*

⁶¹⁰ *Ibid.*

dikontrol dan lebih mudah tercatat atau terdaftar.⁶¹¹ Dari kalimat yang sudah penulis sebutkan tersebut, apa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Australia dalam studi kasus penulis dapat mewakili adanya ancaman yang dirasakan oleh negara tersebut walaupun pengungsi di Pusat Tahanan Nauru tidak dapat memasuki wilayah Australia dan tidak dapat secara langsung menghasilkan konflik etnis, menurut penulis Pemerintah Australia sudah lebih dahulu merasakan bahwa pengungsi jalur laut yang ada di Pusat Tahanan Nauru menjadi ancaman bagi negara nya.

Adanya ancaman tersebut ditandai dengan diterapkan nya satu strategi luas oleh Pemerintah Australia, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Jacobsen. Satu strategi luas tersebut adalah memisahkan pengungsi jalur laut dari populasi lokal Australia dengan menempatkan mereka di Pusat Tahanan Nauru dibandingkan dengan mengizinkan gelombang tersebut untuk bebas menempatkan diri sendiri.⁶¹² Jadi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mencerminkan bahwa negara tersebut merasa bahwa pengungsi jalur laut menimbulkan ancaman keamanan rezim karena tindakan yang dilangsungkan Australia sendiri mendeskripsikan bahwa pengungsi perahu memang merupakan sebuah ancaman bagi dimensi strategis, setelah penulis sesuaikan dengan apa yang ditulis oleh Jacobsen sendiri.

⁶¹¹ *Ibid.*

⁶¹² "Offshore Processing," Loc.Cit.

Selain itu, strategi luas tersebut merupakan implementasi dari adanya perasaan terancam yang dirasakan oleh Pemerintah Australia dimana ketika pemerintah merasa terancam, tindakan yang akan muncul adalah menerapkan kontrol yang lebih besar terhadap pengungsi yang salah satunya menempatkan mereka di sebuah kamp. Jadi, pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa dimensi rezim memiliki pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia yang tergolong menjadi respon kebijakan negatif.

Karena tindakan Pemerintah Australia kepada pengungsi jalur laut yang ada di OPC Nauru mencerminkan bahwa Australia merasa bahwa gelombang tersebut adalah sebuah ancaman rezim bagi negara nya, dengan menerapkan satu strategi luas yaitu dengan cara menempatkan mereka di kamp. Ketika sebuah negara merasa bahwa gelombang pengungsi terkait merupakan sebuah ancaman, dalam hal ini adalah ancaman rezim, maka respon kebijakan yang lahir akan negatif bukan positif, seperti apa yang ditulis oleh Jacobsen.

5.4.1.3. Dimensi Struktural

Dimensi struktural menyebut terkait keseimbangan antara populasi negara dan sumber daya seperti pangan, air serta ruangan untuk hidup. Keseimbangan ini terganggu ketika permintaan populasi pada sumber daya tersebut, tinggi dan pemerintah

kesulitan dalam mengatur nya.⁶¹³ Untuk menganalisis dimensi ini dan dihubungkan dengan kalimat sebelumnya tersebut, penulis akan menganalisis dengan cara melihat apakah *boat-people* pernah dilihat oleh Australia sebagai gelombang yang dapat mengancam sumber daya nya.

Selanjutnya, mencari data tentang jumlah *boat-people* yang ada di pusat penahanan pengungsi jalur laut milik Australia di Nauru pada waktu tertentu serta mencari pernyataan oleh beberapa tokoh, jika ada, apakah biaya untuk menjalankan pusat pengolahan pengungsi lepas pantai di Nauru tergolong mahal atau tidak. Demikian urutan singkat mengenai apa yang akan penulis sajikan di beberapa paragraf dan halaman selanjutnya. Di paragraf ke tiga, penulis akan mulai menyajikan data yang berkaitan dengan sifat lebih lengkap serta dihubungkan dengan apa yang menjadi penekanan Jacobsen dalam model nya.

Pertama-tama, pengungsi jalur laut atau yang biasa disebut dengan *boat-people* memang sudah dipandang sebagai kelompok yang berbahaya sejak tahun 1990-an dan dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Australia, bagi sumber daya di Australia dan juga dianggap menjadi ancaman kepada cara pandang masyarakat Australia itu sendiri, karena mereka memasuki wilayah

⁶¹³ Karen Jacobsen, Op.Cit, 672.

Australia tanpa otorisasi.⁶¹⁴ Berhubungan dengan hal ini, Pemerintah Australia tidak berbuat banyak untuk menghilangkan persepsi semacam itu, sebaliknya, malah terus memicu timbulnya prasangka.⁶¹⁵

Sedangkan alokasi untuk biaya sumber daya yang mendukung hidup pengungsi di pusat penahanan milik Australia di Nauru, seperti contohnya makanan dan lain-lain, mengisi biaya paling besar dibandingkan biaya lainnya. Dimana alokasi untuk biaya sumber daya tersebut diringkas dengan judul '*garrison and welfare*' dalam tabel yang dipublikasi oleh media ABC Net.⁶¹⁶

Biaya *garrison and welfare* sendiri memiliki alokasi biaya sebanyak \$316,900,000 menjadikan nya sebagai bagian paling mahal dibandingkan dengan bagian alokasi lainnya di tahun 2014 hingga 2015.⁶¹⁷

Hal tersebut dapat dihubungkan dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di OPC Nauru pada beberapa bulan sebelum bulan September 2014. Dalam tabel yang akan penulis sajikan berikutnya, dapat dilihat bahwa di tahun 2014 dan satu

⁶¹⁴ Bem, Kazimiers, Nina Field, Nic Maclellan, Sarah Meyer dan Tony Morris. 2007. *A Price Too High: The Cost of Australia's Approach to Asylum Seekers*. A Just Australia, Oxfam Australia dan Oxfam Novib, <https://www.oxfam.org.nz/sites/default/files/oldimags/a%20price%20too%20high.pdf>

⁶¹⁵ *Ibid.*

⁶¹⁶ ABC Net, "Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing Centre than the UN Spends on Refugee Program in South East Asia?," *ABC Net*, <http://www.abc.net.au/news/2015-07-14/cost-of-offshore-processing-united-nations-fact-check/6609764>

⁶¹⁷ *Ibid.*

bulan sebelum September 2014, jumlah individu yang ada di Pusat Tahanan Nauru sedang tinggi-tinggi nya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Jacobsen, informasi tersebut mengganggu keseimbangan antara populasi negara dengan permintaan sumber daya. Karena ketika populasi semakin banyak, otomatis permintaan terhadap sumber daya alam semakin meningkat juga.

Walaupun pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pusat Tahanan Nauru bukan merupakan masyarakat Australia, namun tanggung jawab mereka ada ditangan Pemerintah Australia termasuk tanggung jawab mengenai sumber daya makanan, fasilitas istirahat, mandi dan lain-lain yang dilabeli dengan sebutan *'garrison and welfare.'*⁶¹⁸ Tanggung jawab tersebut ditandai dengan tabel deskripsi alokasi biaya Pusat Tahanan Nauru yang dipublikasi oleh Media ABC Net⁶¹⁹ dan pernyataan yang ditulis di website UNHCR bahwa kesejahteraan pengungsi berada pada tangan Pemerintah Australia⁶²⁰ Berikut, dalam halaman selanjutnya, terdapat tabel dari jumlah pengungsi dan pencari

⁶¹⁸ Commonwealth of Australia. 2014. Official Committee Hansard: Senate: Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee. Commonwealth of Australia. http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/estimate/e0ac4873-6e45-47ec-b82f-7eb06a2dd45f/toc_pdf/Legal%20and%20Constitutional%20Affairs%20Legislation%20Committee_2014_10_20_2981_Official.pdf

⁶¹⁹ ABC Net, "Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing Centre than the UN Spends on Refugee Program in South East Asia?," *ABC Net*, <http://www.abc.net.au/news/2015-07-14/cost-of-offshore-processing-united-nations-fact-check/6609764>

⁶²⁰ "Assistance," UNHCR, diakses 23 April, 2018. <http://www.unhcr.org/assistance-in-australia-and-the-region.html#g>

suaka yang ada di OPC Nauru sejak akhir tahun 2012 dan beberapa bulan sebelum September 2014,

Month	Numbers at PNG Processing Centre	Numbers at Nauru Processing Centre	TOTAL at Processing Centres
27 Sept 2012	0	150	150
Oct 2012	0	377	377
29 Nov 2012	19	386	405
30 Dec 2012	155	366	521
Jan 2013	235	415	650
Feb 2013	274	412	686
Mar 2013	254	424	678
Apr 2013	294	420	714
May 2013	302	428	730
Jun 2013	253	490	743
Jul 2013	27	544	571
Aug 2013	538	486	1024#
Sep 2013	858	769	1627
Oct 2013	1137	591	1728
Nov 2013	1139	686	1825
Dec 2013	1229	838	2067
Jan 2014	1353	1012	2365
Feb 2014	1325	1107	2432
Mar 2014	1225	1170	2395
Apr 2014	1273	1177	2450
May 2014	1225	1170	2395
Jun 2014	1189	1169	2358
Jul 2014	1127	1146	2273
Aug 2014	1084	1233	2317

Gambar 19: Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Pusat Penahanan Pengungsi Jalur Laut Milik Australia di Pulau Manus dan Nauru Tahun 2012-2014⁶²¹

⁶²¹ "Australia's Offshore Processing of Asylum Seekers in Nauru and PNG: A Quick Guide to Statistics and Resources," Parliament of Australia, diakses 7 Mei, 2018, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore

Dapat dilihat dari tabel di halaman sebelumnya, tahun 2014 menjadi tahun dengan adanya peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Nauru *Offshore*. Peningkatan tersebut terjadi cukup tinggi karena pada tahun sebelumnya, jumlah pengungsi dan pencari suaka tidak ada yang mencapai angka seribu. Peningkatan tersebut terutama sangat terlihat pada bulan Agustus 2014, pada satu bulan sebelum penandatanganan RSA oleh Australia dan Kamboja di tanggal 26 September bulan September 2014.

Terlebih lagi, sumber daya seperti makanan dan lain-lain menjadi hal yang paling dialokasikan dengan biaya besar pada tahun 2014-2015 dibandingkan dengan hal lainnya.⁶²² Biaya yang telah dikeluarkan oleh Australia di masing-masing Pusat Tahanan juga tergolong mahal ditandai dengan salah satu pernyataan dari pihak Save the Children. CEO Save the Children, Paul Ronalds mengatakan bahwa setiap tahun nya sejak tahun 2013, biaya untuk menghidupi satu pengungsi atau pencari suaka di OPC Manus atau Nauru adalah sebanyak \$400 ribu.⁶²³

Selain itu, Ronalds juga menambahkan bahwa masyarakat Australia ini seperti hanya sedikit memiliki pengetahuan mengenai

⁶²² ABC Net, "Fact Check: Does Australia Spend More on Offshore Processing Centre than the UN Spends on Refugee Program in South East Asia?," *ABC Net*, <http://www.abc.net.au/news/2015-07-14/cost-of-offshore-processing-united-nations-fact-check/6609764>

⁶²³ Matt Watson, "Border Protection Policies Cost Australia \$10b in Three Years, International Aid Groups Finds," *ABC Net*, 13 September, 2016, <http://www.abc.net.au/news/2016-09-13/offshore-detention-cost-australia-10-billion-in-three-years/7837388>

apa yang telah dilakukan baik dalam atas nama mereka atau dengan pembayar pajak yang mana biaya menjalankan pusat pengolahan pengungsi lepas pantai ini sangatlah besar.⁶²⁴ CEO Save the Children tersebut menganggap bahwa hal tersebut harus berubah karena kita butuh sebuah sistem yang efektif dan sebenarnya diluar sana masih terdapat kebijakan alternatif terhadap sistem yang tergolong sangat mahal dan tidak benar-benar efektif seperti apa yang dijalankan Australia di Pusat Tahanan tersebut.⁶²⁵

Informasi-informasi yang telah penulis sebutkan sebelumnya tersebut menjadi bahan untuk analisis. Sesuai dengan apa yang Jacobsen katakan, dimensi struktural menyebutkan mengenai keseimbangan antara populasi dengan sumber daya yang ada. Walaupun pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pusat Nauru bukanlah masyarakat Australia, tanggung jawab termasuk mengenai makanan dan lain-lain tetap berada di tangan Australia. Pada awal tahun 2014 terutama di bulan Agustus, terjadi peningkatan terhadap jumlah populasi pengungsi dan pencari suaka di Pusat Nauru dan menurut penulis hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan antara populasi yang menjadi tanggung jawab Australia dengan sumber daya.

Karena semakin banyaknya populasi yang ada, permintaan terkait sumber daya alam semakin meningkat. Ditambah dengan

⁶²⁴ *Ibid.*

⁶²⁵ *Ibid.*

adanya alokasi Pemerintah Australia terhadap *garrison and welfare* yang tidak murah dan menjadi yang termahal ditengah alokasi hal lainnya. Pada akhir bulan Mei 2014, Pemerintah Australia juga mengumumkan bahwa Pemerintah akan menarik sebanyak \$140 ribu dalam pendanaan tahunan untuk *Refugee Council of Australia*, organisasi utama Australia mengenai pengungsi.⁶²⁶

Media the Conversation mengatakan bahwa hal tersebut menjadi satu contoh bagaimana Pemerintah Australia sedang mencari cara untuk menyimpan beberapa dolar namun mengabaikan cara yang jelas untuk menghemat uang terkait cara memproses pencari suaka di Australia.⁶²⁷ Disini, penulis menganalisis bahwa adanya peningkatan jumlah populasi pengungsi dan pencari suaka di Pusat Nauru terutama di bulan Agustus membuat keseimbangan antara populasi dan sumber daya sedang sangat terganggu, walaupun mereka bukan masyarakat Australia tetapi Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab terhadap gelombang tersebut yang mana dengan memberikan alokasi untuk makanan dan lain-lain dalam label *garrison and welfare*.

Selain itu, penulis menganalisis bahwa keseimbangan tersebut sedang sangat terganggu juga karena adanya informasi dari media the Conversation yang pada akhir bulan Mei 2014,

⁶²⁶ Joyce Chia dan Claire Higgins, "Penny Wise, Pound Foolish: How to Really Save Money on Refugees," *The Conversation*, 12 Juni, 2014, <https://theconversation.com/penny-wise-pound-foolish-how-to-really-save-money-on-refugees-27270>

⁶²⁷ *Ibid.*

Pemerintah Australia menarik beberapa dana dari sebuah organisasi pengungsi utama Australia yang kesimpulannya pemerintah sedang menyimpan beberapa dolar untuk hal pencari suaka. Lalu, informasi mengenai alokasi untuk *garrison* dan *welfare* yang tidak murah tersebut menambahkan adanya pengaruh bahwa jika alokasi terhadap hal tersebut sudahlah tinggi, dan ditambahkan dengan data bahwa populasi pengungsi dan pencari suaka mendekati September 2014 sedang tinggi-tinggi nya, maka keseimbangan antara populasi dan sumber daya memang sedang benar-benar terganggu.

Oleh karena nya, penulis menyimpulkan bahwa parameter dimensi struktural ini mempunyai pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia pada tanggal 26 September 2014 yang dinilai adalah merupakan respon kebijakan negatif menurut penggolongan Model Jacobsen. Terlebih lagi, di Model Jacobsen pernah tertulis bahwa, "*the appearance of large numbers of asylum seekers can be rather sudden, creating emergency problems and forcing governments to act quickly-something most governments are reluctant to do,*"⁶²⁸

Kalimat tersebut dapat lebih menambahkan pengaruh terhadap penandatanganan RSA oleh Australia karena jumlah besar dari pencari suaka dan pengungsi yang ada di Pusat Tahanan Nauru

⁶²⁸ Karen Jacobsen, "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influx," *International Migration Review* Vol. 30, No. 3, (1996): 657, DOI: 10.2307/2547631

melonjak cukup tinggi sejak tahun 2014 terutama di satu bulan sebelum September 2014 yang dampaknya nanti, sesuai kalimat pada Model Jacobsen, dapat membuat masalah darurat yang memaksa pemerintah untuk bertindak cepat yang dimana pemerintah sendiri sebenarnya enggan untuk melakukan nya.

Keadaan jumlah pengungsi yang meningkat tahun 2014 dan selalu meningkat sejak Bulan Januari hingga satu bulan sebelum September 2014, menurut penulis dapat membuat masalah darurat yang memaksa Pemerintah Australia untuk bertindak cepat yang dimana pemerintah Australia sendiri sebenarnya enggan untuk melakukan nya. Dan menurut penulis sendiri dari pernyataan tersebut yang terdapat di Model Jacobsen, karena jumlah besar dari adanya pencari suaka dan pengungsi yang ada di Pusat Tahanan Nauru sejak tahun 2014 dan satu bulan sebelum September 2014, memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan cepat.

Yang mana dengan adanya keharusan untuk bertindak lebih cepat yang dapat berbentuk sebuah kebijakan untuk pengungsi yang ada di Pusat Tahanan Nauru, kualitas kebijakan tersebut menurut penulis tidak akan se-matang kualitas kebijakan pemerintah ketika tidak sedang dipaksakan oleh keadaan yang mana dalam kasus ini, dengan adanya jumlah pengungsi di OPC Nauru yang semakin meningkat sejak Januari 2014, membuat Pemerintah Australia untuk bertindak cepat atau mengeluarkan

kebijakan secepat mungkin yang mana keputusan nya adalah dengan membentuk perjanjian Australia-Kamboja.

Pada intinya, menurut penulis tindakan Australia untuk akhirnya menandatangani perjanjian RSA dengan Kamboja juga disebabkan oleh adanya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang semakin meningkat di Pusat Tahanan Nauru yang pada akhirnya memaksa Pemerintah Australia membuat tindakan cepat. Tindakan cepat tersebut hasilnya adalah membuat kesepakatan dengan Kamboja untuk mengambil beberapa pengungsi dari Nauru karena keadaan nya memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan seperti itu, yang sebenarnya respon kebijakan tersebut terlihat sebagai respon kebijakan yang dipaksakan oleh keadaan dengan waktu membuka obrolan dengan Kamboja hingga penandatanganan nya termasuk singkat dengan hanya memakan waktu 7 bulan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian penulis dengan judul ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Australia dalam Menandatangani Nota Kesepahaman *Refugee Settlement Arrangement* (RSA) dengan Kamboja Tahun 2014, hasilnya sedikit berbeda dengan apa yang telah diprediksi oleh penulis di argumen utama. Dalam argumen utama, penulis menyatakan dan memprediksi bahwa parameter ancaman publisitas di variabel *International Influence* dan parameter dimensi ancaman struktural di variabel *National Security* cenderung lebih banyak mempengaruhi

Sedangkan kesimpulan nya, penulis memutuskan untuk mengikuti logika berpikir dari Model Jacobsen dan pada akhirnya disesuaikan dengan studi kasus penulis. Dimana sebelumnya terdapat parameter yang cenderung lebih banyak mempengaruhi, namun di kesimpulan hanya terdapat parameter yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Alasan dari hal tersebut adalah karena dari Model Jacobsen sendiri, tidak dinyatakan terkait beberapa hal yang akan cenderung mempengaruhi seperti apa aturan nya. Maka dari itu penulis menyesuaikan dengan logika berpikir Jacobsen yang lalu disamakan dengan studi kasus penulis.

Beberapa parameter yang mempengaruhi adalah parameter yang memang hasil data nya mendukung terjadinya respon kebijakan negatif (keputusan Australia menandatangani RSA adalah respon negatif) menurut aturan Jacobsen. Sedangkan beberapa parameter yang tidak mempengaruhi adalah parameter yang

hasil data nya tidak mengarah atau tidak mendukung terjadinya respon kebijakan negatif yang maka dari itu dinyatakan tidak berpengaruh dalam penelitian penulis.

Hasilnya, terdapat tiga belas parameter yang mempengaruhi terhadap munculnya penandatanganan RSA oleh Australia yang mana RSA sendiri merupakan bentuk respon kebijakan yang *restrictive* atau dapat dikatakan negatif. Tiga belas parameter tersebut adalah parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi, bantuan internasional oleh rezim pengungsi internasional, ancaman publisitas oleh rezim pengungsi internasional, kelemahan kelembagaan, hubungan negara pengirim dengan penerima, daya dukung lahan, pola pekerjaan, makna budaya terkait pengungsi, dimensi strategis, dimensi rezim dan dimensi struktural.

Sedangkan tiga parameter yang tidak mempengaruhi adalah parameter ketersediaan tanah, parameter infrastruktur serta parameter etnisitas dan kekerabatan. Parameter ketersediaan tanah tidak berpengaruh karena menurut data yang ditemukan, tanah Australia masih luas yang dimana seharusnya Australia dapat menerima gelombang pengungsi dan respon nya akan positif. Namun faktanya, Australia memutuskan untuk masih memberikan respon kebijakan negatif kepada pengungsi jalur laut dengan mengirim beberapa diantaranya ke Kamboja yang termasuk ke dalam respon kebijakan *endangering their safety* menurut Jacobsen.

Di parameter infrastruktur, kualitas infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, klinik kesehatan serta sekolah ditemukan baik bahkan bagus di Australia. Ketika kapasitas ekonomi, termasuk kapasitas infrastruktur sebuah negara baik, maka negara tersebut seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan

positif namun disini Australia tetap melangsungkan respon kebijakan nya yang negatif. Maka dari itu parameter infrastruktur dikatakan tidak memiliki pengaruh. Lalu di parameter etnisitas dan kekerabatan, penulis menemukan tidak adanya kesamaan etnik antara Australia-pengungsi jalur laut-Kamboja sebagai Negara penerima ketiga.

Sedangkan untuk parameter-parameter yang berpengaruh, berhubungan dengan kondisi bahwa jumlah parameter berpengaruh adalah banyak, penulis disini hanya akan menjelaskan salah satu parameter yang berpengaruh yaitu parameter agensi pemerintah yang menerima pengungsi. Parameter ini menegaskan bahwa ketika sebuah negara menugaskan badan militer untuk menerima pengungsi maka kemungkinan besar respon yang lahir adalah negatif. Lalu temuan penulis menemukan bahwa Australia menugaskan badan militer untuk menerima pengungsi jalur laut. Yang maka dari itu, parameter agensi pemerintah ini menjadi berpengaruh karena respon kebijakan yang lahir benar negatif yaitu kebijakan RSA.

Tujuan penulis masih menjelaskan terkait parameter berpengaruh diatas walaupun hanya satu parameter adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai logika analisis setiap parameter berpengaruh. Tidak hanya logika analisis parameter yang tidak berpengaruh. Untuk parameter-parameter berpengaruh lainnya juga konsep nya sama. Ketika data yang ditemukan mendukung terjadinya respon kebijakan negatif menurut Jacobsen, maka parameter tersebut dikatakan mempunyai pengaruh terhadap kondisi Australia menandatangani RSA dengan Kamboja.

6.2. Saran

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, akan berdasarkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis rasakan serta juga berbasis pada pendapat penulis mengenai aspek seperti apa lagi yang dapat dieksplor untuk penelitian selanjutnya baik dari segi isu maupun model. Disini penulis menyarankan, sebaiknya penelitian selanjutnya yang akan menggunakan model dari Karen Jacobsen ini, memilih studi kasus yang dimana mayoritas negara pengirim pengungsi terfokus ke satu negara karena jika negara pengirim nya banyak seperti studi kasus penulis, analisis nya akan lebih rumit dan panjang serta kurang terfokus.

Selain itu, menurut penulis walaupun Model Karen Jacobsen ini tergolong model yang detail, jika peneliti selanjutnya mempunyai waktu lebih banyak untuk mencari teori, model atau konsep yang lebih rinci lagi, itu lebih baik karena kesimpulan nya nanti akan lebih mengerucut. Berhubung menurut penulis sendiri, Model Karen Jacobsen ini masih cukup umum dilihat dari variabel-variabel nya walaupun dalam menjelaskan nya sudah cukup terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

Internet (Berita)

- “Amnesty International Calls on Cambodia and Australia to Scrap Refugee Deal.” *Khmer Times*, 3 Mei, 2014. <https://www.khmertimeskh.com/news/1237/amnesty-international-calls-on-cambodia-and-australia-to-scrap-refugee--deal->
- AP. “Australia Expands Sanctions Against Iran,” *USA Today*, 10 Januari, 2013, <https://www.usatoday.com/story/news/world/2013/01/09/australia-iran-sanctions-oil/1822399/>
- “Australia and Cambodia Sign Refugee Resettlement Deal,” *BBC*, 26 September, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-asia-29373198>
- “Australia Asks Cambodia to House Asylum Seekers Detained in Transit,” *The Guardian*, 23 Februari, 2014. <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/australia-asks-cambodia-take-asylum-seekers>
- “Australia Asylum: Why is it Conversial?,” *BBC*, 31 Oktober, 2017. <http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608>
- BBC Monitoring. “Cambodia Country Profile.” *BBC News*, 26 Februari, 2018. <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13006539>
- “Cambodia Refugee Deal: UNHCR, Amnesty International Condemn Refugee Resettlement Arrangement.” *ABC News*, 27 September, 2014. <http://www.abc.net.au/news/2014-09-27/unhcr-deeply-concerned-by-australia-cambodia-refugee-relocation/5773242>
- Chanborey, Cheunboran. “Strengthening Cambodia-Australia Ties,” *Khmer Times*, 16 Maret, 2016. <https://www.khmertimeskh.com/news/22862/strengthening-cambodia-australia-ties/>
- Chanveasna, Ros. “Australia Cements Closer Ties,” *Khmer Times*, 19 Oktober, 2017. <http://www.khmertimeskh.com/5086841/australia-cements-closer-ties/>
- Cochrane, Liam. “Australia Strengthen Ties With Cambodia As Sweden ‘Reconsiders Engagement,” *ABC News*, 20 Oktober, 2017. <http://www.abc.net.au/news/2017-10-20/australia-strengthens-ties-with-cambodia-as-sweden-reconsiders/9071856>
- Crothers, Lauren. “Amnesty International Urges Gov’t to Scrap Asylum Seeker Plans.” *The Cambodia Daily*, 3 Mei, 2014. <https://www.cambodiadaily.com/news/amnesty-international-urges-govt-to-scrap-asylum-seeker-plans-57996/>

- Crothers, Lauren., Ben Doherty. "Australia Signs Controversial Refugee Transfer Deal with Cambodia." *The Guardian*, 26 September, 2014. <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/26/australia-signs-refugee-deal-cambodia>
- Crothers, Lauren. "Last Refugee Among Group Australia Sent to Cambodia Returns to Home Country." *The Guardian*, 28 May, 2016. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/28/last-refugee-among-group-australia-sent-to-cambodia-returns-to-home-country>
- Davidson, Helen. "Offshore Detention: Australia's Recent Immigration History a 'Human Rights Catastrophe,'" *The Guardian*, 13 November, 2016. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-auru-immigration-history-human-rights>
- Doherty, Ben. "United Nations Reiterates Demand for Australia to Close 'Dire' Detention Centres," *The Guardian*, 13 August, 2016. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/13/united-nations-reiterates-demand-for-australia-to-close-dire-detention-centres>
- "Fact check: Does Australia Spend More on Offshore Processing Than the UN Spends on Refugee Programs in South East Asia," *ABC News*, 21 Juli, 2015. <http://www.abc.net.au/news/2015-07-14/cost-of-offshore-processing-united-nations-fact-check/6609764>
- Farrell, Paul., Nick Evershed., Helen Davidson. "The Nauru Files: Cache of 2,000 Leaked Reports Reveal Scale of Abuse of Children in Australian Offshore Detention," *The Guardian*, 10 August, 2016. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/10/the-nauru-files-2000-leaked-reports-reveal-scale-of-abuse-of-children-in-australian-offshore-detention>
- Fars News Agency. "Iranian, Australian Officials Stress Expansion of Ties," *The Iran Project*, 12 August, 2013, <https://theiranproject.com/blog/2013/08/12/iranian-australian-officials-stress-expansion-of-ties/>
- Grey, Richard. "How Can We Manage Earth's Land?" *BBC*, 29 Juni, 2017, <http://www.bbc.com/future/story/20170628-how-to-best-manage-earths-land>
- Hawley, Samantha. "Cambodia Close to Signing Off on Refugee Deal with Australia, Says Government." *Abc News*, 19 May, 2014. <http://www.abc.net.au/news/2014-05-19/cambodia-edges-closer-to-refugee-settlement-deal-with-australia/5460918>
- Hawley, Samantha. "Scott Morrison to Sign MoU on Refugee Resettlement, Cambodia Government Says." *Abc News*, 25 September, 2014. <http://www.abc.net.au/news/2014-09-24/scott-morrison-to-head-to-cambodia-to-sign-refugee-resettlement/5766282>

- Hills, Carol. "For the Asylum-Seekers in One of Australia's Controversial Offshore Detention Camps. There's Good News and Bad News." *PRI*, 8 September, 2017. <https://www.pri.org/stories/2017-09-08/asylum-seekers-one-australias-controversial-offshore-detention-camps-theres-good>
- Huffadine, Leith. "Maps Just Show How Empty Australia Is! How the Population Clings To the Coast and Jams Into Tiny Urban Clusters." *Daily Mail UK*, 16 November, 2015. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3320021/Maps-just-Australia-really-population-clings-coast-jams-tiny-urban-clusters.html>
- ISNA. "Australia, Iran Keen to Boost Economic Ties." *The Iran Project*, 21 May, 2014. <https://theiranproject.com/blog/2014/05/21/australia-iran-keen-to-boost-economic-ties/>
- Joyce, Chia., Claire Higgins. "Penny Wise, Pound Foolish: How to Really Save Money on Refugees," *The Conversation*, 12 Juni, 2014. <https://theconversation.com/penny-wise-pound-foolish-how-to-really-save-money-on-refugees-27270>
- Masanauskas, John. "40 Years On, Vietnamese Community Says Thankyou, Australia." *Herald Sun*, 13 Februari, 2015. <http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/40-years-on-vietnamese-community-says-thank-you-australia/news-story/82f40c679e0a84eae2fe3e4b07ace419>
- Masanauskas, John. "Australians Growing More Negative About Asylum Seekers and High Immigration, Survey Finds." *Herald Sun*, 20 Oktober, 2013. <http://www.heraldsun.com.au/news/australians-growing-more-negative-about-asylum-seekers-and-high-immigration-survey-finds/news-story/e41c31026a2059327fe8383324a3123>
- Metcalf, Susan. "Cambodia is No Place to Resettle the Refugee Australia Does Not Want." *The Guardian*, 1 May, 2014. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/01/cambodia-is-no-place-to-resettle-the-refugees-australia-does-not-want>
- Murdoch, Lindsay. "Cambodia's PM Hun Sen Confirms Controversial Agreement to Resettle Refugees from Australia," *The Sydney Morning Herald*, 20 Mei, 2014, <https://amp.smh.com.au/politics/federal/cambodias-pm-hun-sen-confirms-controversial-agreement-to-resettle-refugees-from-australia-20140520-zrh3.html>
- Murdoch, Lindsay. "More Champagne: Australia Upgrades Ties With Cambodia Autocracy," *The Sydney Morning Herald*, 19 Oktober, 2017. <https://www.smh.com.au/world/more-champagne-australia-upgrades-ties-with-democracyscrushing-cambodian-regime-20171019-gz3v36.html>
- Porter, Lizzie. "Mapped: The World's Most – and Least – Crowded Countries." *The Telegraph*, 11 Juli, 2017. <https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/The-worlds-least-densely-populated-countries/>

- Pye, Daniel. "Cambodia and Australia Sign Refugee Deal." *Aljazeera*, 26 September, 2014. <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/cambodia-australia-sign-refugee-deal-nauru-suicide-teen-2014926124117550180.html>
- Sainsbury, Michael. "UN Refugee Agency Slams Cambodia-Australia Deal." *UCA News*, 15 September, 2014. <https://www.ucanews.com/news/un-refugee-agency-slams-cambodia-australia-deal/71943>
- Sainsbury, Michael. "UN Slams New Australia-Cambodia Refugee Deal," *International La Croix*, 15 September, 2014. <https://international.la-croix.com/news/un-slams-new-australia-cambodia-refugee-deal/62>
- Seiff, Abby. "UN's Refugee Office in Cambodia Shrinks," *The Phnom Penh Post*, 8 Januari, 2013. <https://www.phnompenhpost.com/national/un's-refugee-office-cambodia-shrinks>
- Sokchea, Meas. Daniel Pye. "Journalist Killed in Kratie," *The Phnom Penh Post*, 13 Oktober, 2014. <http://www.phnompenhpost.com/national/journalist-killed-kratie>
- "The Cambodia Solution?" *SBS*, <https://www.sbs.com.au/news/dateline/story/cambodian-solution>
- The Guardian. "The Nauru Files: A Short History of Nauru, Australia's Dumping Ground for Refugees," 9 Agustus, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/a-short-history-of-nauru-australias-dumping-ground-for-refugees>
- "Tony Abbott Confirms Bay-Class Patrol Boats Gift to Srilanka To Combat People Smuggling," *ABC News*, 17 November, 2013. <http://www.abc.net.au/news/2013-11-17/abbott-confirms-sri-lanka-boats-deal/5097580>
- Watson, Matt. "Border Protection Policies Cost Australia \$10b in Three Years, International Aid Groups Finds," 13 September, 2016. <http://www.abc.net.au/news/2016-09-13/offshore-detention-cost-australia-10-billion-in-three-years/7837388>
- Whyte, Sarah. "Sri Lanka Thanks Australia for Its Bold Decision," *The Sydney Morning Herald*, 6 May, 2014, <https://www.smh.com.au/politics/federal/sri-lanka-thanks-australia-for-its-bold-decision-20140506-zr5n9.html>
- Yun, Samean. "Cambodia Looking Into Australian Refugee Request." *Radio Free Asia*, 24 Februari, 2014. <http://www.rfa.org/english/news/cambodia/refugees-02242014175437.html>
- Yun, Samean. "Rights Group Cites 'Major Concerns' in Cambodia-Australia Refugee Deal," *Radio Free Asia*, 4 Juni, 2014. <https://www.rfa.org/english/news/cambodia/refugees-06032014171848.html>

Internet (Konten Website)

- Amnesty. "Australia and Cambodia Should Scrap Asylum Seeker Deal." Diakses 31 Maret, 2018. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/australia-cambodia-scrap-asylum-seeker-deal/>
- Amnesty. "What's the Difference Between a Refugee and An Asylum Seeker." Diakses 13 Oktober, 2017. <https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/>
- Amnesty. "Cambodia: New Deal with Australia Signs Away Refugee Rights." Diakses 20 November, 2017. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/cambodia-new-deal-australia-signs-away-refugee-rights/>
- ASEAN. "Asean Member States." Diakses 15 Maret, 2018. <http://asean.org/asean/asean-member-states/>
- Australian Bureau of Statistics. "Ancestry," Diakses 1 Mei, 2018. <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/7d12b0f6763c78caca257061001cc588/eb91d0f0f306b41cca2573130014678b!OpenDocument>
- Australian Bureau of Statistics. "Australian Population Grid 2011," Diakses 10 April, 2018. <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1270.0.55.007>
- Australian Bureau of Statistics. "Making Sense of the Census Cheatsheet," Diakses 30 April, 2018. <http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/makingsense>
- Australian Bureau of Statistics. "Media Release: 2016 Census Data Reveals "No Religion" is Rising Fast," Diakses 30 April, 2018. <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mediareleasesbyReleaseDate/7E65A144540551D7CA258148000E2B85?OpenDocument>
- Australian Bureau of Statistics. "Population Characteristics: Ancestry of Australia's Population," Diakses 1 Mei, 2018. <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/bb8db737e2af84b8ca2571780015701e/af5129cb50e07099ca2570eb0082e462!OpenDocument>
- Australian Geographic. "Australia's 10 Deserts." Diakses 9 Februari, 2018. <http://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2016/04/australias-10-deserts>
- Australian Government. "Area of Australia-States and Territories," Diakses 9 Februari, 2018. <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories>
- Australian Government. "Australia in Brief." Diakses 3 April, 2018. <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australia-in-brief.pdf>

- Australian Government. "Cambodia Country Brief." Diakses 18 Maret, 2018.
<http://dfat.gov.au/geo/cambodia/pages/cambodia-country-brief.aspx>
- Australian Government. "Fact Sheet: Abolition of the 'White Australia' Policy." Diakses 11 Februari, 2018.
<https://www.homeaffairs.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/08abolition>
- Australian Government. "Fact Sheet: Australia's Refugee and Humanitarian Programme." Diakses 10 Februari, 2018.
<https://www.homeaffairs.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/60refugee>
- Australian Government. "Geografi Australia: Number of Pople." Diakses 9 Februari, 2018.
<https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab08/untuk.html>
- Australian Government. "Iran Country Brief," Diakses 29 April, 2018.
<http://dfat.gov.au/geo/iran/Pages/iran-country-brief.aspx>
- Australian Government. "Land Areas of States and Territories," Diakses 10 April, 2018.
<http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/area-of-australia-states-and-territories>
- Australian Government. "Memorandum of Understanding Between The Government of The Kingdom of Cambodia and The Government of Australia Relating To The Settlement of Refugees in Cambodia." Diakses 12 Februari, 2018.
<https://dfat.gov.au/international-relations/themes/people-smuggling-trafficking/Documents/cambodia-australia-mou-and-operational-guidelines.pdf>
- Australian Government. "Operation Sovereign Borders." Diakses 3 April, 2018.
<http://osb.homeaffairs.gov.au/>
- Australian Government. "Our Natural Environment." Diakses 9 Februari, 2018.
<https://www.australia.gov.au/about-australia/our-country/our-natural-environment>
- Australian Government. "Schools in Australia," Diakses 23 April, 2018.
<https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/schools>
- Australian Government. "Sri Lanka Country Brief," Diakses 29 April, 2018.
<http://dfat.gov.au/geo/sri-lanka/Pages/sri-lanka-country-brief.aspx>
- Australian Human Rights Commission. "Asylum Seekers and Refugees Guide." Diakses 15 Desember, 2017. <https://www.humanrights.gov.au/our-work/asylum-seekers-and-refugees/asylum-seekers-and-refugees-guide>
- Australian National Audit Office. "Offshore Processing Centre in Nauru and Papua New Guinea: Contract Management of Garrison Support and Welfare Service,"

Diakses 3 April, 2018. <https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/offshore-processing-centres-nauru-and-papua-new-guinea-contract-management>

Cambodian Centre for Human Right. "CCHR Press Release – Phnom Penh, 4 January 2014," Diakses 16 Maret, 2018. [http://cchrcambodia.org/media/files/press_release/459_200cpcctrvcohratd\(_en.pdf](http://cchrcambodia.org/media/files/press_release/459_200cpcctrvcohratd(_en.pdf)

Cambodian Centre for Human Rights. "CCHR Press Release – Phnom Penh, 18 December 2013," Diakses 16 Maret, 2018. http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=456&id=5

Cambridge Dictionary. "municipal," Diakses 23 April, 2018. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/municipal>

Cambridge Dictionary. "whistle-blower," Diakses 3 April, 2018. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/whistle-blower>

Common Wealth Fund. "Mirror, Mirrow on the Wall, 2014 Update: How the US Health Care System Compares Internationally," Diakses 11 April, 2018. <http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror>

Common Wealth Fund. "The United States Health System Falls Out," Diakses 11 April, 2018. <http://www.commonwealthfund.org/interactives/2017/july/mirror-mirror/>

Facts and Details. "Geography in Cambodia," Diakses 15 Maret, 2018. http://factsanddetails.com/southeast-asia/Cambodia/sub5_2e/entry-2928.html

Future Directions. "Australia's Water Security Part 1: Water Resources," Diakses 28 April, 2018. http://www.futuredirections.org.au/publication/australia-s-water-security-part-1-water-resources/#_ftn2

Human Rights Watch. "Cambodia: 30 Years of Hun Sen Violence, Repression," Diakses 15 Maret, 2018. <https://www.hrw.org/news/2015/01/13/cambodia-30-years-hun-sen-violence-repression>

Human Rights Watch. "World Report 2014: Cambodia," Diakses 15 Desember, 2017. <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/cambodia>

Human Rights Watch. "30 Years of Hun Sen: Violence, Repression, and Corruption in Cambodia," Diakses 15 Maret, 2018. <https://www.hrw.org/report/2015/01/12/30-years-hun-sen/violence-repression-and-corruption-cambodia>

Index Mundi. "Sri Lanka Demographics Profile 2018," Diakses 1 Mei, 2018. https://www.indexmundi.com/sri_lanka/demographics_profile.html

- ITU. "ITU Releases Annual Global ICT Data and ICT Development Index Country Rankings," Diakses 9 Februari, 2018. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/68.aspx#.Wn1dfaiWbIU
- IZUMI Foundation. "Health Care Infrastructure," diakses 11 April, 2018. <http://izumi.org/about/how-we-work/health-care-infrastructure/>
- John Mark Ministries. "Australia: 1996 Census (Religion)," diakses 30 April, 2018. <http://www.jmm.org.au/articles/8174.htm>
- Kaldor Centre UNSW. "Memorandum of Understanding Between The Republic of Nauru and The Commonwealth of Australia, Relating to The Transfer to And Assessment of Persons in Nauru and Related Issues," diakses 15 Februari, 2018. <http://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/default/files/australia-nauru-mou-2013.pdf>
- Liberal Party of Australia. "The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy." Diakses 13 November, 2017. http://lpaweb-static.s3.amazonaws.com/Policies/OperationSovereignBorders_Policy.pdf
- Mercer. "2014 Quality of Living Worldwide City Rankings – Mercer Survey," Diakses 23 April, 2018. <https://www.mercer.com/newsroom/2014-quality-of-living-survey.html>
- Migration Policy Institute. "The Australia-Cambodia Refugee Relocation Agreement is Unique but Does Little to Improve Protection." diakses 13 Oktober, 2017. <https://www.migrationpolicy.org/article/australia-cambodia-refugee-relocation-agreement-unique-does-little-improve-protection>
- Minister for Foreign Affairs. "Iran to Receive Sanctions Relief After Meeting Nuclear Commitments," diakses 29 April, 2018. https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160117.aspx
- Monash University. "Asylum," Diakses 28 April, 2018, <https://www.monash.edu/mapping-population/public-opinion/surveys/inventory-of-surveys/asylum>
- Multicultural Australia. "White Australia Policy." Diakses 11 Februari, 2018. <http://www.multiculturalaustralia.edu.au/hotwords/unpack/White.Australia.Policy>
- Museums Victoria Collection. "Post World War II British Migration to Australia." Diakses 2 Mei, 2018, <https://collections.museumvictoria.com.au/articles/13640>
- OECD, "Population." Diakses 10 April, 2018. <https://data.oecd.org/pop/population.htm>
- Ospedale Sicuro, "Most Efficient Health Care 2014: Countries." Diakses 23 April, 2018.

<http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf>

Oxford Dictionaries. "Refoulement." Diakses 3 April, 2018.
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/refoulement>

Parliament of Australia. "Boat Arrivals in Australia: A Quick Guide to the Statistics." Diakses 11 Februari, 2018,
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/QG/BoatArrivals

Parliament of Australia. "Boat Arrivals in Australia Since 1976." Diakses 2 Mei, 2018,
https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/boatarrivals

Parliament of Australia. "Asylum Seekers and Refugees: What are the Facts?." Diakses 13 Oktober, 2017,
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/AsylumFacts

Parliament of Australia. "Australia's offshore processing of asylum seekers in Nauru and PNG: A quick guide to statistics and resources." Diakses 18 November, 2017,
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/Offshore#_Total_number_of

Parliament of Australia. "Its Complicated: A Timeline of Australia-Iran Relations in a Historical Perspective," Diakses 29 April, 2018,
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/Aust-IranRelations#_Toc355852453

Parson, Richard. "Assessing the economic contribution of refugees in Australia." Brisbane: Multicultural Development Association, 2013.
<http://apo.org.au/system/files/35435/apo-nid35435-65091.pdf>

Photius. "Population Density – Persons Per Sq Km 2014 Country Ranks, Alphabetical." Diakses 9 Februari, 2018,
https://photius.com/rankings/geography/population_density_persons_per_sq_km_2014_1.html

Real Australia Travel. "Australia Facts." Diakses 10 April, 2018.
<http://www.realaustraliatravel.com/australia-facts.html>

Refugee Action Coalition Sydney. "Cambodian Groups Protest Against Australian Refugee Deal." Diakses 14 Februari, 2018,
<http://www.refugeeaction.org.au/?p=3533>

Refugee Action Coalition Sydney. "Manus and Nauru." Diakses 13 Maret, 2018,
http://www.refugeeaction.org.au/?page_id=4528

- Refugee Council of Australia. "History of Australia's Refugee Program." Diakses 14 Januari, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/seekingsafety/refugee-humanitarian-program/history-australias-refugee-program/>
- Refugee Council of Australia. "Offshore Processing." Diakses 13 Maret, 2018, <https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing/>
- REF World. "Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Australia, Relating to the Settlement of \Refugees in Cambodia." Diakses 15 Desember, 2017, <http://www.refworld.org/docid/5436588e4.html>
- Right Now. "Amnesty International's Fact-Finding Visit to Nauru." Diakses 1 Mei, 2018, <http://rightnow.org.au/interview-3/amnesty-internationals-fact-finding-visit-to-nauru/>
- Strategy&. "Australia's Health Care System: An Opportunity for Economic Growth," diakses 23 April, 2018, <https://www.strategyand.pwc.com/reports/australias-healthcare-system>
- The Iran Primer. "Iran Minorities 2: Ethnic Diversity." Diakses 1 Mei, 2018. <http://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity>
- The Statistics Portal. "Australia: Ethnic Groups as of 2011." Diakses 1 Mei, 2018. <https://www.statista.com/statistics/260502/ethnic-groups-in-australia/#>
- The World Bank. "Global Rankings 2014." Diakses 3 April, 2018. <https://lpi.worldbank.org/international/global/2014>
- The World Bank. "Global Rankings 2012." Diakses 3 April, 2018. <https://lpi.worldbank.org/international/global/2012>
- The World Bank. "Population Density (People per sq. km of land area)," Diakses 10 April 2018. <https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?end=2014&start=1961>
- UNESCO. "Refoulement." Diakses 2 November, 2017. <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/refoulement/>
- UNHCR. "Assistance." Diakses 23 April, 2018. <http://www.unhcr.org/assistance-in-australia-and-the-region.html#g>
- UNHCR. "Monitoring Reports." Diakses 28 April, 2018. <http://www.unhcr.org/en-au/search?comid=5811a3437&cid=49aea93ae2&scid=49aea93a6d&tags=monitoringreport>

- UNHCR. "Protecting Refugees: Questions and Answers." Diakses 17 Oktober, 2017. <http://www.unhcr.org/afr/publications/brochures/3b779dfe2/protecting-refugees-questions-answers.html>
- UNHCR. "States Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and The 1967 Protocol." Diakses 6 Februari, 2018. <http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>
- UNHCR. "The 1951 Refugee Convention." Diakses 14 Januari, 2018. <http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>
- UNHCR. "UNHCR Statement on Australia-Cambodia Agreement on Refugee Relocation." Diakses 14 Januari, 2018. <http://www.unhcr.org/news/press/2014/9/542526db9/unhcr-statement-australia-cambodia-agreement-refugee-relocation.html>
- United States Conference of Catholic Bishops. "Catholic Social Teaching on Immigration and the Movement of Peoples." Diakses 30 April, 2018. <http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/immigration/catholic-teaching-on-immigration-and-the-movement-of-peoples.cfm>
- World Atlas. "What is the Commonwealth?," Diakses 9 Februari, 2018. <https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-commonwealth.html>
- World Atlas. "What Type of Government Does Cambodia Have?," Diakses 15 Maret, 2018, <https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-cambodia-have.html>
- World Data. "Refugee Countries and Asylum Data." Diakses 11 Desember, 2017. <https://www.worlddata.info/refugees-by-country.php>

Internet (Jurnal Online)

- Coddington, Kate dan Alison Mountz. "Countering Isolation With the Use of Technology: How Asylum-Seeking Detainees on Islands in the Indian Ocean Use Social Media to Transcend Their Confinement," *Journal of the Indian Ocean Region* 10 (1) (2014): 97-112, doi: 10.1080/19480881.2014.896104
- Fleay, Caroline, Anita Lumbus, dan Lisa Hartley. "People Seeking Asylum in Australia and their Access to Employment: Just What Do We Know?." *Cosmopolitan Civil Societies Journal*, 8 (2) (2016): 4969, <http://dx.doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4969>
- Gorniok, Lukasz. "Swedish Refugee Policy Making in Transition?." PhD diss., Umea University, 2016.
- Jacobsen, Karen. "Can refugees benefit the state? Refugee resources and African state building." *Journal of Modern African Studies*, 40, 4 (2002): 577-596, DOI: 10.1017/S0022278X02004081
- Jacobsen, Karen. "Factors Influencing the Policy Response of Host Governments to Mass Refugee Influx." *International Migration Review*, Vol 30, No 3 (1996): 655, DOI: 10.2307/2547631
- Jupp, James. "From white Australian to Woonera: The story of Australian Immigration." *Cambridge University Press*, 2007. Google Books.
- McKay, Fiona H., Samantha L. Thomas, Susan Kneebone. "It would be okay if they came through the proper channels: community perceptions and attitudes toward asylum seekers in Australia." *Journal of Refugees Studies* 25, no 1 (2012): 2. doi: 10/1093/jrs/fer010
- Pederson, Maria. "Australia and the 1951 Refugee Convention: An Analyst of Incentives for Non Compliance." Master Thesis, Aalborg University Copenhagen, 2016.
- Rashidvash, Vahid. "Iranian People: Iranian Ethnic Groups," *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 13, No 15 (Agustus 2013) 2016, <https://pdfs.semanticscholar.org/8ddc/b5154976f79cef65ec944dce613d3fd25d.pdf>
- Taylor, Savitri. "Australia's Safe Third Country Provisions: Their Impact on Australia's Fulfillment of the Non Refoulement Obligations Imposed by the Refugee Convention, The Torture Convention and the ICCPR." *University of Tasmania Law Review* 15, (1996), 196-235. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/1996/9.html>

Laporan Online

- Adams, Brad. 2015. *30 Years of Hun Sen: Violence, Repression, and Corruption in Cambodia*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2015/01/12/30-years-hun-sen/violence-repression-and-corruption-cambodia>
- Amnesty International. 2012. *Nauru Camp A Human Rights Catastrophe With No End in Sight*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/download/Documents/20000/asa420022012en.pdf>
- Bem, Kazimiers, Nina Field, Nic Maclellan, Sarah Meyer dan Tony Morris. 2007. *A Price Too High: The Cost of Australia's Approach to Asylum Seekers*. A Just Australia, Oxfam Australia dan Oxfam Novib, <https://www.oxfam.org.nz/sites/default/files/oldimgs/a%20price%20too%20high.pdf>
- Cambodian Centre for Human Rights. 2011. *False Promises: Exploring the Citizenship Rights of the Khmer Krom in Cambodia*. Cambodian Centre for Human Rights. http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summary_and_Recommendations%20False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_the_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf
- Cambodian Centre for Human Rights. 2013. *Human Rights in Cambodia: The Situation in 2013*. Cambodian Centre for Human Rights. http://cchrcambodia.org/admin/whatwedo/hrsc/Situation_of_Human_Rights_and_State_of_Democracy_2013_en.pdf
- Cambodian Centre for Human Rights. 2014. *Situation of Human Rights in 2014*. Cambodian Centre for Human Rights. http://cchrcambodia.org/admin/whatwedo/hrsc/Situation_of_Human_Rights_2014_Eng.pdf
- Commonwealth of Australia. 2014. Official Committee Hansard: Senate: Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee. Commonwealth of Australia. http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/estimate/e0ac4873-6e45-47ec-b82f-7eb06a2dd45f/toc_pdf/Legal%20and%20Constitutional%20Affairs%20Legislation%20Committee_2014_10_20_2981_Official.pdf
- Department of Immigration and Citizenship. 2008. *The People of Australia: Statistics from The 2006 Census*. Department of Immigration and Citizenship. https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/01_2014/poa-2008.pdf
- International Labour Organization Better Factories Cambodia. 2014. *Thirty First Synthesis Report on Working Conditions in Cambodia's Garment Sector*. International Labour Organization Better Factories Cambodia. http://www.usfashionindustry.com/pdf_files/Cambodia%20Factories.pdf

National Institute of Statistics Ministry of Planning. 2015. *Cambodia Socio-Economic Survey 2014*. National Institute of Statistics Ministry of Planning. http://www.ilearnincambodia.net/uploads/3/1/0/9/31096741/cses_2014_report.pdf

Reporters Without Borders for Freedom of Information. 2013. *2013 World Press Freedom Index: Dashed Hopes After Spring*. Reporters Withour Borders For Freedom of Information. <https://rsf.org/en/news/2013-world-press-freedom-index-dashed-hopes-after-spring>

Buku (Fisik)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

